PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DPRD

HIMPUNAN PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Padang, Desember 2025

@dprdprovsumbar https://dprd.sumbarprov.go.id/

Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SERTA PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SENIN, 15 JULI 2024

==========

ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA OPD/ BIRO/ RSD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN. PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, ATAS KARUNIA DAN KEBERKAHAN DARINYA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

SHALAWAT DAN SALAM KITA MOHONKAN JUGA KEPADA ALLAH SAW AGAR DILIMPAHKAN BAGI JUNJUNGAN KITA YANG MULIA NABI MUHAMMAD SAW. SEMOGA KITA BERSAMA DAPAT MENTAULADANINYA DALAM DALAM PEMIKIRAN, PERKATAAN, DAN PERBUATAN SEHINGGA KITA DAPAT MEMPEROLEH KEBAHAGIAN DI DUNIA DAN AKHIRAT.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

MERUJUK KEPADA DATA DAN INFORMASI YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SUMATERA BARAT, PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT TRIWULAN I–2024 YANG DIHITUNG BERDASARKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENCAPAI RP.80,65 TRILIUN ATAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENCAPAI RP.48,70 TRILIUN. EKONOMI SUMATERA BARAT TRIWULAN I–2024 TERHADAP PERIODE YANG SAMA DI TAHUN SEBELUMNYA TUMBUH SEBESAR 4,37 PERSEN (Y-ON-Y). DARI SISI PRODUKSI, LAPANGAN USAHA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB MENGALAMI PERTUMBUHAN TERTINGGI SEBESAR 9,88 PERSEN. SEMENTARA DARI SISI PENGELUARAN PERTUMBUHAN TERTINGGI DICAPAI OLEH KOMPONEN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) SEBESAR 20,56 PERSEN. EKONOMI SUMATERA BARAT TRIWULAN I–2024 TERHADAP TRIWULAN SEBELUMNYA MENGALAMI KONTRAKSI ATAU PENURUNAN SEBESAR 0,63 PERSEN (Q-TO-Q). DARI SISI PRODUKSI, LAPANGAN USAHA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB MENGALAMI PERTUMBUHAN TERTINGGI SEBESAR 11,49 PERSEN. SEMENTARA DARI SISI PENGELUARAN, KOMPONEN

Dipindai dengan CamScanner

PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) MENGALAMI KONTRAKSI TERDALAM SEBESAR 37,46 PERSEN.

PADA MEI 2024 TERJADI INFLASI YEAR ON YEAR (Y-ON-Y) SEBESAR 4,17 PERSEN DENGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) SEBESAR 107,77. INFLASI TERTINGGI TERJADI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT SEBESAR 5,93 PERSEN DENGAN IHK SEBESAR 108,98 DAN TERENDAH TERJADI DI KOTA PADANG SEBESAR 3,64 PERSEN DENGAN IHK SEBESAR 107,35.

NILAI TUKAR PETANI (NTP) SUMATERA BARAT MEI 2024 SEBESAR 123,72 ATAU NAIK 1,87 PERSEN DIBANDING NTP BULAN SEBELUMNYA. PENINGKATAN NTP DIKARENAKAN PENINGKATAN INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI (IT) NAIK SEBESAR 2,15 PERSEN DAN INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI (IB) SEBESAR 0,27 PERSEN. NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN (NTUP) SUMATERA BARAT APRIL 2024 126,99 ATAU NAIK 2,27 PERSEN DIBANDING NTUP BULAN SEBELUMNYA. PADA MEI 2024 NTP MASING-MASING SUBSEKTOR TERCATAT SEBESAR 103,96 UNTUK SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN (NTPP), 133,90 UNTUK SUBSEKTOR HORTIKULTURA (NTPH), 149,34 UNTUK SUBSEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT (NTPR), 110,55 UNTUK SUBSEKTOR PETERNAKAN (NTPT), DAN 92,01 UNTUK SUBSEKTOR PERIKANAN (NTPN). SUBSEKTOR PERIKANAN TERBAGI MENJADI DUA, YAITU SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN NTP MASING-MASING SEBESAR 93,73 DAN 90,70.

KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE SUMATERA BARAT PADA APRIL 2024 MELALUI PINTU MASUK BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU SEBANYAK 7.166 KUNJUNGAN, MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 140,79 PERSEN DIBANDINGKAN BULAN SEBELUMNYA. TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BERBINTANG DI SUMATERA BARAT APRIL 2024 ADALAH

Dipindai dengan CamScanner

SEBESAR 41,38 PERSEN, MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 7,54 POIN DIBANDINGKAN TPK BULAN SEBELUMNYA. TPK HOTEL NONBINTANG DI SUMATERA BARAT PADA APRIL 2024 ADALAH SEBESAR 23,63 PERSEN, MENINGKAT 8,74 POIN DIBANDINGKAN TPK BULAN SEBELUMNYA. RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU DI HOTEL BERBINTANG PADA APRIL 2024 TERCATAT SEBESAR 1,18 HARI, TURUN 0,10 HARI DIBANDINGKAN BULAN SEBELUMNYA.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI SUMATERA BARAT BULAN FEBRUARI 2024 SEBESAR 5,79 PERSEN, MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 0,11 PERSEN POIN DIBANDINGKAN FEBRUARI 2023. BULAN FEBRUARI 2024, JUMLAH ANGKATAN KERJA DI SUMATERA BARAT SEBANYAK 3,09 JUTA ORANG, MENINGKAT 86,78 RIBU ORANG DIBANDING FEBRUARI 2023, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) JUGA MENGALAMI KENAIKAN 0,48 PERSEN POIN. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) FEBRUARI 2024 SEBESAR 5,79 PERSEN, TURUN SEBESAR 0,11 PERSEN POIN DIBANDINGKAN DENGAN FEBRUARI 2023. PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI SUMATERA BARAT SEBANYAK 2,91 JUTA ORANG, NAIK 84,91 RIBU ORANG DIBANDINGKAN FEBRUARI 2023 (2,82 JUTA ORANG). LAPANGAN PEKERJAAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN TERBESAR PENYERAPAN TENAGA KERJA ADALAH SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (2,97 PERSEN POIN), DIIKUTI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (0,91 PERSEN POIN). SEBANYAK 1,85 JUTA ORANG (63,76 PERSEN) BEKERJA PADA KEGIATAN INFORMAL, NAIK 3,92 PERSEN POIN DIBANDING FEBRUARI 2023. PERSENTASE SETENGAH PENGANGGUR DI PROVINSI SUMATERA BARAT NAIK SEBESAR 2,40 PERSEN POIN, SEMENTARA PERSENTASE PEKERJA PARUH WAKTU MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 1,87 PERSEN POIN DIBANDINGKAN FEBRUARI 2023.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DARI TAHUN KE TAHUN TERUS MENGUPAYAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN. DALAM RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024, TELAH DITETAPKAN TARGET TINGKAT KEMISKINAN UNTUK TAHUN 2024 ADALAH 5,62%. BERBAGAI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI YANG DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MEMBUAT JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERUS BERKURANG HINGGA MENJADI 343,82 RIBU JIWA PADA BULAN SEPTEMBER 2022 DAN MENJADI 340,37 RIBU JIWA PADA BULAN MARET TAHUN 2023. ANGKA INI DIPREDIKSI AKAN TERUS MEMBAIK SEIRING DENGAN KEMBALI PULIHNYA BEBERAPA LAPANGAN USAHA AKIBAT PANDEMI. PERBAIKAN INI DIPREDIKSI CENDERUNG LEBIH LAMBAT DARI PADA TARGET AWAL DALAM RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024, SEHINGGA ANGKA 5,62% HARUS TERKOREKSI MENJADI 5,45% - 5,85% BERDASARKAN HASIL ANALISIS PEMERINTAH DAERAH.

BERDASARKAN PERKEMBANGAN CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGAT KEMISKINAN TRIWULAN II TAHUN 2024 YANG TELAH DIRILIS OLEH BPS PROVINSI SUMATERA BARAT, DIMANA TERDAPAT PENYESUAIAN PROYEKSI TARGET UNTUK KETIGA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TERSEBUT UNTUK TAHUN 2024 JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PADA RKPD TAHUN 2024, YAKNI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN PERKEMBANGAN SEBAGAIMANA YANG DIKEMUKAKAN TADI, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT JUGA SUDAH MENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Dipindai dengan CamScanner

DAERAH (RKPD) TAHUN 2024. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 TERSEBUT MENJADI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN KUPA-PPAS TAHUN 2024. DISAMPING PERUBAHAN DALAM ASUMSI PEREKONOMIAN, PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT JUGA DIDASARI OLEH KEADAAN AKTUAL YANG TELAH TERJADI SEJAK AWAL TAHUN SAMPAI DENGAN AKHIR SEMESTER PERTAMA DI DALAM TAHUN ANGGARAN 2024 INI. KEADAAN AKTUAL YANG TELAH TERJADI TERSEBUT MULAI DARI TERJADINYA BENCANA ALAM SAMPAI DENGAN TERDAPATNYA HAL YANG BERSIFAT PENGATURAN DARI PEMERINTAH PUSAT, DINAMIKA ADMINISTRASI, DAN HASIL AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2023 YANG TELAH SAMA-SAMA KITA IKUTI PADA BEBERAPA WAKTU KE BELAKANG.

SECARA RINGKAS BERIKUT 5 (LIMA) KELOMPOK KONDISI YANG MENGAKIBATKAN PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2024, YAITU:

A. PERUBAHAN YANG TERJADI PADA ASUMSI YANG SEBELUMNYA DIJADIKAN DASAR DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2024.

   PADA BAGAIAN AWAL TADI, KITA TELAH MENGELABORASI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT. TENTU KITA PERLU MENYESUAIKAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN MENYIKAPI HAL-HAL YANG TELAH TERJADI DALAM SEMESTER PERTAMA TAHUN 2024 SERTA HARAPAN DALAM SEMESTER KEDUA YANG AKAN KITA LALUI.

B. KEKURANGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIJADIKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024, SEBAGAIMANA

Dipindai dengan CamScanner

HASIL AUDIT BPK.

DARI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 TANGGAL 17 MEI 2024, SILPA TAHUN ANGGARAN 2023 ADALAH SEBESAR RP.180.447.544.425,19. SEDANGKAN DALAM APBD TA 2024 SILPA TA 2023 DIHARAPKAN SEBESAR RP.251.444.175.049, SEHINGGA TERDAPAT KEKURANGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBANYAK RP.70.996.630.623,81

C. TERJADINYA BENCANA ALAM YANG MEMBUTUHKAN PROSES TANGGAP DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.

DALAM SEMESTER I TAHUN 2024 TERDAPAT BEBERAPA BENCANA ALAM YANG MEMBUTUHKAN PROSES TANGGAP DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI, DIANTARANYA:

1. ERUPSI GUNUNG MARAPI SEJAK AKHIR TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN BULAN-BULAN DALAM SEMESTER I TAHUN 2024.
2. LONGSOR DAN RUSAKNYA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (TPA) REGIONAL DI PAYAKUMBUH YANG BERDAMPAK PADA KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SERTA SEKTOR LAINNYA SEPERTI PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN.
3. BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR PADA 7-8 MARET 2024 YANG TERJADI PADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA, DENGAN LOKASI DAMPAK TERPARAH DI PESISIR SELATAN.
4. BANJIR BANDANG DAN BANJIR LAHAR DINGIN GUNUNG MARAPI PADA 11 MEI 2024.

Dipindai dengan CamScanner

BENCANA-BENCANA ALAM SEBAGAIMANA DIATAS TELAH MERENGGUT KORBAN JIWA DARI SANAK SAUDARA KITA. DISAMPING ITU JUGA MENYEBABKAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN UMUM, SEPERTI JALAN, JEMBATAN, DAN JARINGAN IRIGASI.

D. ADANYA PENGATURAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG MEMERLUKAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN SERTA ADANYA KEBUTUHAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN OPD.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TELAH MENGELUARKAN 2 (DUA) PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT UNTUK MENGAKOMODASI PENGATURAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG MEMERLUKAN PERGESERAN ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN OPD UNTUK PERGESERAN ANGGARAN.

1. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, YANG MENGAKOMODIR PERGESERAN ANGGARAN YANG DISEBABKAN OLEH:

   A) BELUM SESUAINYA PENGANGGARAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/ *SPECIFIC GRANT* (DAU SG) SEBAGAIMANA AMANAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.07/2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

B) TINDAK LANJUT ATAS SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5/20741/KEUDA TENTANG HASIL PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DBH-DR, DBH-CHT, DBH-SAWIT, DBH-MIGAS OTSUS, SERTA TDF.

C) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024.

D) USULAN PERGESERAN ANGGARAN DARI BEBERAPA OPD SEBAGAIMANA SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 904.1.2.4/70A/APKD/BPKAD/2024 TENTANG USULAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN 2024.

2. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, YANG MENGAKOMODIR PERGESERAN ANGGARAN YANG DISEBABKAN OLEH:

A) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

B) SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 900.1/1819.A/SJ PERIHAL HASIL PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

Dipindai dengan CamScanner

KEUANGAN DAERAH TERKAIT DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024.

C) LAPORAN HASIL REVIU INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TERKAIT DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

E. KEWAJIBAN UNTUK MENGGANGGARKAN KEMBALI SISA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BAIK FISIK MAUPUN NON FISIK SERTA SISA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DARI KABUPATEN/ KOTA YANG BELUM DIREALISIR PADA TAHUN SEBELUMNYA.

F. PENURUNAN BELANJA PEGAWAI BERDASARKAN DINAMIKA JUMLAH PEGAWAI, REALISASI AKTUAL, DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024.

G. PERLUNYA DIALOKASIKAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MEMBAYAR KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK KEPADA KABUPATEN/ KOTA.

MERUJUK KEPADA SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, NOMOR: 971.1/04/PPD-BAPENDA/2024, TANGGAL 30 JANUARI 2024 TANTANG PENETAPAN KEKURANGAN SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI SUMATERA BARAT BAGIAN KABUPATEN/ KOTA SE SUMATERA BARAT, MASIH TERDAPAT KURANG SALUR DBH PAJAK KEPADA KABUPATEN/ KOTA SEBESAR RP.317.299.222.238, YANG TERDIRI DARI 4 (EMPAT) JENIS PAJAK PROVINSI, YAITU: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB); BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB); PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB); DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP).

Dipindai dengan CamScanner

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT TENTU DALAM TAHUN ANGGARAN 2024 INI MELALUI PERUBAHAN ANGGARAN PERLU DIALOKASIKAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MEMBAYAR KURANG SALUR DBH PAJAK DIMAKSUD.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERIKUT DIURAIKAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI BERIKUT.

A. PENDAPATAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2024 DI SISI PENDAPATAN DAERAH BERUPA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG DAPAT MEMBIAYAI KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA DALAM PERUBAHAN APBD TA 2024.

DALAM RANGKA OPTIMALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH, KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI ADALAH PENERAPAN STRATEGI-STRATEGI YANG DITUANGKAN KE DALAM LANGKAH YANG KONKRET, YANG AKUNTABEL, SINERGI, KOORDINATIF, MEMANFAATKAN TEKHNOLOGI INFORMASI TERBARUKAN, DAN EFEKTIF DALAM PELAKSANAAN DENGAN MENERAPKAN BEBERAPA STARTEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH, YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

1. MENGOPTIMALKAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MELALUI:
   A) MENGEMBANGKAN PELAKSANAAN *PAYMENT POINT SYSTEM* BEKERJASAMA DENGAN BANK NAGARI, DAN BANK PEMERINTAH LAINNYA PADA SELURUH KANTOR SAMSAT DI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA

Dipindai dengan CamScanner

PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK;

B) MENGOPERASIKAN KANTOR SAMSAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DAN KANTOR-KANTOR SAMSAT NAGARI DI SELURUH KABUPATEN YANG MEMPUNYAI WILAYAH JAUH DALAM RANGKA MENDEKATKAN PELAYANAN KEPADA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR ATAU WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYARKAN PAJAKNYA.

C) MELAKUKAN PEMBEBASAN DENDA PKB/ BBNKB UNTUK PERIODE WAKTU TERTENTU.

D) INOVASI "SI BIJAK", YAITU ISI MINYAK BAYAR PAJAK DAN CICILAN PAJAK.

E) OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR SEPERTI SAMSAT KELILING, SAMSAT D*RIVE THRU*, SAMSAT NAGARI, SAMSAT GERAI, SAMSAT MALAM, SAMSAT *CAR FREE DAY*, SAMSAT WISATA, SAMSAT TERMINAL DALAM RANGKA MENDEKATKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

F) MELAKUKAN PEMBEBASAN BBNKB II BAGI KENDARAAN BERMOTOR LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PERIODE WAKTU TERTENTU.

G) MELAKSANAKAN RAZIA TERPADU PKB/ BBNKB SECARA RUTIN DAN BERKESINAM-BUNGAN.

H) MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SUMATERA BARAT YANG TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAERAH, DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMATERA BARAT DAN PT. JASA RAHARJA DAN MELIBATKAN PT. BANK NAGARI, DALAM RANGKA KELANCARAN URUSAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PADA SELURUH KANTOR SAMSAT SE-

Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI SUMATERA BARAT.

I) MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR UPT/ SAMSAT DENGAN MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KANTOR UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT SECARA BERKALA DAN BERTAHAP DAN MELENGKAPI SELURUH PERALATAN SISTEM PELAYANAN BAIK PELAYANAN ONLINE MAUPUN PELAYANAN YANG DILAKUKAN SECARA OFFLINE.

J) MELAKUKAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PETUGAS TERKAIT TENTANG TUGAS PELAYANAN DI LAPANGAN.

K) MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SECARA RUTIN DAN LANGSUNG TERHADAP SEMUA TUGAS PADA SEMUA UPT.

L) MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA INVENTARISASI ASET KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI OBJEK PAJAK.

M) MENINGKATKAN KUALITAS PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI STATUS OBJEK PAJAK.

N) MELAKSANAKAN EVALUASI SECARA BERKALA ATAS PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS SELURUH KEPALA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

O) SOSIALISASI SECARA MASIF TERKAIT PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT SELAKU WAJIB PAJAK DAN STAKEHOLDER TERKAIT.

Dipindai dengan CamScanner

2. MELAKUKAN PENDATAAN POTENSI, EVALUASI PENERIMAAN DAN MELAKUKAN KAJIAN DALAM UPAYA MEMPREDIKSI KONDISI EKONOMI TAHUN BERIKUTNYA UNTUK MENGHITUNG PENETAPAN TARGET APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
3. MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM, JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU DENGAN MENGIMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA SELURUH OPD DINAS/ INSTANSI PENGELOLA PELAYANAN RETRIBUSI SERTA MENJARING POTENSI-POTENSI BARU YANG SELAMA INI BELUM TERPUNGUT.
4. MENINGKATKAN KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR OPD DINAS/ INSTANSI PELAYANAN RETRIBUSI DENGAN MELENGKAPI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN, MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN BERBAIKAN KANTOR SECARA BERKALA, DAN BERTAHAP DAN MELENGKAPI SELURUH PERALATAN SISTEM PELAYANAN.
5. MENINGKATKAN PELAKSANAAN *GOOD COORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA SEMUA BUMD SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PENINGKATAN JUMLAH DEVIDEN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
6. MENGOPTIMALKAN ASET-ASET PEMERINTAH DAERAH YG MASIH *IDLE* DAN BERPOTENSI SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DENGAN CARA KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN PIHAK LAIN SEHINGGA MEMBERIKAN KONSTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.
7. MENINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN SELURUH OPD DINAS/ INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERUTAMA OPD DINAS/ INSTANSI PENGELOLA BLUD, PENGELOLA KEUANGAN DAN KAS DAERAH, PENGELOLA PELAYANAN

Dipindai dengan CamScanner

PERSAMPAHAN, PENGELOLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGELOLA PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAN LAIN-LAIN SEHINGGA DAPAT MENINGKATAN PENERIMAAN DAN BERKONSTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

8. MENINGKATKAN KOORDINASI, KONFIRMASI DAN REKONSILIASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DARI DANA BAGI HASIL; DAN
9. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KONFIRMASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PIHAK SWASTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DID, IPDMIP, PHJD, HIBAH DAN LAINNYA SERTA SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

PENDAPATAN DAERAH DITARGETKAN SEBANYAK RP.6.58 TRILIUN LEBIH, BERTAMBAH MINIMAL SEBANYAK RP.2,25 MILYAR LEBIH DENGAN RINCIAN:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITARGETKAN MINIMAL SEBESAR RP.3,11 TRILIYUN LEBIH YANG TERDIRI DARI:
   A) PENDAPATAN DARI PAJAK DAERAH SEBESAR RP.2,55 TRILIYUN LEBIH,
   B) PENDAPATAN DARI RETRIBUSI DAERAH SEBESAR RP.384,29 MILIYAR LEBIH,
   C) PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SEBESAR RP.125,49 MILIYAR LEBIH; DAN
   D) PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SEBESAR RP.54,11 MILIYAR LEBIH.

Dipindai dengan CamScanner

2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR RP.3,453 TRILIYUN LEBIH, NAIK SEBANYAK RP.2,25 MILIYAR DARI APBD 2024 AWAL SEBANYAK RP.3,451 TRILIYUN LEBIH.

   PENAMBAHAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER BERASASAL DARI TRANSFER ANTAR DAERAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROVINSI KEPRI, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN KARIMUN, DENGAN TOTAL SEBANYAK RP2,25 MILIYAR YANG DISETORKAN SEBAGAI BANTUAN BENCANA ALAM YANG MELANDA PROVINSI SUMATERA BARAT.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SEBESAR RP.17,02 MILYAR LEBIH

B. BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2024 DI SISI BELANJA DAERAH ADALAH PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MENYIKAPI PERUBAHAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN SEBELUMNYA.

DALAM PENCAPAIAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAKA STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 DILAKUKAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT:

1. MENITIKBERATKAN PADA PENCAPAIAN VISI DAN MISI PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026.

Dipindai dengan CamScanner

2. PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DIPRIORITASKAN UNTUK MENDUKUNG KETERCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PADA MASING-MASING URUSAN, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, SERTA INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNGGULAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026
3. MENDORONG KEGIATAN BERSIFAT STRATEGIS DAN/ ATAU KEGIATAN LAINNYA YANG MEMILIKI DAMPAK SIGNIFIKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. MENDORONG IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

BELANJA DAERAH DIRENCANAKAN SEBANYAK RP.7,03 TRILIUN LEBIH, DENGAN KEBIJAKAN:

1. PENGALOKASI ANGGARAN BELANJA UNTUK PROSES RECOVERI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM YANG RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM.
2. TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2023, DIANTARANYA BERUPA: PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK:

Dipindai dengan CamScanner

A) SISA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) YANG HARUS DIANGGARKAN KEMABLI PADA PERUBAHAN APBD TA. 2024, YANG TERDIRI DARI:

- SISA DAK FISIK SEBESAR RP.23,97 MILYAR LEBIH
- SISA DAK NON FISIK SEBESAR RP.2,10 MILIYAR LEBIH

B) HUTANG BELANJA TAHUN 2023 DARI BEBERAPA SKPD YANG HARUS DIANGGARKAN KEMBALI DI TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH SEBESAR RP.5,23 MILIYAR LEBIH.

C) KEGIATAN FISIK YANG PENGERJAANNYA MELEWATI TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH SEBESAR RP.18,27 MILIYAR LEBIH.

D) SISA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DARI KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2023 UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI YANG HARUS DISALURKAN SEBESAR RP.2,56 MILIYAR LEBIH.

3. PENGURANGAN ALOKASI BELANJA PEGAWAI SEBAGAI AKIBAT DARI DINAMIKA JUMLAH PEGAWAI, PENYESUAIAN DENGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI, PEMBERLAKUAN PP NOMOR 14 TAHUN 2024, SEHINGGA ALOKASINYA PERLU DIKURANGI PADA BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN SEBESAR RP.47,79 MILIYAR LEBIH DAN PADA BELANJA TPP SEBESAR RP.8,43 MILIYAR LEBIH.

4. PENYESUAIAN BELANJA DENGAN PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA UNTUK TAHUN 2024 PADA SIPD, DAN PENYESUAIAN DENGAN PENERAPAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ATAS PENGADAAN BARANG BAIK BARANG PAKAI HABIS MAUPUN BELANJA MODAL.

Dipindai dengan CamScanner

5. PENYESUAIAN UNTUK PERGESERAN BELANJA PADA BEBERAPA KEGIATAN TERKAIT BELANJA HIBAH PADA BEBERAPA SKPD SESUAI KEWENANGANNYA.
6. PENYESUAIAN PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA, OBJEK BELANJA, DAN RINCIAN OBJEK BELANJA, BAIK YANG TELAH DILAKUKAN PERGESERAN BELANJA MELALUI PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR, MAUPUN YANG HARUS MELALUI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH.
7. PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PEMBAYARAN KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK KE PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SEBESAR RP.150 MILYAR DARI TOTAL KURANG SALUR SEBANYAK RP.317,29 MILIYAR LEBIH. ADAPUN SISANYA DIUSULKAN UNTUK DIANGGARKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA.

DENGAN DEMIKIAN BELANJA DAERAH YANG SEMULA DIALOKASIKAN PADA APBD TAHUN 2024 SEBESAR RP6,81 TRILIYUN LEBIH DIRANCANG MENJADI SEBESAR RP.7,03 TRILIYUN LEBIH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 ATAU BERTAMBAH SEBESAR RP.219,29 MILIYAR LEBIH YANG TERDIRI DARI BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA, DENGAN URAIKAN SEBAGAI BERIKUT.

1. BELANJA OPERASI

PADA APBD AWAL TAHUN ANGGARAN 2024 DIANGGARKAN BELANJA OPERASI SEBESAR RP4,68 TRILIYUN LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD DIRENCANAKAN SEBESAR RP.4,75 TRILIYUN LEBIH, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR RP.66,47 MILIYAR LEBIH ATAU 1.42%

Dipindai dengan CamScanner

2. BELANJA MODAL

BELANJA MODAL PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 AWAL ADALAH SEBESAR RP.782,79 MILIYAR LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD DIPERKIRAKAN SEBESAR RP.807,17 MILIYAR LEBIH, NAIK SEBESAR RP.24,77 MILIYAR LEBIH ATAU 3.11%

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

PADA APBD TAHUN 2024 DIALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR RP.46.94 MILIYAR LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD MENJADI SEBESAR RP.25,38 MILIYAR LEBIH ATAU BERKURANG SEBESAR RP.21,55 MILIYAR LEBIH.

4. BELANJA TRANSFER

BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2024 ADALAH SEBESAR RP.1,30 TRILIYUN LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD MENJADI SEBESAR RP.1,45 TRILIYUN LEBIH, NAIK SEBESAR RP.150 MILIYAR ATAU 10.33%.

C. PEMBIAYAAN

UNTUK KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 AWAL BERASAL DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR RP.251,44 MILIYAR LEBIH. SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

NOMOR 47.B/LHP/ XVIII.PDG/05/2024 TANGGAL 17 MEI 2024 DITETAPKAN SILPA TAHUN 2023 ADALAH SEBESAR RP.180,44 MILIYAR LEBIH ATAU KURANG SEBANYAK RP. 70,99 MILYAR LEBIH

DENGAN ADANYA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2023 AUDITED TERSEBUT, MAKA ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN 2024 HARUS DILAKUKAN PENYESUAIAN PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENJADI SEBESAR RP.180.447.544.425 TERSEBUT.

PADA BAGIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

MEMENUHI AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) SERTA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2024.

KAMI MENYADARI, BAHWA KUPA DAN PPAS TAHUN 2024 YANG KAMI SUSUN INI BELUMLAH SEPENUHNYA MENJAWAB SELURUH USULAN DAN ASPIRASI YANG BERKEMBANG DI TENGAH MASYARAKAT, NAMUN DENGAN MEMPERHATIKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MAKA PENYUSUNAN RANCANGAN KUPA DAN PPAS TAHUN 2024 TETAP DIUPAYAKAN SEMAKSIMAL DAN DIHARAPKAN DAPAT MENGAKOMUDIR ASPIRASI MASYARAKAT.

Dipindai dengan CamScanner

ADAPUN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PPAS TAHUN 2024, SECARA TEKNIS TETAP MENGACU PADA KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA MEMPEDOMANI REGULASI TERKAIT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).

DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD INI, TERDAPAT HAL-HAL YANG PERLU DISEPAKATI ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH, YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

1. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024;
2. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH;
3. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH; DAN
4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH;

SELANJUTNYA, RANCANGAN KUPA-PPAS INI AKAN DILANJUTKAN DENGAN PROSES PEMBAHASAN GUNA MEMPEROLEH KESEPAKATAN BERSAMA DAN MENJADI KUPA-PPAS TA 2024. KEMUDIAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DEMIKIANLAH NOTA PENGANTAR KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA PERUBAHAN PPAS INI KAMI SAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS WAKTU YANG DIBERIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI. MOHON MAAF APABILA ADA YANG TIDAK PADA TEMPATNYA.

Dipindai dengan CamScanner

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH.

WASSALAMU'ÁLAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUHU.

PERUBAHAN

PADANG, 15 JULI 2014

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

AUDY JOINALY

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PENGANTAR RANPERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024
RABU, 31 JULI 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sore hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada sore hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2024, dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelum kita masuk pada agenda Rapat Paripurna ini terlebih dahulu kami sampaikan, bahwa sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, pada hari ini terdapat 2 (dua) agenda rapat paripurna, yaitu penetapan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah dan penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Berhubung belum diterimanya hasil fasilitasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, maka pengambilan keputusannya belum dapat kita lakukan pada rapat paripurna ini dan akan diagendakan kembali setelah diterimanya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada rapat paripurna hari ini, hanya ada 1 (satu) agenda saja yaitu Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam rangka menyikapi perubahan asumsi KUA serta kondisi lainnya yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan APBD, pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 27 Juli 2024 yang lalu, Gubernur dan DPRD telah menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 177 dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan September dan Keputusan bersama antara antara Kepala Daerah dan DPRD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berkahirnya tahun anggaran atau tepatnya tanggal 30 September.

Dalam hal, Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil Keputusan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah melakukan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan atau dalam arti kata tidak ada Perubahan APBD.

Berhubung masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024 dan Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2024-2029 belum bisa efektif melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya alat kelengkapan DPRD dan ditetapkannya Pimpinan DPRD definitif, maka untuk

Dipindai dengan CamScanner

menghindari keterlambatan dalam penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang berakibat tidak bisa dilakukannya Perubahan APBD, maka penyampaian, pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, perlu dilakukan percepatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan agenda kegiatan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah, maka pada Rapat Paripurna Dewan hari ini, Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

Sebelum Saudara Gubernur menyampaikan Nota Pengantarnya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut yang perlu menjadi perhatian nanti dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang disepakati tersebut, sifatnya masih tentatif. Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- dan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,- yang disepakati,

angkanya masih bersifat sementara atau imajiner dalam Upaya menyeimbangkan neraca pendapatan dan belanja dari Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024.

2. Memperhatikan kondisi Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, maka Pemerintah Daerah dan TAPD harus lebih cermat dalam perencanaan anggaran yang akan diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Permasalahan yang terjadi dalam perencanaan Perubahan APBD Tahun 2023 yang berdampak tidak tercapainya proyeksi SILPA untuk menutup defisit APBD Tahun 2024, jangan terulang kembali. Apabila permasalahan yang sama terulang kembali, maka akan berdampak nanti dalam penyusunan APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025.
3. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD sampai semester pertama Tahun 2024 yang sudah mencapai 45,87 % serta perekonomian dan PDRB Perkapita masyarakat yang semakin meningkat, maka masih terdapat potensi untuk meningkatkan target penerimaan daerah yang akan ditampung dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner



Rapat Paripurna Yang *Kami Hormati*;

Demikian beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Selanjutnya sesuai dengan agenda pokok Rapat Paripurna kita pada hari ini, kita berikan kesempatan kepada Saudara Gubernur untuk dapat menyampaikan Pengantarnya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dari pengantar yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur, kita sudah dapat mengetahui rencana anggaran Pemerintah

Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, yang mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara umum, rencana anggaran tersebut, sudah sejalan dengan kabijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terdapat dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang disepakati DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Rencana anggaran Pemerintah Daerah yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, perlu kita bahas dan dalami nanti dengan memperhatikan beberapa catatan yang kami kemukakan di atas.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangannya terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, baik dari sisi pendapatan

Dipindai dengan CamScanner

maupun sisi belanja dan dapat merumuskan pandangan, pendapat dan masukan-masukan yang komprehensif, agar Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat lebih akomodatif, efektif, efisien dan akuntabel dan dapat memutus mata rantai permasalahan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan agenda kegiatan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 1 Agustus 2024 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Pengantar Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan " Alhamdulillahirabbilalimin " Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengantar Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

RABU, 31 JULI 2024

==========

ASSALAMUALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA OPD/ BIRO, DIREKTUR RSD, DAN DIREKTUR BUMD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN UNDANGAN, HADIRIN HADIRAT YANG BERBAHAGIA

Dipindai dengan CamScanner

ALHAMDULILLAH, SEGALA PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA SAMPAIKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT, HIDAYAH DAN KARUNIA-NYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR DAN MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

SHALAWAT BERIRING SALAM MARILAH KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH MEMBERIKAN TUNTUNAN BAGI UMAT MANUSIA UNTUK KESELAMATAN KEHIDUPAN BAIK DI DUNIA MAUPUN DI AKHIRAT.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN

Dipindai dengan CamScanner

ANGGARAN 2024, PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD TELAH MELAKSANAKAN PROSES DAN TAHAPAN SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DIMANA PADA TAHAPAN SEBELUMNYA TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN DAN MENYEPAKATI PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TERTUANG DALAM NOTA KESEPAKATAN NOMOR 120-155/GSB-2024 DAN NOMOR 120-8-2024 TANGGAL 27 JULI 2024 TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DAN NOTA KESEPAKATAN NOMOR 120-156/GSB-2024 DAN NOMOR 120-9-2024 TANGGAL 27 JULI 2024 TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

PADA TAHAPAN BERIKUTNYA BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ABPD TAHUN ANGGARAN 2024, PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN DAN

Dipindai dengan CamScanner

MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DIBAHAS DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN.

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TERSEBUT DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG SALAH SATUNYA ADALAH NOTA KEUANGAN. NOTA KEUANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 SECARA SUBSTANSI MEMUAT PENJELASAN ATAU GAMBARAN TENTANG KONDISI DAN PROYEKSI SERTA KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

SEBAGAIMANA PIDATO PENDAPAT AKHIR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP KUA-PPAS TAHUN 2025 DAN KUPA-PPAS TAHUN 2024 PROVINSI

Dipindai dengan CamScanner

SUMATERA BARAT SABTU, 27 JULI 2024, KITA SAMA-SAMA MENYADARI DAN MEMAHAMI BAHWA APBD TAHUN 2024 INI DIHADAPKAN KEPADA KONDISI YANG TIDAK MUDAH, HAMPIR SAMA DENGAN KONDISI TAHUN ANGGARAN 2023 YANG LALU. DI SATU SISI KITA MEMBUTUHKAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG CUKUP BESAR UNTUK MENDANAI PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENJADI PRIORITAS PADA APBD TAHUN 2024, DAN DI SISI YANG LAIN SECARA BERSAMAAN KITA JUGA MENGALAMI KETERBATASAN FISKAL UNTUK MENDANAI PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT SECARA OPTIMAL.

DI TENGAH KETERBATASAN TERSEBUT TENTU KITA TETAP BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK DAPAT MENGAKOMODIR KEWAJIBAN DAN PRIORITAS ANGGARAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 INI. PEMERINTAH PROVINSI HARUS BERUSAHA OPTIMAL AGAR SELURUH URUSAN PEMERINTAHAN BAIK URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR,

Dipindai dengan CamScanner

SAMPAI DENGAN URUSAN PILIHAN DAPAT DILAKSANAKAN SEOPTIMAL MUNGKIN.

GAMBARAN KONDISI DAN PROYEKSI YANG TERSAJI DALAM NOTA KEUANGAN INI SUDAH DIDASARKAN KEPADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA OLEH GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN DPRD PADA TANGGAL 27 JULI 2024 YANG LALU SEBAGAIMANA DIURAIKAN PADA BAB PER BAB PADA NOTA KEUANGAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

GAMBARAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, TOTAL PERUBAHAN APBD SEBESAR 7,057 TRILIUN RUPIAH MENGALAMI KENAIKAN 220,01 MILIAR RUPIAH DARI APBD AWAL SEBESAR SEBESAR 6,837 TRILIUN RUPIAH.

Dipindai dengan CamScanner

KAPASITAS FISKAL ATAU KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT MENGALAMI DEFISIT SEBESAR 160,447 MILIAR RUPIAH YANG MERUPAKAN SELISIH BELANJA DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH. DEFISIT TERSEBUT SESUAI KETENTUAN DITUTUPI DENGAN PEMBIAYAAN NETTO YANG MERUPAKAN SELISIH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN. PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERSUMBER DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR 180,447 MILIAR RUPIAH YANG MERUPAKAN HASIL AUDIT BPK RI ATAS LKPD TAHUN 2023.

JUMLAH SILPA SEBAGAIMANA DIMAKSUD, DIDALAMNYA TERDAPAT SILPA EARMARK YANG BERASAL DARI DANA DAK FISIK, DAK NON FISIK, SISA DANA BOS, SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA, DAN SISA BLUD. DISAMPING HAL TERSEBUT JUGA TERDAPAT KEGIATAN TAHUN 2023 YANG PENYELESAINNYA LEWAT TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN 2024,

Dipindai dengan CamScanner

UTANG BELANJA/ PEKERJAAN YANG HARUS DIBAYARKAN PADA TAHUN 2024, PEKERJAAN YANG SUDAH ADA BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) TETAPI BELUM DIBAYARKAN PADA TAHUN 2023 SERTA UTANG BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/ KOTA YANG HARUS DIBAYARKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

BERDASARKAN PERUBAHAN KUA-PPAS YANG TELAH DISEPAKATI, RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 SECARA UMUM MELIPUTI TOTAL PENDAPATAN DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR 6,877 TRILIUN RUPIAH, BELANJA DAERAH SEBESAR 7,037 TRILIUN RUPIAH, DEFISIT SEBESAR 160,447 MILIAR RUPIAH, DIMANA NILAI DEFISIT TERSEBUT DITUTUPI SEPENUHNYA DENGAN PEMBIAYAAN NETTO, YANG MERUPAKAN SELISIH ANTARA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN. KEBIJAKAN

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. PENDAPATAN DAERAH

PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH DITARGETKAN SEBESAR 6,877 TRILIUN RUPIAH ATAU MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 4,42% DARI APBD AWAL SEBESAR 6,586 TRILIUN RUPIAH. SUMBER PENDAPATAN TERSEBUT TERDIRI DARI :

- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIRENCANAKAN SEBESAR 3,394 TRILIUN RUPIAH NAIK SEBESAR 8,84% ATAU SEBESAR 275,778 MILIAR RUPIAH DARI TARGET APBD AWAL SENILAI 3,118 TRILIUN RUPIAH.
- PENDAPATAN TRANSFER YANG DALAM APBD 2024 AWAL DITARGETKAN SEBESAR 3,451 TRILIUN RUPIAH, PADA PERUBAHAN APBD 2024 INI NAIK SEBESAR 0,07% ATAU SEBESAR 2,250

Dipindai dengan CamScanner

MILIAR RUPIAH SEHINGGA MENJADI 3,453 TRILIUN RUPIAH.

- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR 17,024 MILIAR RUPIAH PADA APBD AWAL DAN MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 75,46% ATAU NAIK SEBESAR 12,846 MILIAR RUPIAH MENJADI SEBESAR 29,870 MILIAR RUPIAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD.

B. BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DIRENCANAKAN SEBESAR 7,037 TRILIUN RUPIAH. MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 219,878 MILIAR RUPIAH ATAU NAIK SEBESAR 3,22% DARI BELANJA DAERAH PADA APBD AWAL SEBESAR 6,818 TRILIUN RUPIAH. TOTAL BELANJA TERSEBUT DAPAT DIRINCI MENURUT KELOMPOK BELANJA SEBAGAI BERIKUT:

Dipindai dengan CamScanner

1. BELANJA OPERASI, SEBESAR 4,726 TRILIUN RUPIAH, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,86% DARI ANGGARAN YANG DITETAPKAN PADA APBD AWAL SEBESAR 4,686 TRILIUN RUPIAH
2. BELANJA MODAL PADA PERUBAHAN APBD DIRENCANAKAN SEBESAR 863,499 MILIAR RUPIAH, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 10,31% ATAU SEBESAR 80,706 MILIAR RUPIAH DARI ANGGARAN PADA APBD AWAL SEBESAR 782,783 MILIAR RUPIAH.
3. BELANJA TIDAK TERDUGA DIRENCANAKAN SEBESAR 29,333 MILIAR RUPIAH, TURUN SEKITAR 37,61% ATAU SEBESAR 17,609 MILIAR RUPIAH DARI YANG DIANGGARKAN PADA APBD AWAL SEBESAR 46,942 MILIAR RUPIAH.
4. BELANJA TRANSFER DIRENCANAKAN SEBESAR 1,418 TRILIUN RUPIAH, NAIK 8,95% ATAU SEBESAR 116,466 MILIAR RUPIAH DARI APBD AWAL SEBESAR 1,301 TRILIUN RUPIAH.

Dipindai dengan CamScanner

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DIALOKASIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN LALU, ATAU TAHUN 2023, SEBESAR 180,447 MILIAR RUPIAH, SESUAI DENGAN AUDIT BPK RI ATAS LKPD TAHUN 2023, SEHINGGA TERJADI PENURUNAN SEBESAR 70,996 MILIAR RUPIAH ATAU TURUN SEBESAR 28,24% DARI APBD AWAL SEBESAR 251,444 MILIAR RUPIAH.

UNTUK PENJELASAN LEBIH LENGKAP DAN TERPERINCI DAPAT DIBACA PADA DOKUMEN NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA LAMPIRANNYA YANG SEBELUMNYA TELAH DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK SELANJUTNYA DAPAT DIBAHAS SECARA BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD, DENGAN HARAPAN DAPAT KITA SEPAKATI SEBELUM BATAS WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

AKHIRNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI TINGGINYA ATAS TERJALINNYA KERJASAMA YANG BAIK SELAMA INI. SEMOGA NIAT IKHLAS DAN IKHTIAR KITA INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG LEBIH BESAR BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT, SERTA MEMPEROLEH RIDHA DAN BERKAH HENDAKNYA DARI ALLAH SWT. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

Dipindai dengan CamScanner

WA BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH, WALLAHU MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIK, FASTABIKHUL KHAIRAT.

WASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUHU.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024
KAMIS, 1 AGUSTUS 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah *SWT*, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini *kita* dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Salawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli `Ala Muhammad wa `Ala Ali Muhammad.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, pada Rapat Paripurna kemaren, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi ke DPRD, Ranperda tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk dapat dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dari Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disampaikan tersebut, secara umum telah sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang disepakati oleh DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, dimana proyeksi pendapatan sebesar Rp. *6.877.451.649.287,-* dan belanja daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,-.

Namun perlu kita cermati bersama, bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalami kembali dalam pembahasan nanti.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD, terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disampaikan oleh Gubenur, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan Pandangan Umum Fraksinya yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan dan saran terhadap Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut.

Berkenaan dengan hal dimaksud, tentunya Fraksi-Fraksi telah menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini. Kami berharap, Fraksi-Fraksi dapat melihat secara menyeluruh Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, baik terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, termasuk usulan kegiatan baru yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024. Dan disamping itu, kami juga berharap Fraksi-Fraksi dapat memberikan masukan dan solusi untuk mendorong peningkatan pendapatan serta mengefektifkan penggunaan anggaran yang alokasinya semakin terbatas.

Untuk itu, kepada masing-masing Fraksi, kami persilahkan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergantian.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra .....
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PKS .....
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat .....
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN .....
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar

Dipindai dengan CamScanner

.....

6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP dan NasDem

.....

7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi .....yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita dengar dan simak bersama, dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, cukup banyak pertanyaan dan tanggapan yang diberikan terkait dengan pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawabannya oleh Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menginformasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat

pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapannya terhadap Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, jawaban dan/atau tanggapan Gubernur tersebut akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan besok, Jum'at tanggal 2 Agustus 2024.

Kami berharap, jawaban atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi nanti, dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi, sehingga terbangun persepsi yang sama antara Fraksi-Fraksi dengan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini. Sebelum rapat ini ditutup, terlebih dahulu kami

Dipindai dengan CamScanner

menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan " Alhamdulillahirabilalamin" rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima Kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wss.wr.wb

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/para Asisten/Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, dan para Wartawan, serta hadirin yang berbahagia.

Hadirin yang kami muliakan,

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Seizin Pimpinan Rapat Paripurna kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur - sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Dipindai dengan CamScanner

Hadirin yang kami muliakan,

Hari Rabu kemarin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya, dan sesuai dengan agenda hari ini semua fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini sangat penting untuk dibahas karena berbagai persoalan yang ada dalam perjalanan APBD Awal Tahun Anggaran 2024 sehingga perlu di lakukan perubahan, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ketika pembahasan KUPA-PPAS Tahun 2024 (sebagai landasan) yang lalu telah memberikan beberapa catatan-catatan sebagai bahagian dari pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024 ini agar Perubahan APBD Tahun 2024 ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024, selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan menyapaikan pandangan umumnya sebagai berikut:

1. Di dalam Nota Pengantar tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini Bidang Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 6.877.451.649.287 meningkat 4,42 % dari APBD Awal yaitu Rp. 6.586.576.217.900.- dengan segala usaha diantaranya menaikan pendapatan dari sector Pajak Daerah sebesar 8.48%, Retribusi sebesar 3.76%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,29%, sekaitan dengan hal ini Fraksi kami ingin menyampaikan pertanyaan hal apa yang membuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatea Barat begitu optimisnya sector pendapatan ini dapat dinaikan dalam kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah ini, mohon penjelasan.

2. Terhadap laporan semester pada kondisi Pendapatan Daerah yang baru tercapai sekitar 43,25% sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan dinaikan 4,42 %, menurut hemat Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ini cukup mengkhawatirkan, mohon penjelasan apa yang menjadi kendala yang seharusnya pada Semester 1 sudah melebihi tercapai 50%, mengingat ketergantungan pembangunan daerah yang sangat besar pada PAD.

3. Pada tahun 2023 Fraksi PDI Perjuangan dan PKB pernah menyampaikan hal ini yaitu: *Kita ketahui didalam Akuntansi Pemerintahan bahwa Pendapatan dengan Belanja harus selalu berimbang* namun pada tahun ini terjadi kembali apa yang kami sampaikan tahun lalu bahwa telah terjadi ketidak seimbangan antar Pendapatan Daerah sebesar Rp 6.877.451.649.287 sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,- sehingga pada tahun ini terjadi defisit sebesar Rp.160.447.544.425, pertanyaam Fraksi kami kenapa hal ini terjadi kembali? Apakah karena tidak optimalnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan APBD Tahun Anggaran 2024? Atau karena lalainya OPD-OPD yang diberikan tugas untuk mengamankan APBD Tahun Anggaran 2024?, mohon menjelasan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Tentang Belanja Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 6.818.020.392.949, menjadi Rp 7.037.899.193.712, naik sebesar Rp 219.878.800.763 yang menurut Fraksi kami tidak terlalu signifikan, namun Fraksi kami dalam hal Belanja Daerah memberikan catatan penting tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 ini baru terserap sebesar Rp 2.651.718.812.873,60 (KUPA-PPAS Tahun 2024) artinya masih jauh dibawah 50%. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan apa yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja daerah ini? Bukankah hal tersebut akan berdampak kepada layanan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakatnya? Bagaimana langkah kongkrit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait agar serapan belanja daerah bisa maksimal sehingganya pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan target-target yang ada, mohon penjelasannya.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan para hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan pertanyaan yang kami sampaikan di atas, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB siap untuk membahas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini lebih mendalam lagi untuk dilanjutkan pembahasannya.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atas segala perhatian Rapat Dewan yang terhormat, kami ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 01 Agustus 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, SE	**Firdaus, S.H.I**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL.KHATIB SULAIMAN NO.87 (0751) 7057591-7057592-7057593 FAX (0751)59238
PADANG

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

DISAMPAIKAN OLEH :
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

- Yang kami hormati saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang kami hormati, Forkopinda Provinsi Sumatera Barat
- Yang kami hormati Saudara Sekda beserta jajaran
- Para tamu undangan, rekan-rekan media pers serta segenap hadirin yang berbahagia

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita, sehingga saat ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan melaksanakan sidang paripurna ini dalam keadaan beriman, sehat jasmani dan rohani.

Shalawat dan salam kita doakan, semoga selalu tercurah kepada Sang Nabi agung, Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 ini.

Saudara Gubernur, Hadirin sidang dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, Fraksi PAN menyampaikan terimakasih kepada Yth. Sdr. Gubernur dan segenap Jajaran Eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini. Penyusunan Rancangan Perubuhan APBD Tahun 2024 ini tentunya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan rencana pembangunan Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam RPJMD dan untuk jangka pendeknya akan menjadi anggaran yang beradaptasi secara efektif dengan kebutuhan saat temporer. Karena itu, DPRD melalui komisi-komisi perlu untuk melalukan pembahasan secara cermat dan kritis agar penganggaran dalam Rancangan Perubuhan APBD Tahun 2024 ini berkorelasi positif terhadap pencapaian-capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang lebih berkualitas. Pada momen yang istimewa ini.

Sidang dewan yang berbahagia...

Tahun 2024 sebenarnya adalah tahun ke 4 dalam merealisasikan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi-misi kepala daerah yang baru. Di samping itu, karena hal yang kita proses saat ini

Dipindai dengan CamScanner

adalah Rancangan Perubuhan APBD Tahun 2024 dari APBD awal yang sudah direncanakan dan disepakati, pada kesempatan ini, kami ingin mendapat penjelasan tentang pencapaian terhadap indikator-indikator kinerja anggaran.

Lebih spesifik kami minta penjelasan lagi tentang target kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 terhadap inflasi yang cukup tinggi , menjadi urutan ke 2 di Indonesia. Hal ini menjadi penting bagi kami Fraksi PAN, karena pertanian merupakan sektor yang paling besar menampung kehidupan masyarakat yang oleh karena sektor ini tentunya mesti menjadi perhatian utama.

Rapat Dewan Yang Terormat,

Fraksi PAN kembali menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan. Kami minta penjelasan, untuk Perubahan anggaran tahun 2024, seperti apa hal ini diwujudkan, terutama dalam hal isu-isu strategis, seperti IPM, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan wilayah, lingkungan hidup, infrastruktur dan ketahanan pangan. Seperti apa hal ini dikelola secara afektif dan afisien dalam pencapaian

Dipindai dengan CamScanner

target-targetnya dan melibatkan semua SKPD terkait secara terpadu? Mohon penjelasan.

Rapat Dewan Yang Terormat,

Pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp.6.877.000.000.000.-** yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan/ transfer serta lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu hal yang harus dicermati secara seksama adalah masalah kenaikan atau penurunan proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 yang sangat kisarannya tidaklah jauh kecil. Begitu juga jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah (PAD), hanya berkisar pada persentase yang tidak jauh berbeda dari waktu kewaktu. Oleh karena itu, atas kondisi ini, Fraksi PAN merekomendasikan pada saat pembahasan di komisi-komisi, khususnya komisi yang membidangi keuangan,perlu ada pencermatan dan pengkritikan, sehingga ditemukan informasi akurat tentang potensi dan proyeksi pendapatan.

Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Kami juga meminta penjelasan strategi pemerintah daerah dalam meraup pendapatan pada Rumah Sakit yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sumatera barat yang hingga kini masih terkendala di banyak hal, baik administrasi maupun fasilitas. Bagaimana solusi cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, kami juga meminta penjelasan tentang pendapatan jasa usaha dinas lingkungan hidup dalam hal pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Perubahan apbd tidak dapat di lepaskan dari paling kurang lima keadaan yaitu, pertama perubahan asumsi makro, yang antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi, asumsi penggangguran terbuka dan lain sebagainya, yang kedua kekurangan silva yang di jadikan penerimaan pembiayaan Tahun 2023 hasil audit BPK RI tahun 2023 nomor 47.b/lhp/xviii.pdg/05/2024 tanggal 17 mei 2024 yang semulanya di proyeksi silva tahun 2023. Rp 251.444.175.049, ternyata realisasinya Rp. 180.447.544.425 kekurangan Rp. 70.996.630.623, ketiga terjadinya bencana alam yang membutuhkan tindakan segera, merusak fasilitas umum, jalan, jembatan dan sarana publik lainnya, seperti erupsi gunung merapi, longsor, banjir bandang dan lainnya, ke empat perubahan peraturan dan perundang-undangan pusat yang memerlukan pergeseran anggaran pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, termasuk perubahan pergub atau perda yang harus terakomodasi dalam KUA PPAS perubahan APBD 2024, seperti misalnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 999.1.15.5/20741/keuda tentang hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dana alokasi khusus tahun 2024 dan ke lima kewajiban kembali menganggarkan sisa dana baik fisik atau non fisik serta sisa keuangan khusus bkk kabupaten kota sesumatera barat kemudian ada juga alasan perubahan lainnya seperti penurunan belanja pegawai pada tahun 2024 dengan pemberlakukan PP nomor 2024, dan perlunya alokasi anggaran kurang salur dana bagi hasil pajak Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Apapun alasannya, bagi fraksi asal konstitusional dan memiliki landasan empiris, yuridis dan pembangunan provinsi sumatera barat tidak elok untuk di rintangi, apalagi mendesak seperti akomodasi perbaikan sarana dan prasarana karena bencana alam atau penyesuaian regulasi yang mengalami pergeseran atau perubahan seperti perubahan pp, perubahan peraturan kementerian atau perubahan perda atau pergub. Hanya saja yang perlu di perjelas dokumentasi pengajuan perubahan yang autentik, valid dan faktual yang perlu di hadirkan dalam pembahasan serta menjaga antara keseimbangan pendapatan pembelanjaan dan pembiayaan yang perlu di kupas dalam penetapannya ini.

Sesuai ajuan saudara gubernur pada paripurna kemaren, rabu 31 juli 2024, di pahami postur perubahan p apbd 2024 di antaranya dari total apbd 6,837 t menjadi 7,057 T dengan kenaikan 220,01 T dengan defisit 160,447 milyar yang merupakan sisa lebih belanja daerah dengan pendapatan daerah 2024 ini yang di tutupi dengan pembiayaan netto sisa lebih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang menjadi silpa tahun APBD 2023.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebelum pembahasan terhadap ranperda p apbd ini farksi bermaksud memohon penjelasan kepada saudara gubernur terkait defisit pembelanjaan daerah yang terjadi, apa solusi lain selain menutupinya dengan pembiayaan netto, bagaimana dengan waktu yang berlebih ini pendapatan daerah dapat di wujudkan, bagaimana kegiatan belanja yang tak terakomodasi pada apbd

Dipindai dengan CamScanner

awal dapat di biayai dan penerimaan pembiayaan dapat di tingkatkan untuk menjadi silpa di apbd berikut ini dalam memenuhi APBD yang berimbang tahun anggaran 2025. Mohon penjelasannya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebagai fraksi juga perlu penjelasan saudara gubernur sebelum di lanjutkan pada tingkat pembahasan antara lain, sejauh mana perubahan terjadi dalam keadaan makro daerah, seperti angka pengganggguran terbuka dan solusinya apa yang bisa di lakukan dalam waktu kasib ini, indikator pertumbuhan ekonomi merangkak naik apa bukti yang bisa di perlihatkan dan inflansi yang tak terkandali bagaimana mengatasinya. Selanjutnya silpa yang di harapkan semula ternyata berkurang apa dasar dan logikanya sehingga itu terjadi sehingga terjadi kekurangan penerimaan, terjadinya bencana alam yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dari mana solusinya dan sejauhmana perkembangannya termasuk penjelasan perbaikan jalan antara Kab Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang serta bagaimana santunan untuk korban yang terkena bencana dari alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dengan perubahan regulasi dan peraturan yang lebih tinggi serta Perda dan Pergub, bagimana penjelasan nya terkait dengan regulasi dan perda yang tidak dapat di realisasikan, bagaimana semestinya dengan Perda dan Pergub lainnya yang tidak dapat terpisahkan dari dasar yuridis APBD itu sendiri. Kemudian bagaimana penjelasan saudara gubernur terkait dengan penurunan belanja pegawai realisasi aktual dalam rangka mewujudkan PP No. 14 tahun 2024, mohon penjelasannya.....

Dipindai dengan CamScanner

Rapat dewan yang berbahagia....

Demikianlah ***Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Nota Penjelasan Gubernur Atas Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024***. Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Rahmat, Barokah dan Ridhonya dalam setiap langkah perjuangan kita untuk membangun Sumatera Barat lebih baik.

WallahulMuwafiqilaaAqwaamithThoriq

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Padang, 01 AGUSTUS 2024
FRAKSI PAN DPRD SUMATERA BARAT

MAHAYATUL, SE, MSi.	**H. DASWANTO, SE**
KETUA	**SEKRETARIS**

H. INDRA DT RAJO LELO, SH., MM	**: PENASEHAT FRAKSI**
MUHAYATUL, SE,M.Si	**: KETUA FRAKSI**
H. MAIGUS NASIR, S.Pd	**: WAKIL KETUA FRAKSI**
H. DASWANTO, SE	**: SEKRETARIS FRAKSI**
H. DODY DELVY, SE	**: BENDAHARA FRAKSI**
H. MUZLI M.NUR, S.PD	**: ANGGOTA FRAKSI**
H. BUKHARI DT TUO, SE	**: ANGGOTA FRAKSI**
H. AHMAD RIUS, SH	**: ANGGOTA FRAKSI**
Hj. ARTATI, SH,MH	**: ANGGOTA FRAKSI**
MUHAMMAD IKHBAL, SE	**: ANGGOTA FRAKSI**

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dalam

Rangka Penyampaian

Pandangan Umum Fraksi :

Kamis, 1 Agustus 2024

Dipindai dengan CamScanner

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth.Sdr. Gubernur, Atau yang mewakili

Yth.Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas , Kantor Dilingkup Provinsi Sumatera Barat

Yth.Sdr. Ketua-Ketua Fraksi, Rekan-Rekan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Hadirin Yang Berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda: **APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Sholawat & salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas kerja kerasnya umat manusia telah dapat keluar dari lembah jahiliyah kepada kehidupan yang ber-adab.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami dari **Fraksi Partai Demokrat**, menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada Gubernur Prov Sumatera Barat dan Tim yang telah Menyusun ranperda ini, Hasilnya sudah sama-sama kita dengar Pembacaan Nota Pengantar dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Demokrat**, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024, sebelum diambil keputusan di tingkat Paripurna nanti.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan subtansi yang telah termuat dalam Laporan yang telah dibacakan tadi, kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menelaah terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan juga ada tambahan sesuai yang ada dalam Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** untuk dijadikan pedoman serta catatan untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan Pandangan Umum, catatan dan saran dalam Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** Sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, yaitu pemerintahan harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal, semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani perekonomian masyarakat, Pemerintahan Provinsi Sumbar harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha Masyarakat secara maksimal, apabila pendapatan Masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga akan meningkat melalui pajak dan retribusi daerah. Perubahan yang terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dangan perkembangan perekonomian dan ketentuan perundang- undangan serta perubahan pada pendapatan transfer. Fraksi Demokrat berharap bahwa Lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

2. Langkah dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Provinsi Sumbar harus di imbangi dengan kinerja yang maksimal, maka dari itu pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan. Tentunya kita juga meminta Pemprov untuk menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, yang mana kemiskinan merupakan suatu kondisi Dimana merupakan salah satu acuan kemajuan suatu daerah.

3. Dalam upaya mengoptimalisasikan pajak dan retribusi daerah, Pemprov perlu melakukan pemetaan dan basis data, sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini, mohon penjelasan.

4. Perlu diketahui bahawa pendapatan asli daerah (PAD) Pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024 direncanakan bertambah sebesar 3,394 triliun rupiah naik sebesar 8,84% atau sebesar 275,778 milir rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah. Dalam kenaikan PAD ini masih bertumpu pada pendapatan pajak dan retribusi daerah. Tentunya Pemprov harus bisa menggali potensi lainya dalam meningkatkan PAD.

5. Melihat sumber pendapatan daerah pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 2,250 miliar rupiah sehingga menjadi 3,453 triliun rupiah, kami memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintahan pusat sangat besar, hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut di imbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dipindai dengan CamScanner

6. Belanja daerah sebagai komponen ke uangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan penambahan APBD tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektivitas anggaran, dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, Fraksi Demokrat Mengharapkan Pemprov Sumbar perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada Stakeholder dan Masyarakat, hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak dan dapat berakibat pada kesalahan dalam laporan ke uangan dan lonjakan Silpa, apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana.

7. Kami meminta aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat agar netral saat momen pemilihan kepala daerah Pada november 2024, untuk antisipasi hal tersebut, Langkah apa yang dilaksanakn Eksekutif untuk menjaga netralitasnya.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran dari Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** terhadap :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dengan mengucapkan ***"Bismillahirahmanirahim"*** Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 tersebut dapat untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Dipindai dengan CamScanner

Padang, 1, Agustus 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,	Sekretaris,
ALI TANJUNG	**Hj. A I D A, SH**

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PPP – NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pandangan Umum
Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat Kamis, 01 Agustus 2024

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombusdman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan Hadirin yang Berbahagia.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PPP-NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PPP-NasDem mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada hari Rabu, 31 Juli 2024.

Setelah mencermati dan melakukan analisa terhadap nota pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, Fraksi PPP-NasDem memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan Raperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBD Tahun 2024 selama tahun berjalanan, masih mengalami ketidakpastian. Perkembangan makro ekonomi daerah, pendapatan dan belanja daerah, mengalami perubahan yang sejalan dengan ketidakpastian tersebut. Kami berprasangka baik, bahwa penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024 ini betul-betul mengacu kepada KUA-PPAS Perubahan tahun 2024 yang kita sepakati bersama sebagai dokumen perencanaan yang melandasi pengajuan RAPBD Perubahan tersebut oleh Saudara Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kami juga berprasangka baik bahwa dalam menyusun program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2024 ini, Saudara Gubernur tetap bertumpu kepada program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD,
2. Fraksi PPP-NasDem sepakat dan mendorong terhadap upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan optimalisasi penerimaan daerah melalui beberapa rencana sebgai berikut :
   a) Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah, kira-kira dengan sisa waktu yang ada. apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memaksimalkan upaya ini. Berdasarkan informasi di lapangan banyak wajib pajak yang menunda bahkan tidak membayar pajak, misalnya pajak kendaraa bermotor, dan lain-lain.
   b) Pemanfaatan aset-aset yang ideal. Kira-kira potensi yang mana dan apa saja dari aset ideal ini yang bisa dimanfaatkan dalam usaha peningkatan pendapatan daerah dalam waktu dekat.
   c) Dalam sisa waktu kurang dari 4 bulan bagaimana mendayagunakan OPD pengelola BLUD dan UPTD-UPTD lainnya dalam rangka akselerasi untuk berkontribusi mengoptimalkan penerimaan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

d) Fraksi PPP-NasDem sangat menyayangkan terjadinya difisit yang begitu besar pada Perubahan APBD Tahun 2024, hal ini harus menjadi catatan penting bagi TAPD dan OPD bahwa dalam penyusunan dan perencanaan anggaran harus benar-benar terukur dan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi lagi divisit anggaran seperti saat sekarang ini, pemerintah daerah harus menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran agar hal ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Untuk mengatasi masalah ini apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

3. Kembali kami sampaikan saat ini Masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat sangat membutuhkan Pembangunan penguatan tebing Batang Ampu yang berada di Kabupaten Pasaman Barat dan Penguatan Tebing Batang Landir Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman hal ini dikarnakan sering terjadinya banjir didaerah tersebut dan sudah mengakibatkan terkikisnya tebing-tebing yang ada di sekitar lokasi sungai dan mengakibatkan banyak rumah masyarakat sekitar yang hampir runtuh, untuk itu Fraksi PPP-NasDem meminta keseriusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya kepada dinas terkait (PSDA) untuk mengatasi hal ini sesegera mungkin karna ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mohon tanggapan saudara Gubernur.
4. Fraksi PPP-NasDem berharap agar semua proyek yang didanai dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) benar-benar dioptimalkan pengerjaan dan tetap memperhatikan kualitas bangunannya. Hal ini menjadi penting kami ingatkan karena saat ini kita sudah berada di bulan Agustus 2024, yang artinya hanya dalam waktu 5 bulan ke depan, Tahun Anggaran 2024 akan berakhir. Terkait hal ini mohon tanggapan saudara Gubernur?
5. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan dan sudah anggarkan

Dipindai dengan CamScanner

pada APBD Murni Tahun 2024 yang lalu, karna kami melihat masih banyak kegiatan pada OPD-OPD tertentu yang kegiatan nya masih banyak yang belum dilaksanakan, bahkan masih ada yang belum selesai perencanaannya, terkait hal ini mohon tanggapannya.

6. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah pada APBD Perubahan agar tidak menganggarkan kegiatan fisik dan belanja modal yang sifatnya ditenderkan mengingat waktu yang sangat singkat, mohon tangapanya.
7. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar memerintahkan ketua TAPD untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah dan menyisir/menunda kegiatan-kegiatan OPD yang tidak urgen khususnya pada belanja barang dan jasa, mohon tanggapannya.
8. Sebagaimana kita tahu, dunia pendidikan sangat penting artinya bagi semua orang, yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Khusus di Dinas Pendidikan, Fraksi PPP-NasDem meminta alokasi anggaran diarahkan untuk menambah sarana prasarana yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan hanya memperbanyak pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang kurang bermanfaat dan tidak berpengaruh langsung terhadap naiknya kualitas pendidikan. Mohon penjelasan saudara gubernur.
9. Ada pun pada belanja tak terduga, Fraksi PPP-NasDem setuju agar mengalokasikan anggaran yang seminimalnya sesuai dengan petunjuk dari Kemendagri. Sehingga nanti dalam pelaksanaan APBD Perubahan yang waktunya sangat singkat akan lebih lancar.
10. Terkait distribusi dan alokasi anggaran yang diajukan pada Perubahan APBD tahun 2024, Fraksi PPP-NasDem perpandangan masih banyak

Dipindai dengan CamScanner

alokasi anggaran yang belum berpihak kepada peningkatan pelayanan publik dan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Kami sangat berharap alokasi dan distribusi anggaran baik pada Perubahan 2024 mapun pada RAPBD tahun 2025 lebih diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, karena intervensi Pemerintah Daerah dalam bentuk alokasi anggaran tak bisa diabaikan.

11. Mohon penjelasan rinci Saudara Gubernur, terkait standarisasi dan efektivitas dari Program Unggulan (Progul) yang sudah sering disampaikan kepada public sebagai program Gubernur-Wakil Gubernur. Fraksi Partai Gerindra tentu saja sangat berharap, Progul yang sudah disusun dapat terlaksana dengan baik, sehingga keberadaan program tersebut bisa dirasakan masyarakat banyak.

Selanjutnya Ada beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan masalah yang terjadi di Masyarakat saat ini dan hal ini perlu dicarikan solusi secepatnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Juni 2024 lalu, sebagai lanjutan dari informasi dan harapan masyarakat sebelumnya, maka untuk ketiga kalinya kembali kami sampaikan, menyangkaut persoalan pukat harimau atau hamparan dasar, yang masih beroperasi di seputar Pasir Ganting nagari Pulau Rajo Kecamatan Air Pura, Air Haji dan Muaro Kandih Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pukat Harimau ini dimiliki orang-orang bagak yang punya hubungan khusus dengan petugas. Sehingga mereka ini bersilantas angan saja di kawasan ini. Sudah banyak jaring, alat penangkap ikan lainnya yang putus, porak poranda ditarik dan dicabik oleh pukat harimau ini. Pernah ditertibkan, tapi malangnya sampai hari ini mereka tetap beroperasi dan memperlihatkan kebagakkannya. Untuk Gubernur katahui dan catat, bahwa hari ini, masyarakat sekitar kawasan yang kami sebutkan

Dipindai dengan CamScanner

tadi tidak lagi mendapatkan ikan di tempat mereka, sehingga harus melaut sampai ke Painan dan bahkan lebih jauh dari itu, demi mendapatkan sesuap nasi dan kebutuhan anak sekolah. Sehingga makin lama meninggalkan anak dan istri. Terhadap kondisi ini, Gubernur sudah menjawab dan kami memahaminya. Tapi sebagai juru bicara Masyarakat di forum ini, kami berharap Gubernur tidak boleh kalah oleh oknum yang membagak itu. Jangan sampai masyarakat yang lemah tidak mendapat perlindungan yang memadai dari pimpinannya. Rasanya juga tidak logis, kalau Gubernur bisa dikecoh dan dikalahkan oleh oknum seperti itu.

2. Di Tua Pejat Mentawai, sampai sekitar tanggal 31 Juli 2024 lalu, belum memiliki AMBULANCE LAUT, yang mampu melayani dan menangani masyarakat yang sakit atau kematian. Baik antar pulau dalam daerah Mentawai maupun antara Mentawai dengan Ibu Kota Provinsi Sumbar Kota Padang. Masyarakat harus menyewa antara 15 sampai 20 Juta rupiah untuk ini. Masyarakat belum atau tidak mampu untuk membayar yang semahal itu. Apakah ini harus disediakan oleh Bupati dengan APBDnya atau oleh Gubernur dengan APBD provinsinya, mohon penjelasannya.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 01 Agustus 2024

H. Daswippetra, DT. Manjinjiang Alam
Juru Bicara

Fraksi PPP-NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Sawal, SH	**Irwan Afriadi**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah
Yth: Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor,Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat Allah SWT, serta memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal Pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila tejadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pada hari Rabu 31 Juli 2024 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota pengantar atas perubahan APBD 2024. Terlebih dahulu pada tanggal 27 Juli 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani nota kesepakatan bersama atas KUPA-PPAS tahun 2024.

Pada perubahan APBD 2024 bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 290.875.431.387 atau meningkat sebesar 4,42% seingga perubahan pendapatan APBD 2024 sebesar Rp 6,877 T, disisi lain terdapat juga proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar Rp. 219,878 Miliar, sehingga menyebabkan defisit APBD sebanyak 160,447 Miliar.

Fraksi PKS berterimakasih kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan 3,5 tahun ini, tentu ini tidak mudah, terus ada perbaikan-perbaikan dalam tata pemerintahan Sumatera Barat, ini adalah usaha dalam mewujudkan visi pemerintah daerah untukTerwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Dipindai dengan CamScanner

Setelah membaca dan mendiskusikan Nota Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, dan setelah kami menelaah beberapa hal yang melatarbelakangi pengajuan Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2024 ini, Fraksi PKS mempunyai beberapa pandangan yang akan disampaikan diantaranya :

1. Ditinjau dari kondisi umum pendapatan daerah pada semester 1 ini terlihat cukup signifikan progres capaian pendapatan daerah, baik dari PAD yang baru terealisasi sebesar 43,25%, pendapatan transfer, 48,48% untuk Pendapatan lain-lain daerah yang sah 2,95%. perlu Langkah pemprov dalam memenuhi target realisasi pendapatan di semester II ini.
2. Fraksi PKS mendorong agar program-program yang menjadi urusan pelayanan dasar, non pelayanan dasar agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, terutama fokus kepada renovasi fasilitas umum yang terdampak bencana walaupun semenjak 11 Mei 2024 kemacetan di jalan Padang lua , Malalak, Sicicin, dan Solok – Padang, Alhamdulillah jalan padang-bukittinggi via lembah anai sudah dapat dilalui mulai tanggal 21 Juli 2024 Pemprov yang cepat tanggap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten kota.
3. Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai realisasi 97%. Tentu hal ini jauh dapat ditingkatkan mengingat bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah laba dari penyertaan modal kepada BUMD-BUMD yang dimiliki pemprov. Fraksi PKS mendorong dapat peningkatan kinerja BUMD dalam menambah deviden dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Melihat beban belanja yang di usulkan gubernur dalam rancnangan Perubahan APBD 2024, FPKS melihat terlalu berat untuk bisa dilksanakan, mulai SILPA kurang sebesar Rp. 70.9 M, kegiatan yang

Dipindai dengan CamScanner

melampaui waktu pelksanaan APBD 2023 yang dibayar di Perubahan 2023, kegiatan yang sudah serah terima (BAST) namun belum dibayar, hutang kepada kab kota berupa bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang harus ditunaikan. Maka dari itu FPKS mendorong kepada TAPD unutk benar benar selektif lagi menambah kegiatan di saat beban kewajiban sangat berat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari Nota Rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2024. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu kami dalam proses pembahasan selanjutnya, harapan kami bisa berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

Padang, 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat

Juru Bicara

(Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt)

Ketua	**Sekretaris**
Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt.	**Muhamad Ridwan, S.IP**

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Kamis, 01 Agustus 2024

Juru Bicara :

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang terhormat
Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Alhamdulilahirabbil a'lamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua, pada rapat hari ini, dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Pengantar APBD Perubahan Tahun 2024.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

yang disampaikan Saudara Gubernur kemarin, sebagai salah satu kewajiban konstitusi penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia

Berangkat dari Nota Pengantar dan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2024 yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan beberapa tanggapan dan pertanyaan atas beberapa hal :

1. Kalau dicermati apa yang telah disampaikan dalam Nota Pengantar dan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2024, menunjukkan pada semua bahwa, kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah kita saat ini masih dalam kondisi tidak bagus. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat defisit yang cukup besar dimana tahun ini tercatat Rp 160,447 Miliar. **Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait hal ini dan apa langkah yang akan dilakukan?**

2. Secara umum, proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,42 persen dari APBD awal sebesar RP 6,586 Triliun menjadi Rp 6,877 Triliun. Bagi Fraksi Gerindra, angka ini MASIH KALAH JAUH dan belum sesuai target yang telah dituangkan dalam RPJMD, dimana angkanya pada tahun 2024 dituliskan diatas Rp 7 Triliun rupiah. Kami melihat banyak hal yang belum sesuai dengan terget-target penerimaan daerah. **Mohon penjelasan Saudara Gubernur.**

3. Salah satu tumpuan dan sumber pendapatan daerah kita adalah dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Fraksi Partai Gerindra berharap ada langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak. Kami berpandangan bahwa para Wajib Pajak adalah pahlawan sesungguhnya dalam menggerakkan ekonomi daerah. Karena, dengan kesadaran mereka membayar setiap pajak, maka pembangunan daerah bisa bergerak. Dengan demikian, maka sudah seharusnya para wajib pajak ini mendapat pelayanan yang baik. Jangan sampai, mereka malah dibuat stress dengan layanan yang berbelit-belit saat hendak menunaikan kewajiban. **Mohon tanggapan Saudara Gubernur terkait hal ini dan langkah apa yang dilakukan..**

Dipindai dengan CamScanner

4. **Mohon penjelasan,** sejauh mana pemanfaatan teknologi di lingkungan Pemprov Sumatera Barat terkait layanan bagi wajib pajak, karena dulu ada wacana penggunaan aplikasi khusus, sehingga warga yang ingin menunaikan kewaiban tidak perlu harus datang dari jauh atau antre berlama-lama.

5. Kami juga mendapat informasi bahwa terdapat perbedaan data jumlah kendaraan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Bapenda Provinsi Sumbar, BPS Provinsi Sumbar dan Dirlantas Polda Sumbar. Perbedaan data ini perlu didudukkan kembali untuk dapat melihat berapa potensi yang sebenarnya dari objek PKB. **Mohon penjelasan dari Saudara Gubernur terkait hal ini.**

6. Sejak lama, Fraksi Partai Gerindra menyuarakan pentingnya pemanfaatan asset-asset idle sebagai salah satu sumber pendapatan. Mohon penjelasan lengkap terkait dengan capaian pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan asset idle ini, baik dari sisi asset untuk disewakan ataupun untuk retribusi. Dalam RPJMD disebutkan bahwa tahun 2024 ini, proyeksi peningkatan PAD dari asset idle ini adalah Rp 5,4 Miliar dari asset yang memiliki potensi untuk disewakan/KSP, dan Rp 1,4 Miliar lebih dari retribusi. **Mohon dijelaskan apakah ini tercapai atau tidak, dan secara detail kami minta disampaikan proyeksi berikut capaian-capaiannya.**

7. Beberapa waktu lalu kami mendengar Saudara Gubernur menyatakan bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan Pemprov untuk menutup defisit keuangan daerah adalah dengan melakukan pengelolaan asset dengan baik. Fraksi Partai Gerindra menyambut baik rencana tersebut. **Namun kami ingin penjelasan lengkap, bagaimana strategi dan tindak lanjut dari rencana tersebut,** karena seperti kasus Balairung, Grafika dll, hingga kini belum ada penuntasan sampai saat ini. **Mohon penjelasan** terkait ini, termasuk soal pengelolaan **Hotel Novotel** yang iklannya kami lihat sedang dilelang.

8. Belanja modal pada perubahan APBD direncanakan sebesar Rp 863,4 Miliar, atau disebut mengalami kenaikan sebesar 10,31 persen dari anggaran pada APBD awal yang tercatat sebesar Rp 782,78 Miliar. Meskipun naik disbanding APBD awal, Fraksi Partai Gerindra mencatat angka ini masih jauh lebih rendah dari proyeksi di RPJMD, dimana tahun 2024 ini seharusnya sudah di angka Rp 1, 029 Triliun. Fraksi Gerindra meminta Pemrov melalui TAPD taat dan disiplin menjadikan besaran belanja modal sesuai dengan target RPJMD, karena dari pos iniah sumber pembangunan sarana dan prasarana publik bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

9. **Mohon penjelasan lengkap dan rinci** dari Saudara Gubernur, sejauhmana dampak alokasi anggaran 10 persen untuk meningkatkan pendapatan petani yang dilakukan

Dipindai dengan CamScanner

sejak 2021 hingga 2024 ini, dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah.

10. Berkaitan dengan persoalan pertanian juga, Fraksi Partai Gerincdra berharap agar pejabat terkait bisa menterjemahkan RPJMD dengan baik dan punya inovasi dalam meningkatkan nilai tambah petani. Banyak kegiatan yang selama ini dijemput kawan-kawan di DPRD langsung ke lapangan tidak terlaksana. **Mohon ini menjadi catatan serius,** karena pertanian adalah salah satu program unggulan.

11. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan, merupakan salah satu misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun di lapangan, kami masih melihat dan mendapat laporan terkait infrastruktur yang belum memadai, termasuk misalnya di Talamau Pasaman, dimana banyak titik memprihatinkan sepanjang jalan yang dilintasi. Begitu juga halnya dengan aliran sungai Batang Sumpu yang memperlukan penanganan segera untuk normalisasi, agar persawahan di sepanjang aliran sungai itu tidak lagi dilanda banjir sebagaimana yang terjadi setiap tahunnya.

12. **Kami kembali harus mempertanyakan soal kelanjutan program SIMAMAK,** yang digagas pada intinya untuk melepaskan warga dan pelaku usaha super mikro terjerat hutang seperti Pinjol dan Rentenir. Melepaskan masyarakatnya dari jeratan hutang-hutang rentenir, seharusnya menjadi prioritas kepala daerah. Namun sampai hari ini, Fraksi Partai Gerindra belum mendengar dan melihat program tersebut direalisasikan. Pertanyaannya, atas **Dasar pertimbangan apakah, sehingga program SIMAMAK belum juga disetujui Gubernur dan direalisasikan dalam bentu Pergub. Fraksi Partai Gerindra berpikiran inilah penerapan konsep ekonomi syariah sesunggunya di Ranah ABS-SBK. Mohon jawaban dan tanggapan dari Saudara Gubernur terkait ini.**

13. Terakhir, Fraksi Partai Gerindra berharap agar Saudara Gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan realisasi anggaran.

Bapak Ibu Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan menjadi perhatian dalam proses pembahasan nantinya. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah.

Dipindai dengan CamScanner

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya III

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua	Sekretaris
H. HIDAYAT, S.S, M.H	NURKHALS DT.BIJO DIRAJO, S.Pt

Penasihat:

- **Supardi**

Anggota:

1. Desrio Putra
2. Evi Yandri Rajo Budiman
3. Ismunandi Syofyan, SE
4. Jasma Juni Dt.Gadang, SE
5. Jempol
6. Khairuddin Simanjuntak
7. Mario Syahjohan
8. Mesra
9. Mukhlis Yusuf Abit, ST,M.M
10. Drs.H.Syafruddin Putra Dt.Sungono, M.Si
11. Hj.Yunisra Syahiran, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
NOTA PENGANTAR GUBERNUR TENTANG
RANCANGAN APBD PERUBAHAN
PROPVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
KAMIS, 1 AGUSTUS 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Forkompimda Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur tentang Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur ,Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampakan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat yang terhormat ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pandangan Umumr Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Golkar setelah mendengarkan dan mencermati Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka pada kesempatan ini ada hal-hal yang perlu kami kritik, pertanyakan, sarankan, sebagai berikut :

1. Mencermati Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumaera Barat Tahun 2024 ,kami dari Fraksi Golkar agak sedikit prihatin karena Nota Pengantar Gubernur yang sekarang ini kualitasnya jauh menurun bila dibandingkan dengan Nota Pengantar Gubernur sebelum- sebelumnya. Pada Nota Pengantar Gubernur yang sekarang ini tidak ada dijelaskan kenapa terjadi kenaikan dan penurunan pendapatan maupun belanja. Terkesan Nota Penggantar Gubernur yang sekarang ini asal jadi atau untuk memenuhi persaratan tahapan dari pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 saja.
   Kedepannya kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar apa yang sudah baik untuk dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan lagi.
2. Tahun 2024 adalah merupakan tahun terakhir dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun kebelakang. Dan tahun 2025 adalah base line atau awal dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun mendatang (tahun 2025 -2045).

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Fraksi Partai Golkar medorong pihak Pemerintah Daerah agar pada APBD Perubahan tahun 2024 ini dapat hendaknya dijadikan sebagai pemacu pencapaian target indikator kinerja masing-masing OPD, sehinga target indikator kinerja yang dijadikan base line pada tahun 2025 betul-betul telah sesuai dengan capaian pada tahun 2024. Kalau seandainya capaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih dibawah base line , maka beban yang akan dipikul pada tahun 2025 akan semakin berat.

3. Terhadap OPD yang dibebankan untuk menambah target PAD pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 ini , selayaknya berbanding lurus dengan penambahan belanja, begitu sebaliknya bagi OPD yang dikurangi beban target PAD nya pada perubahan APBD tahun 2024 ini selayaknya juga dikurangi belanjanya. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk meninjau ulang kembali target pendapatan dan belanja pada masing-masing OPD.

4. Terhadap penambahan target PAD pada OPD terkait, kami dari Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada TAPD apa dasar perhitungannya, begitu juga untuk pengurangan target PAD.
   Seajalan dengan itu juga kami pertanyakan terhadap OPD yang mendapat alokasi tambahan belanja maupun alokasi untuk pengurangan belanja apa dasar analisanya. Sehingga dalam penetapan alokasi anggaran pendapatan dan belanja tidak terkesan pilih kasih.

5. Didalam menyusun Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 ini , kami dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana korelasi laporan keuangan Semester I tahun 2024 terhadap penyusunan APBD Perubahan tahun2024. Selayaknya bagi OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih sangat rendah pada laporan semester I tahun 2024, hendaknya ada kebijakan dari TAPD untuk melakukan re-alokasi anggaran anggran antar OPD, sehingga kekuatiran menjadi SILPA pada tahun 2024 akan semakin bisa diminimalisir.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Walhidayah
Assalamualaikum ww

Padang, 27 Juli 2024
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua **Sekretaris**

(Zulkenedi Said, S.Sos, S.H., .Si., M.M., M.H.,M.AP) **(Dr.H.Hardinalis Kobal, S.E.,M.M)**

Juru Bicara

(Dra. SITTI IZZATI AZIZ)

1. H.Afrizal, S.H., M.H (Wakil Ketua)
2. Zarfi Deson, S.H (Bendahara)
3. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M (Anggota)
4. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si (Anggota)
5. Dra. Hj. Siti Izzati Aziz (Anggota)
6. H. Lazuardi Erman, S.H (Anggota)

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dalam

Rangka Penyampaian

Pandangan Umum Fraksi :

Kamis, 1 Agustus 2024

Dipindai dengan CamScanner

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth.Sdr. Gubernur, Atau yang mewakili

Yth.Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas , Kantor Dilingkup Provinsi Sumatera Barat

Yth.Sdr. Ketua-Ketua Fraksi, Rekan-Rekan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Hadirin Yang Berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda: **APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Sholawat & salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas kerja kerasnya umat manusia telah dapat keluar dari lembah jahiliyah kepada kehidupan yang ber-adab.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami dari **Fraksi Partai Demokrat**, menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada Gubernur Prov Sumatera Barat dan Tim yang telah Menyusun ranperda ini, Hasilnya sudah sama-sama kita dengar Pembacaan Nota Pengantar dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Demokrat**, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024, sebelum diambil keputusan di tingkat Paripurna nanti.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan subtansi yang telah termuat dalam Laporan yang telah dibacakan tadi, kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menelaah terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan juga ada tambahan sesuai yang ada dalam Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** untuk dijadikan pedoman serta catatan untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan Pandangan Umum, catatan dan saran dalam Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** Sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, yaitu pemerintahan harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal, semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani perekonomian masyarakat, Pemerintahan Provinsi Sumbar harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha Masyarakat secara maksimal, apabila pendapatan Masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga akan meningkat melalui pajak dan retribusi daerah. Perubahan yang terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dangan perkembangan perekonomian dan ketentuan perundang- undangan serta perubahan pada pendapatan transfer. Fraksi Demokrat berharap bahwa Lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

2. Langkah dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Provinsi Sumbar harus di imbangi dengan kinerja yang maksimal, maka dari itu pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan. Tentunya kita juga meminta Pemprov untuk menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, yang mana kemiskinan merupakan suatu kondisi Dimana merupakan salah satu acuan kemajuan suatu daerah.

3. Dalam upaya mengoptimalisasikan pajak dan retribusi daerah, Pemprov perlu melakukan pemetaan dan basis data, sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini, mohon penjelasan.

4. Perlu diketahui bahawa pendapatan asli daerah (PAD) Pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024 direncanakan bertambah sebesar 3,394 triliun rupiah naik sebesar 8,84% atau sebesar 275,778 milir rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah. Dalam kenaikan PAD ini masih bertumpu pada pendapatan pajak dan retribusi daerah. Tentunya Pemprov harus bisa menggali potensi lainya dalam meningkatkan PAD.

5. Melihat sumber pendapatan daerah pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 2,250 miliar rupiah sehingga menjadi 3,453 triliun rupiah, kami memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintahan pusat sangat besar, hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut di imbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dipindai dengan CamScanner

6. Belanja daerah sebagai komponen ke uangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan penambahan APBD tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektivitas anggaran, dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, Fraksi Demokrat Mengharapkan Pemprov Sumbar perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada Stakeholder dan Masyarakat, hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak dan dapat berakibat pada kesalahan dalam laporan ke uangan dan lonjakan Silpa, apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana.

7. Kami meminta aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat agar netral saat momen pemilihan kepala daerah Pada november 2024, untuk antisipasi hal tersebut, Langkah apa yang dilaksanakn Eksekutif untuk menjaga netralitasnya.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran dari Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** terhadap :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dengan mengucapkan ***"Bismillahirahmanirahim"*** Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 tersebut dapat untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Dipindai dengan CamScanner

Padang, 1, Agustus 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,	Sekretaris,
ALI TANJUNG	**Hj. A I D A, SH**

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah
Yth: Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor,Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat Allah SWT, serta memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal Pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila tejadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pada hari Rabu 31 Juli 2024 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota pengantar atas perubahan APBD 2024. Terlebih dahulu pada tanggal 27 Juli 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani nota kesepakatan bersama atas KUPA-PPAS tahun 2024.

Pada perubahan APBD 2024 bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 290.875.431.387 atau meningkat sebesar 4,42% seingga perubahan pendapatan APBD 2024 sebesar Rp 6,877 T, disisi lain terdapat juga proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar Rp. 219,878 Miliar, sehingga menyebabkan defisit APBD sebanyak 160,447 Miliar.

Fraksi PKS berterimakasih kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan 3,5 tahun ini, tentu ini tidak mudah, terus ada perbaikan-perbaikan dalam tata pemerintahan Sumatera Barat, ini adalah usaha dalam mewujudkan visi pemerintah daerah untukTerwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Setelah membaca dan mendiskusikan Nota Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, dan setelah kami menelaah beberapa hal yang melatarbelakangi pengajuan Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2024 ini, Fraksi PKS mempunyai beberapa pandangan yang akan disampaikan diantaranya :

1. Ditinjau dari kondisi umum pendapatan daerah pada semester 1 ini terlihat cukup signifikan progres capaian pendapatan daerah, baik dari PAD yang baru terealisasi sebesar 43,25%, pendapatan transfer, 48,48% untuk Pendapatan lain-lain daerah yang sah 2,95%. perlu Langkah pemprov dalam memenuhi target realisasi pendapatan di semester II ini.
2. Fraksi PKS mendorong agar program-program yang menjadi urusan pelayanan dasar, non pelayanan dasar agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, terutama fokus kepada renovasi fasilitas umum yang terdampak bencana walaupun semenjak 11 Mei 2024 kemacetan di jalan Padang lua , Malalak, Sicicin, dan Solok – Padang, Alhamdulillah jalan padang-bukittinggi via lembah anai sudah dapat dilalui mulai tanggal 21 Juli 2024 Pemprov yang cepat tanggap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten kota.
3. Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai realisasi 97%. Tentu hal ini jauh dapat ditingkatkan mengingat bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah laba dari penyertaan modal kepada BUMD-BUMD yang dimiliki pemprov. Fraksi PKS mendorong dapat peningkatan kinerja BUMD dalam menambah deviden dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Melihat beban belanja yang di usulkan gubernur dalam rancnangan Perubahan APBD 2024, FPKS melihat terlalu berat untuk bisa dilksanakan, mulai SILPA kurang sebesar Rp. 70.9 M, kegiatan yang

Dipindai dengan CamScanner

melampaui waktu pelksanaan APBD 2023 yang dibayar di Perubahan 2023, kegiatan yang sudah serah terima (BAST) namun belum dibayar, hutang kepada kab kota berupa bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang harus ditunaikan. Maka dari itu FPKS mendorong kepada TAPD unutk benar benar selektif lagi menambah kegiatan di saat beban kewajiban sangat berat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari Nota Rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2024. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu kami dalam proses pembahasan selanjutnya, harapan kami bisa berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

Padang, 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat

Juru Bicara

(Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt)

Ketua **Sekretaris**

Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt. **Muhamad Ridwan, S.IP**

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2024
JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada siang hari ini, dengan acara " Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan

Umum Fraksi-Fraksi atas 3 Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ".

Salawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli `Ala Muhammad wa `Ala Ali Muhammad.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada hari ini, Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 dengan acara " Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. *Gubernur dan Hadirin yang kami hormati*;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, pada Rapat Paripurna DPRD kemaren, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, banyak tanggapan, saran dan masukan yang diberikan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, terutama terkait dengan target dan pengelolaan pendapatan daerah serta alokasi belanja yang ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Terkait dengan pengelolaan dan target pendapatan daerah, Fraksi-Fraksi menilai bahwa pendapatan daerah terutama dari pos PAD belum dikelola dengan maksimal. masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan, baik dari sektor PKB, BBNKB, restribusi dan *pemanfaatan* asset daerah.

Proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.5 triliun, masih jauh dari target yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu sebesar Rp. 7.1 triliun. Ini tentu berdampak pula terhadap penyediaan alokasi belanja yang akan digunakan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Memperhatikan masih banyaknya kebutuhan anggaran untuk menutup kekurangan dari alokasi belanja yang diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024, maka Fraksi-Fraksi mendorong Pemerintah Daerah dan OPD-OPD untuk mendalami kembali semua potensi penerimaan yang masih bisa ditingkatkan. Hal ini diperlukan, agar tidak terjadi rasionalisasi belanja besar-besaran dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.

Sedangkan terkait dengan belanja daerah dan memperhatikan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, Fraksi-Fraksi mendorong alokasi belanja dilakukan dengan sangat cermat, memperhatikan skala prioritas, kebutuhan mendesak, pembayaran hutang kepada pihak

Dipindai dengan CamScanner

ketiga serta capaian target kinerja yang masih jauh dari yang direncanakan.

Disamping itu, Fraksi-Fraksi juga mempertanyakan sudah sampai sejauhmana pelaksanaan dan dampak yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani program unggulan Pemerintah Daerah yaitu mengaokasikan anggaran sebesar 10 % untuk pertanian dari APBD Provinsi Sumatera Barat serta pelaksanaan program subsidi bunga bagi sektor UMKM yang anggarannya sudah 2 (dua) tahun tidak dapat direalisasikan.

Selain memberikan tanggapan dan pandangan terhadap sektor pendapatan dan belanja daerah, Fraksi-Fraksi juga mempertanyakan bagaimana keseriusan Pemerintah Daerah dalam pembenahan kinerja BUMD serta penyelesaian permasalahan pada BUMD tersebut, diantaranya permasalahan pasca likuidasi PT. Dinamika, permalahasan kinerja PT. Balairung dan PT. Dinamika.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda, terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawaban dan/atau tanggapannya oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal dimaksud, tentunya Sdr. Gubernur telah menyiapkan jawaban dan/atau tanggapannya atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Jawaban Gubernur Atas PU Fraksi

Atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Jawaban dan/atau tanggapannya

Dipindai dengan CamScanner

atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 20924.

Dari jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tadi, secara umum telah dapat menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan, pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi. Namun demikian, untuk lebih jelasnya akan kita dalami nanti dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang akan dilakukan oleh DPRD Bersama Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya jawaban dan/atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, maka proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, masuk pada tahap pembahasan pendahuluan oleh Komisi Bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Memperhatikan kondisi Perubahan APBD Tahun 2024 yang masih belum kredibel dan belum seimbangnya antara

pendapatan dan kebutuhan belanja, maka kami mengharapkan kepada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran untuk betul-betul melihat secara tajam, baik aspek pendapatan maupun belanja daerah.

Kita tentu tidak ingin karena keterbatasan anggaran, dilakukan refocusing besar-besaran terhadap rencana belanja termasuk kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD. Perubahan APBD Tahun 2024, merupakan instrument terakhir bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing Anggota. Oleh sebab itu, tentu kita harus maksimal dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024 nanti.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban dan/atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan "Alhamdulilahirabbilalamin" Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih.
Billahitaufiq walhidayah
Wss.Wr.Wb

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024

==========

ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUHUH.

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. PIMPINAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA BIRO DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG.

YTH. REKAN-REKAN PERS, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Dipindai dengan CamScanner

MENGAWALI PENYAMPAIAN NOTA JAWABAN INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA. SELANJUTNYA SHALAWAT DAN SALAM BAGI NABI BESAR JUNJUNGAN KITA MUHAMMAD SHALALLAHU 'ALAIHI WASSALAM.

MENGAWALI PIDATO INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2024 KEMARIN.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

SETELAH MEMBACA DAN MENYIMAK PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI DPRD, KAMI MELIHAT BAHWA KESELURUHAN MASUKAN, USULAN DAN

Dipindai dengan CamScanner

SARAN SERTA PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN BERTUJUAN UNTUK PENYEMPURNAAN ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH KITA SEPAKATI BERSAMA DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2024, YANG DILANDASI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

SELANJUTNYA SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN NOTA JAWABAN INI, TERLEBIH DAHULU KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN, APRESIASI DAN KRITIK YANG KONSTRUKTIF YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH 7 (TUJUH) FRAKSI DPRD. SEMOGA HAL INI LEBIH MEMACU KITA UNTUK TERUS MEMPERBAIKI DIRI DI MASA DEPAN. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PADA KESEMPATAN YANG TERBATAS INI IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRASI DPRD SEBAGAI BERIKUT.

Dipindai dengan CamScanner

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. MENGENAI KAPASITAS FISKAL, DIMANA TERDAPAT DEFISIT SEBESAR RP160,447 MILIAR. HAL INI DAPAT DIJELASKAN BAHWA DENGAN PENDAPATAN DAERAH SEBESAR RP6.877 TRILIUN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARI SILPA TAHUN 2023 SEBESAR RP180,477 MILIAR MAKA PENERIMAAN MENJADI SEBESAR RP7,057 TRILIUN, YANG DIALOKASIKAN PADA BELANJA DAERAH SEBESAR RP7,037 DAN SISANYA PADA PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK NAGARI SEBESAR RP20 MILIAR. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN APBD KITA TETAP BERADA DALAM KEADAAN BERIMBANG WALAUPUN DEFISIT SEBESAR RP160,447 TETAPI BISA DITUTUPI DENGAN PEMBIAYAAN NETTO.

   SESUAI DENGAN PMK 84 TAHUN 2023 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH, DIMANA KAPASITAS FISKAL SUMATERA BARAT BERKATEGORI RENDAH DENGAN MAKSIMAL

Dipindai dengan CamScanner

DEFISIT APBD SEBESAR 4,35% (EMPAT KOMA EMPAT LIMA PERSEN) DARI PERKIRAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YAKNI MAKSIMAL SEBESAR RP299,169 MILIAR;

2. TERHADAP PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 YANG MASIH RENDAH DARI TARGET RPJMD, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENETAPAN TARGET PAD INI, TELAH DIHITUNG SECARA CERMAT DAN SEKSAMA MENGGUNAKAN METODOGI YANG RASIONAL DAN TERUKUR. DALAM PROSES PENGHITUNGAN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMPEDOMANI DATA POTENSI SERTA MEMPERTIMBANGKAN PARAMETER LAIN YANG BERPENGARUH. TERJADINYA PERBEDAAN DENGAN PROYEKSI RPJMD TENTU TIDAK TERLEPAS DARI PERUBAHAN ASUMSI-ASUMSI YANG TERUS BERUBAH DAN DINAMIS DARI TAHUN KE TAHUN.

3. TERHADAP PERLUNYA LANGKAH-LANGKAH TAKTIS DAN STRATEGIS SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK, KAMI SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN FRAKSI PARTAI GERINDRA UNTUK MEBERIKAN PELAYANAN TERBAIK TELAH DILAKUKAN INOVASI

Dipindai dengan CamScanner

PENGEMBANGAN APLIKASI E-SAMSAT UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK, SEPERTI SAMSAT ONLINE/SAMSAT ANYWHERE, SIGNAL, PEMBAYARAN MELALUI ATM SERTA PENAMBAHAN PAYMENT POINT.

4. MENGENAI PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMPROV. SUMATERA BARAT TERKAIT LAYANAN BAGI WAJIB PAJAK, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA, PEMERINTAH PROVINSI TELAH MENYEDIAKAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN SECARA ONLINE DENGAN APLIKASI SIGNAL. DENGAN APLIKASI INI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN MUDAH, KAPAN SAJA DAN DIMANA SAJA PADA PERANGKAT ANDROID MASING-MASING.

5. TERHADAP INFORMASI ADANYA PERBEDAAN DATA JUMLAH KENDARAAN YANG ANTARA BAPENDA PROVINSI SUMBAR, BPS DAN DIRLANTAS POLDA SUMBAR, DAPAT DIJELASKAN PERBEDAAN INI TERJADI KARENA PERBEDAAN META DATA DI MASING-MASING DATABASE. UNTUK DATABASE KITA KENDARAAN YANG TERDATA MERUPAKAN KENDARAAN YANG SUDAH

Dipindai dengan CamScanner

TERDAFTAR SEMENJAK PULUHAN TAHUN YANG LALU YANG TERUS BERTAMBAH SETIAP WAKTU. UPDATING DATA KENDARAAN TERKENDALA OLEH SULITNYA PROSES PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN YANG HILANG, HANCUR, RUSAK BERAT DAN SEBAGAINYA, YANG MEMBUTUHKAN BANYAK KLARIFIKASI. DAN KEENGGANAN MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN KENDARAAN MEREKA.

6. TERKAIT DENGAN CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH DARI SISI PEMANFAATAN IDLE ASSET, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

   a. PEMERINTAH PROVINSI TELAH MELAKUKAN INVENTARISASI ASET TETAP YANG DAPAT MENGHASILKAN KONTRIBUSI BAGI PAD.
   b. ASET-ASET YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PAD TERSEBUT SEBAGIAN BESAR TELAH DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK LAIN DALAM BENTUK SEWA MAUPUN KERJASAMA BMD.
   c. PEMERINTAH DAERAH SEDANG MELAKUKAN PROSES LELANG KERJASAMA SEWA ASET-ASET EKS. NOVOTEL, BALAI SIDANG BUNG HATTA DAN HOTEL PAVILIUN. SESUAI HASIL

Dipindai dengan CamScanner

APPRAISAL, NILAI LIMIT SEWA UNTUK PAKET PENAWARAN INI ADALAH RP. 8 MILYAR PER TAHUN. SAAT INI TELAH DILAKUKAN PROSES ANWIZING KEPADA 13 PEMINAT.

d. DI SAMPING ITU PROSES BEBERAPA OBJEK SEWA LAINNYA JUGA SEDANG TETAP BERJALAN.

7. MENGENAI PERNYATAAN BAHWA SALAH SATU LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN PEMPROV UNTUK MENUTUP DEFISIT DENGAN MELAKUKAN PENGELOLAAN ASSET DENGAN BAIK, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

   a. PADA TAHUN 2023 TERHADAP PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR TELAH DILAKUKAN PERGANTIAN MANAJEMEN DAN SEDANG DIDORONG UNTUK MELAKUKAN RESTRUTURISASI. DAMPAK DARI KEBIJAKAN INI, TERJADI PERBAIKAN KINERJA SEHINGGA DAPAT MEMBUKUKAN LABA SEBESAR RP240.239.393,90.

   b. PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR SEDANG DALAM PROSES PELAKSANAAN

Dipindai dengan CamScanner

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA YANG DIPILIH SECARA *BEAUTY CONTEST*.

c. SEMENTARA ITU, UNTUK BUMD LAINNYA SEPERTI PT. BANK NAGARI DAN PT. JAMKRIDA SUMBAR TERUS MENUNJUKKAN PENINGKATAN LABA DAN TELAH BERKONTRIBUSI MELALUI PEMBAGIAN DEVIDEN KEPADA DAERAH.

8. SELANJUTNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN MENYAMBUT BAIK SARAN DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI TAPD TAAT DAN DISIPLIN MENJADIKAN BESARAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN TARGET RPJMD. HAK INI SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD YANG MENGHARUSKAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUBLIK MIJIMAL SEBESAR 40%. MOHON DUKUNGAN KITA BERSAMA.

9. TERHADAP SEJAUHMANA DAMPAK ALOKASI ANGGARAN 10 PERSEN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI YANG DILAKUKAN SEJAK 2021 HINGGA 2024 INI, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA TELAH TERJADI PENINGKATAN

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPATAN PETANI YANG DILIHAT DARI KENAIKAN NILAI TUKAR PETANI (NTP). TAHUN 2021 RATA-RATA NTP SEBESAR 107,61; TAHUN 2022 MENINGKAT MENJADI 108,81; TAHUN 2023 MENINGKAT MENJADI 109,59 DAN DI TAHUN 2024 RATA-RATA NTP SAMPAI DENGAN BULAN JUNI MENINGKAT CUKUP SIGNIFIKAN MENCAPAI 121,11.

10. MENGENAI LAPORAN TERKAIT INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI, MISALNYA JALAN DI TALAMAU PASAMAN DAN ALIRAN SUNGAI BATANG SUMPU YANG MEMERLUKAN PENANGANAN DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MELAKSANAKAN PENANGANAN JALAN PROVINSI YANG BERADA DI TALAMAU PASAMAN YAITU RUAS JALAN PANTI – SIMPANG EMPAT (P.031). SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN PEKERJAAN FISIK SEBANYAK 2 PAKET PEKERJAAN DENGAN NILAI KONTRAK RP 9,6 MILYAR DAN RP 12,4 MILYAR DENGAN PROGRES FISIK SAAT MENCAPAI 60%. PENYELESAIAN 2 PAKET PEKERJAAN INI AKAN

Dipindai dengan CamScanner

MENYELESAIKAN PERMASALAHAN JALAN RUSAK DI KAWASAN TALAMAU PASAMAN.

11. TERKAIT PROGRAM SIMAMAK DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PROGRAM INI SEJAK BULAN JUNI 2024 TELAH DIREALISASIKAN SECARA BERTAHAP. KAMI BERTERIMA KASIH KEPADA FRAKSI GERINDRA YANG SELALU MENGAWAL PROGRAM INI.

    LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM SIMAMAK INI ADALAH:

    1. MENERBITKAN 2 (DUA) PERATURAN GUBERNUR, YAITU :
        a. PERGUB NO. 23 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI
        b. PERGUB NO. 39 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. BANK NAGARI DALAM PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/ MARGIN PADA USAHA KECIL
    2. PENGESAHAN MELALUI RUPS BANK NAGARI.

Dipindai dengan CamScanner

3. MEMBUAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS TERKAIT DENGAN BANK NAGARI PADA TANGGAL 15 MEI 2024.
4. MENSOSIALISASIKAN PROGRAM SIMAMAK.
5. SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM SIMAMAK OLEH BANK NAGARI.
6. DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI MENCAIRKAN PROGRAM SIMAMAK SESUAI PERMINTAAN BANK NAGARI.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GERINDRA.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. ATAS MASUKANNYA TERHADAP PERLUNYA LANGKAH PEMPROV DALAM MEMENUHI TARGET REALISASI PENDAPATAN DI SEMESTER II INI

Dipindai dengan CamScanner

DITINJAU DARI KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH PADA SEMESTER I INI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANGANGAN FRAKSI PKS TERSEBUT.

2. TERKAIT HARAPAN AGAR RENOVASI FASILITAS UMUM YANG TERDAMPAK BENCANA. UNTUK DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA, DAPAT KAMI JELASKAN, BAHWA JALAN PADANG-BUKITTINGGI VIA LEMBAH ANAI SUDAH DAPAT DILALUI MULAI TANGGAL 21 JULI 2024, HAL INI TIDAK TERLEPAS DARI SINERGI OPTIMAL ANTARA PEMPROV, PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA. KE DEPAN, KAMI MOHON DUKUNGAN FRAKSI PKS DAN SELURUH FRAKSI-FRAKSI DPRD AGAR FOKUS ANGGARAN KITA DIARAHKAN KEPADA PERBAIKAN INRASTRUKTUR YANG RUSAK AKIBAT BENCANA, SEHINGGA EKONOMI MASYARAKAT DAPAT MENINGKAT KEMBALI.
3. TERHADAP CAPAIAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN YANG MASIH PERLU UNTUK DITINGKATKAN KAMI UCAPAKAN TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEPAKAT UNTUK SELALU MENDORONG KINERJA BUMD DALAM MENAMBAH

Dipindai dengan CamScanner

DEVIDEN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

4. SELANJUTNYA KAMI SEPAKAT DENGAN PERSPEKTIF FRAKSI PKS YANG MEMANDANG BEBAN BELANJA DALAM RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2024 TERLALU BERAT UNTUK BISA DILAKSANAKAN, SEHINGGA KEPADA TAPD DISARANKAN UNTUK BENAR-BENAR SELEKTIF DALAM MENAMBAH KEGIATAN.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB BEBERAPA PERTANYAAN DAN TANGGAPAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. KAMI BERTERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ATAS USULAN KENAIKAN PAD DALAM RANGANGAN PERUBAHAN APBD TA. 2024 INI

Dipindai dengan CamScanner

KARENA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP DASAR PENDAPATAN, YAITU MENGGALI SUMBER PENDAPATAN SECARA LUAS SEHINGGA PENDAPATAN DAERAH DAPAT TERKUMPUL SECARA MAKSIMAL, TANPA MEMBEBANI EKONOMI MASYARAKAT.

2. TERKAIT STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA UPAYA PENURUANN ANGKA KEMISKINAN AKAN DITEMPUH DENGAN 3 STRATEGI:
   a. MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT TERUTAMA PADA KELOMPOK BERPENGHASILAN RENDAH
   b. MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT.
   c. MEMINIMALKAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN.
3. TERKAIT SARAN SAUDARA AGAR PEMPROV MELAKUKAN PEMETAAN DAN BASIS DATA TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMETAAN POTENSI GUNA MENGUKUR KEMUNGKINAN REALISASI

Dipindai dengan CamScanner

PENERIMAAN SERTA MENJADI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN. UPDATING DATA JUGA SECARA KONTINYU TERUS DILAKUKAN GUNA MEMINIMALISIR KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

4. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN DAN HARAPAN SAUDARA AGAR PEMPROV HARUS BISA MENGGALI POTENSI LAINYA DALAM MENINGKATKAN PAD. HAL INI DISEBABKAN KARENA PORSI UTAMA DARI PAD KITA YANG MASIH BERTUMPU PADA PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. ATAS MASUKANNYAN KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.
5. SEHUBUNGAN DENGAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BAHWA APBD KITA SANGAT BERGANTUNG PADA DANA TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT MEMANG DEMIKIANLAH KONDISINYA SAAT INI. KAMI SETUJU DENGAN SAUDARA BAHWA KITA PERLU MERUMUSKAN FORMULASI YANG LEBIH BAIK AGAR KETERGANTUNGAN TERSEBUT DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PAD.
6. TERHADAP HARAPAN FRAKSI DEMOKRAT AGAR PEMPROV SUMBAR PERLU MELAKUKAN

Dipindai dengan CamScanner

PENGAWASAN KETAT TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN TERMASUK KEPADA STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMPROV TELAH MELAKUKAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN BERBAGAI UPAYA, SEPERTI MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI, MONEV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SERTA MENGEMBANGKAN APLIKASI SIMBANGDA BERBASIS EVIDENCE, GUNA MEMINIMALISIR ADANYA PEKERJAAN YANG TIDAK TERLAKSANA (TIDAK DILAKSANAKAN, PUTUS KONTRAK, BELUM TERBAYARKAN, MAUPUN MELEWATI TAHUN ANGGARAN).

7. TERKAIT PERMINTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT AGAR ASN DI PROVINSI SUMATERA BARAT NETRAL SAAT MOMEN PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAPAT DIJELASKAN TERKAIT NETRALITAS ASN PEMERINTAH PROVINSI TELAH MENGAMBIL BEBERAPA LANGKAH SEBAGAI BERIKUT:
   a. PENERBITAN SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA

Dipindai dengan CamScanner

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

b. PEMBACAAN IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARTUR SIPIL NEGARA DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DI SETIAP SKPD.
c. PENINGKATAN KESADARAN DAN EDUKASI, MELALUI SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA NETRALITAS ASN DALAM PILKADA.
d. PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN SANKSI TEGAS BAGI ASN YANG MELANGGAR NETRALITAS

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

Dipindai dengan CamScanner

1. SEHUBUNGAN DENGAN KINERJA PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 3,29% PADA TAHUN 2022 NAIK MENJADI SEBESAR 4,36% DAN PADA TAHUN 2023 MENJADI 4,61%. SEMUA REALISASI TELAH MELAMPAUI TARGET RPJMD.

   b. TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 6,52%, TAHUN 2022 TURUN MENJADI 6,28% DAN TAHUN 2023 KEMBALI TURUN MENJADI 5,94%. UNTUK KONDISI BULAN FEBRUARI 2024 TINGKAT PENGANGGURAN TERUS MEMBAIK DIANGKA 5,79%. KONDISI INI JUGA MELAMPAUI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.
   c. TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 6,04%, TAHUN 2022 TETAP DIANGKA 6,04% DAN PADA TAHUN 2023 TURUN MENJADI 5,95%. UNTUK KONDISI BULAN MARET 2024 TINGKAT

Dipindai dengan CamScanner

KEMISKINAN SEDIKIT MENINGKAT MENJADI 5,97% YANG DISEBABKAN TERJADINYA BENCANA SEJAK DESEMBER 2023 CUKUP MENGANGGU TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT. NAMUN KONDISI KEMISKINAN INI JUGA LEBIH BAIK DARI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.

d. KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 0,91% ATAU SEBANYAK 50.842 JIWA DAN PADA TAHUN 2023 TURUN MENJADI 0,41% ATAU 23.253 JIWA. KONDISI KEMISKINAN EKSTREM INI JUGA LEBIH BAIK DARI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.

e. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 74,56, TAHUN 2022 MENJADI 75,16 MERUPAKAN RANGKING 9 SECARA NASIONAL DAN PADA TAHUN 2023 SEMAKIN MEMBAIK DENGAN IPM SEBESAR 75,64 YANG MERUPAKAN RANGKING 7 SECARA NASIONAL DIMANA CAPAIAN INI JUGA LEBIH BAIK DARI CAPAIAN RPJMD

Dipindai dengan CamScanner

f. ANGKA GINI RATIO TAHUN 2021 ADALAH SEBESAR 0,300 DAN PADA TaHUN 2023 MENJADI 0,280 (NOMOR 3 TERBAIK SECARA NASIONAL). CAPAIAN INI JUGA LEBIH BAIK DARI CAPAIAN RPJMD

2. SEHUBUNGAN TARGET KONTRIBUSI PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAPAT KAMI JELASKAN PADA TAHUN 2021 PDRB SEKTOR PERTANIAN SEBESAR RP38,82 TRILYUN DENGAN KONTRIBUSI TERHADAP EKONOMI SUMBAR SEBESAR 22,18%, KEMUDIAN DI TAHUN 2023 MENINGKAT MENJADI RP.41,61 T DENGAN KONTRIBUSI TERHADAP EKONOMI SUMBAR SEBESAR 21,78%. PROYEKSI TAHUN 2024 PDRB SEKTOR PERTANIAN AKAN BERADA PADA ANGKA Rp42 – RP. 42,5 TRILYUN DENGAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR DI ANGKA 21% – 22%.

MENGENAI INFLASI DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PADA KONDISI BULAN MAI 2024, AKIBAT BENCANA ALAM INFLASI SUMATERA BARAT MENINGKAT MENCAPAI 4,17% KEMUDIAN PADA

Dipindai dengan CamScanner

JUNI MENURUN MENJADI 4,03% DAN DI JULI 2024 KITA SUDAH BERHASIL MENGENDALIKAN KONDISI HARGA-HARGA BAHAN POKOK SEHINGGA INFLASI MENURUN MENJADI 2,44%. PERLU KAMI INFORMASIKAN JUGA BAHWA DARI DATA BPS RATA-RATA NILAI TUKAR PETANI (NTP) JUGA JAUH MENINGKAT, DIMANA RATA-RATA NTP KONDISI SEMESTER 1 TAHUN 2023 SEBESAR 107,84% DAN MENINGKAT CUKUP SIGNIFIKAN PADA SEMESTER 1 TAHUN 2024 MENJADI SEBESAR 121,11%. KONDISI INI MENGAMBARKAN ADANYA PERBAIKAN KESEJAHTERAAN TERHADAP PETANI DI SUMATERA BARAT.

3. SEHUBUNGAN DENGAN MENGATASI ISU-ISU STRATEGIS, SEPERTI IPM, PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, KESENJANGAN WILAYAH, LINGKUNGAN HIDUP, INFRASTRUKTUR DAN KETAHANAN PANGAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN 2024 INI DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024 INI TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

Dipindai dengan CamScanner

SEBAGAIMANA KONDISI AWAL TAHUN 2024 DENGAN 7 PRIORITAS YAITU :

a. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEHAT, UNGGUL DAN BERDAYA SAING
b. PENINGKATAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN ABS-SBK
c. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
d. PENINGKATAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL
e. PENINGKATAN EKONOMI KREATIF DAN BERDAYA SAING KEPARIWISATAAN
f. PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
g. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

4. MENGENAI PENJELASAN TENTANG STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MERAUP PENDAPATAN PADA RUMAH SAKIT YANG MASIH TERKENDALA DI BANYAK HAL, BAIK ADMINISTRASI MAUPUN FASILITAS, DAPAT

Dipindai dengan CamScanner

DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN UPAYA-UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANTARA LAIN:

a) MENINGKATKAN LAYANAN YANG ADA DI RUMAH SAKIT.
b) MENGOPTIMALKAN PROGRAM RUMAH SAKIT JEJARING KJSU-KIA.
c) PEMANFAATAN POTENSI LAIN RUMAH SAKIT SEPERTI PARKIR DAN SEWA GEDUNG.
d) PENGEMBANGAN KAPASITAS LAYANAN.
e) PENINGKATAN LAYANAN IT RUMAH SAKIT.

5. TERKAIT PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA DARI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI UPTD LB3M DLH PROVINSI SUMATERA BARAT, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SEJAK JUNI 2023 PENGOLAHAN LIMBAH B3 MEDIS (INCENERATOR) SUDAH TIDAK OPERASIONAL YANG DISEBABKAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA DICABUT OLEH KLHK. KEMUDIAN PADA APRIL 2024 UPTD LB3M DINAS LH SUDAH MEMPEROLEH SEMUA PERIZINAN YANG DI PERSYARATKAN, NAMUN KENDALA SAAT INI ADALAH UNIT INCENRATOR TERSEBUT MENGALAMI KERUSAKAN SEHINGGA MEMERLUKAN PERBAIKAN YANG

Dipindai dengan CamScanner

DIANGGARKAN PADA APBD PERUBAHAN 2024, SEHINGGA DI PERKIRAKAN BARU AKAN OPERASIONAL PADA BULAN DESEMBER 2024.

6. SELANJUTNYA TERHADAP PEMBENTUKAN SILPA YANG LEBIH KECIL DARI PROYEKSI, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA SILPA, ADALAH SELISIH LEBIH REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN SELAMA SATU PERIODE ANGGARAN. JIKA DILIHAT DALAM LKPD AUDITED, SILPA TAHUN 2023 ADALAH SEBESAR 180.447.544.425,19 DARI YANG DITARGETKAN RP. 251.444.175.049. SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH RENDAHNYA CAPAIAN PAJAK DAERAH YAITU SEBESAR RP. 2.236.722.695.545,00 DARI PAGU ANGGARAN SEBESAR RP. 2.463.434.564.594 ATAU CAPAIAN PAJAK HANYA 90,80 %.

7. BERKENAAN DENGAN PERMINTAAN PENJELASAN TERKAIT DEFISIT PEMBELANJAAN DAERAH DAN SOLUSI LAIN SELAIN MENUTUPINYA DENGAN PEMBIAYAAN NETTO, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SELAIN

Dipindai dengan CamScanner

PEMBIAYAAN NETTO, SOLUSI YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENUTUPI DEFISIT ADALAH DENGAN MENAIKKAN PENDAPATAN DAERAH, MELAKUKAN RASIONALISASI BELANJA ATAU MELAKUKAN PENYESUAIAN KEMBALI KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DAN TERAKHIR DENGAN UTANG.

8. SELANJUTNYA TERKAIT PENJELASAN KEADAAN MAKRO DAERAH, SEPERTI ANGKA PENGGANGGURAN TERBUKA DAN SOLUSI APA YANG BISA DI LAKUKAN DALAM WAKTU KASIB INI, SECARA UMUM TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA PADA PERTANYAAN NOMOR 1 DI ATAS.
9. SELANJUTNYA ATAS PERTANYAAN PENYEBAB SILPA YANG DI HARAPKAN SEMULA TERNYATA BERKURANG, TELAH DIJELASKAN PADA JAWABAN PERTANYAAN NOMOR 6.
10. MENGENAI DAMPAK BENCANA ALAM YANG MEMBUTUHKAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA KHUSUSNYA AKSES JALAN DI LEMBAH ANAI DAPAT DIJELASKAN PASCA BENCANA TERSEBUT JALAN PADANG MENUJU BUKITTINGGI DILEMBAH ANAI TELAH PERBAIKI

Dipindai dengan CamScanner

OLEH BALAI JALAN NASIONAL DENGAN PROGRES FISIK SAAT INI TELAH MENCAPAI 50%. RUAS JALAN INI TELAH BISA DILALUI OLEH KENDARAAN SECARA TERBATAS DAN DIRENCANAKAN SELESAI PADA BULAN OKTOBER 2024.

11. TERKAIT DENGAN PERUBAHAN REGULASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERDA DAN PERATURAN GUBERNUR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ATURAN YANG LEBIH TINGGI. KARENA ITU PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR PERLU DIHARMONISASIKAN DAN DISELARASKAN SEHINGGA PERLU DIEVALUASI. DISAMPING UNTUK MELIHAT ATAU MENGKAJI KESELARASAN DAN KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, EVALUASI JUGA BERTUJUAN UNTUK MELIHAT BAGAIMANA IMPLEMENTASI ATAU PENERAPAN PRODUK HUKUM DAERAH TERSEBUT.

Dipindai dengan CamScanner

12. TERKAIT DENGAN PENURUNAN BELANJA PEGAWAI REALISASI AKTUAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PP NO. 14 TAHUN 2024, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PERHITUNGAN GAJI DAN TUNJANGAN SUDAH TERMASUK DENGAN KEBUTUHAN THR DAN GAJI 13 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. NAMUN PPPK YANG DIANGKAT LEBIH SEDIKIT DARI YANG DIUSULKAN PADA APBD AWAL

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TERKAIT PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA YANG PRIHATIN DAN

Dipindai dengan CamScanner

MENGANGGAP TERJADI PENURUNAN KUALITAS DARI NOTA PENGANTAR GUBERNUR, KAMI MENGHARGAI PENDAPAT TERSEBUT. HAL INI AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI UNTUK TERUS BERBENAH DI MASA YANG AKAN DATANG.

2. SELANJUTNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PARTAI GOLKAR YANG TELAH MENGINGATKAN BAHWA TAHUN 2024 INI ADALAH MERUPAKAN TAHUN TERAKHIR DARI RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT 2020-2024. KARENA ITU KAMI SEPAKAT UNTUK MENJADIKAN PERUBAHAN APBD INI SEBAGAI MOMENTUM UNTUK MEMASTIKAN KETERCAPAIAN TARGET KINERJA SETIAP INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH YANG MELEKAT PADA SETIAP SKPD.
3. TERHADAP SARAN AGAR SKPD YANG DIBEBANKAN PENAMBAHAN TARGET PAD AGAR MENDAPAT PENAMBAHAN BELANJA ATAU SEBALIKNYA, SECARA PRINSIP KAMI SANGAT SETUJU. SELANJUTNYA KAMI BERHARAP SKENARIO PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TELAH DIRANCANG SEDEMIKIAN RUPA OLEH TAPD DAPAT KITA BAHAS DAN

Dipindai dengan CamScanner

SETUJUI BERSAMA SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. TERHADAP PENAMBAHAN ATAUPUN PENGURANGAN TARGET PAD PADA BEBERAPA SKPD TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA PADA JAWABAN ANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.
5. SELANJUTNYA MENGENAI KORELASI LAPORAN SEMESTER PERTAMA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RANPERDA PERUBAHAN APBD, MENURUT PERSPEKTIF KAMI HAL TERSEBUT MEMILIKI RELEVANSI YANG SANGAT KUAT. KAMI MENDUKUNG SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR AGAR SKPD YANG MEMILIKI REALISASI RENDAH SEBAGIAN ANGGARANNYA DIREKOLASI KE SKPD YANG BERKINERJA TINGGI. NAMUN PERLU DIINGAT BAHWA KEBIJAKAN RELOKASI INI, TETAP MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KECERMATAN SESUAI KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SELANJUTNYA KAMI MOHON DUKUNGAN DARI SELURUH ANGGOTA DPRD UNTUK SAMA-SAMA

Dipindai dengan CamScanner

MENGAWALNYA SEHINGGA DI AKHIR TAHUN REALISASI APBD KITA TETAP BERKINERJA BAIK DAN SILPA YANG TERBENTUK BERADA DALAM RASIO YANG WAJAR.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB PANAFANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PPP-NASDEM, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. MENANGGAPI PERMINTA PENJELASAN TENTANG PENYUSUNAN RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 AGAR MENGACU KEPADA KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN 2024 YANG TELAH DISEPAKATI, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA DENGAN FRAKSI PPP-NASDEM BAHWA DALAM PENYUSUNAN RANPERDA PERUBAHAN APBD

Dipindai dengan CamScanner

TAHUN 2024 MENGACU KEPADA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TA 2024, DAN TELAH TELAH MEMPEDOMANI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD.

2. MENGENAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. DENGAN SISA WAKTU YANG ADA TINDAKAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMAKSIMALKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI, SUDAH TERJAWAB PADA JAWABAN PERTANYAAN YANG IDENTIK PADA FRAKSI GERINDRA.
   b. MENGENAI POTENSI DARI IDLE ASET YANG BISA DIMANFAATKAN JUGA SUDAH TERJAWAB DENGAN JAWABAN PERTANYAAN PADA FRAKSI PARTAI GERINDRA
   c. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENDAYAGUNAKAN OPD PENGELOLA BLUD DAN UPTD-UPTD LAINNYA DALAM RANGKA AKSELERASI PENERIMAAN DAERAH ANTARA LAIN DENGAN MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGALI POTENSI

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPATAN MELALUI KERJASAMA DENGAN SEKTOR SWASTA DAN LAYANAN TAMBAHAN, SERTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN YANG TERINTEGRASI.

d. PERIHAL DEFISIT YANG CUKUP BESAR PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024, AKAN MENJADI PEMBELAJARAN BAGI KITA SEMUA AGAR TIDAK TERJADI LAGI PADA MASA-MASA MENDATANG. DALAM MENGATASI DEFISIT YANG CUKUP BESAR INI, PEMPROV TELAH MELAKUKUAN RASIONALISASI BELANJA-BELANJA PADA SKPD DAN AKAN TERUS MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2024.

3. SELANJUTNYA MENGENAI KEBUTUHAN MASYARAKAT PASAMAN DAN PASAMAN BARAT TERHADAP PENGUATAN TEBING BATANG AMPU DI PASAMAN ABARAT DAN PENGUATAN TEBING BATANG LANDIR DI PASAMAN, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR DI SUNGAI BATANG AMPU DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN BATANG LANDIR KABUPATEN PASAMAN HARUS DILAKUKAN SECARA TERPADU DAN

Dipindai dengan CamScanner

KOMPREHESIF, DIMANA SANGAT DIPERLUKAN DESAIN MENYELURUH DAN DILANJUTKAN PEMBANGUNAN FISIKNYA SECARA BERTAHAP. SELAIN ITU JUGA PERLU PENANGANAN NON FISIK SEPERTI PENGHIJAUAN KEMBALI DAERAH ALIRAN SUNGAI, UNTUK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR SERTA KONSERVASI SUMBER AIR.

4. SEHUBUNGAN DENGAN MASUKAN AGAR PROYEK YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DIOPTIMALKAN PENGERJAANNYA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KUALITAS FISIKNYA, PEMERINTAH PROVINSI SEPENDAPAT DAN BERTERIMA KASIH KARENA SUDAH DIINGATKAN OLEH FRAKSI PPP-NASDEM.
5. MENGENAI TANGGAPAN FRAKSI PPP-NASDEM TERHADAP PEMERINTAH DAERAH UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG SUDAH DI RENCANAKAN DAN SUDAH DIANGGARKAN PADA APBD MURNI TAHUN 2024, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA KAMI SETUJU DENGAN HAL TERSEBUT DIANTARANYA PERUBAHAN ANGGARAN YANG KITA LAKUKAN INI HANYA BERUPA PENYESUAIAN TERHADAP KONDISI TERKINI YANG SUDAH TIDAK RELEVAN

Dipindai dengan CamScanner

LAGI DENGAN KEBIJAKAN UMUM APBD YANG SEBELUMNYA KITA SEPAKATI.

6. TERHADAP PERMINTAAN FRAKSI PPP-NASDEM AGAR PEMERINTAH DAERAH PADA APBD PERUBAHAN TIDAK MENGANGGARKAN KEGIATAN FISIK DAN BELANJA MODAL YANG SIFATNYA DITENDERKAN MENGINGAT WAKTU YANG SANGAT SINGKAT, KAMI SEPENDAPAT, DISAMPING ITU HAL INI JUGA TELAH DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDA-UNDANGAN YANG BERLAKU.
7. PERMINTAAN FRAKSI NASDEM AGAR GUBERNUR MEMERINTAHKAN KETUA TAPD UNTUK MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MENYISIR/ MENUNDA KEGIATAN-KEGIATAN OPD YANG TIDAK URGEN, SUDAH DILAKUKAN SAAT MENCARIKAN SOLUSI TERHADAP TINGGINYA DEFISIT PADA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024 INI, SELANJUTNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN BERUPAYA UNTUK MENCAPAI TERGET PENDAPATAN YANG TELAH DISEPAKATI PADA SAAT PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI JELASKAN PADA POIN DIATAS.

Dipindai dengan CamScanner

8. SEHUBUNGAN DENGAN SARAN FRAKSI PPP-NASDEM AGAR ANGGARAN DIARAHKAN UNTUK MENAMBAH SARANA PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KAMI SANGAT SEPAKAT KARENA PENDIDIKAN MERUPAKAN BAGIAN VITAL DARI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENINGKATAN SARANA PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN AKAN MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN DAN BERIMBAS PADA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. NAMUN TENTU KITA TIDAK BISA MENGENYAMPINGKAN KUALITAS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN YANG MENDUKUNG PEMENUHAN KOMPETENSI SISWA MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2024
9. KAMI BERTERIMA KASIH DAN MENGAPRESIASI PERSETUJUAN DARI FRAKSI PPP-NASDEM TERKAIT RANCANGAN PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIAJUKAN PADA RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA. 2024.
10. SEHUBUNGAN DENGAN PERNYATAAN FRAKSI PARTAI PPP-NASDEM MENGENAI RANPERDA

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN APBD TAHUN 2024, YANG DIPANDANG MASIH BELUM BERPIHAK KEPADA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN SEHINGGA PERLU LEBIH DISEMPURNAKAN, KAMI SEPAKAT DAN BERTERIMA KASIH ATAS MASUKAN YANG DIBERIKAN. UNTUK ITU MOHON DALAM PEMBAHARAN RANPERDA PERUABHAN APBD NANTINYA HAL INI SAMA-SAM MENJADI FOKUS PERHATIAN KITA.

11. MENGENAI STANDARISASI, EFEKTIVITAS DAN HARAPAN DARI PROGRAM UNGGULAN (PROGUL) AGAR TERLAKSANA DENGAN BAIK, SEHINGGA KEBERADAAN PROGRAM TERSEBUT BISA DIRASAKAN MASYARAKAT BANYAK, DALAM HAL INI KAMI SEPENDAPAT DAN BERMOHON DUKUNGAN DARI FRAKSI PPP-NASDEM DAN SELURUH FRAKSI LAINNYA AGAR KITA BERSAMA DAPAT MENGAWAL PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGUL-PROGUL TERSEBUT SEHINGGA BENAR-BENAR DAPAT DIRASAKAN DAN MENINGKATKAN

Dipindai dengan CamScanner

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT.

12. PERMASALAH YANG TERJADI PADA MASAYARAKT TERKAIT PUKAT HARIMAU ATAU HAMPARAN DASAR, YANG MASIH BEROPERASI DI BEBERAPA WILAYAH DI PESISIR SELATAN, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :
    a. PADA TAHUN 2024 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH MELAKUKAN 5 KALI PENGAWASAN.
    b. SELANJUTNYA JUGA DILAKUKAN PENGAWASAN DENGAN MELIBATKAN UNSUR PENGAWAS DKP, POLAIRUT DAN SATWAS PSDKP, YANG DILAKUKAN MELALUI DARAT DAN PATROL LAUT.
    c. SELANJUTNYA KE DEPAN AKAN DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH:
        1) MENINGKATKAN INTENSITAS PENGAWASAN
        2) BERKOORDINASI DENGAN LANTAMAL II PADANG

Dipindai dengan CamScanner

3) MENDIRIKAN POS PENGAWASAN ANGKATAN LAUT DI LOKASI YANG SERING TERJADI PELANGGARAN

4) MENGUPAYAKAN PERCEPATAN PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGAWASAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN RI DENGAN PEMDA PROVINSI SUMATERA BARAT.

13. MENGENAI PENYEDIAAN AMBULANCE LAUT DI TUA PEJAT MENTAWAI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI DINAS KESEHATAN TELAH MENGUSULKAN AMBULANCE AIR PADA ANGGARAN DAK 2024, NAMUN DITOLAK DENGAN ALASAN UNTUK AMBULANCE AIR MEMBUTUHKAN ANGGARAN OPERASIONAL DAN MAINTENANCE YANG BESAR. PADA TAHUN 2013, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TELAH MENDAPATKAN BANTUAN AMBULANCE AIR, NAMUN SAAT INI TIDAK BISA DIFUNGSIKAN

Dipindai dengan CamScanner

DAN TERBENGKALAI KARENA KETERBATASAN ANGGARAN OPERASIONAL DAN MAINTENANCE.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI PPP NASDEM.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PKB, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TERKAIT PERTANYAAN HAL APA YANG MEMBUAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATEA BARAT BEGITU OPTIMISNYA SEKTOR PENDAPATAN INI DAPAT DINAIKAN DALAM KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG MASIH LEMAH INI, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENINGKATAN PENDAPATAN MENJADI SEBESAR RP6,877 TRILYUN ATAU MENINGKAT 4,42 % DARI APBD AWAL YAITU RP6,586 TRILYUN INSYAAALAH BISA KITA CAPAI DENGAN MEMPERHATIKAN

Dipindai dengan CamScanner

PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT YANG TERUS MENGALAMI PENINGKATAN. ASUMSIMLAIN YANG MENDUKUNG HAL TERSBUT ANTARA LAIN:

a. INFLASI SUMATERA BARAT YANG TERKENDALI.
b. DAYA BELI MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MULAI MEMBAIK.
c. STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI YANG MASIH TERKENDALI.
d. ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI STIMULUS PAJAK BAGI MASYARAKAT SUMATERA BARAT.

MUDAH-MUDAHAN DENGAN KERJA KERAS SEMUA PIHAK MAKA ROYEKSI PENDAPATAN YANG DIRENCANAKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 OPTIMIS DAPAT DICAPAI.

2. TERHADAP LAPORAN SEMESTER PADA KONDISI PENDAPATAN DAERAH YANG BARU TERCAPAI SEKITAR 43,25% YANG MENYEBABKAN KEKHAWATIRAN FRAKSI PDIP-PKB ATAS

Dipindai dengan CamScanner

KETERCAPAIAN KENAIKANMYA SEBESAR 4,42% DI PERUBAHAN APBD 2024, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TELAH MENGHITUNG SECARA CERMAT POTENSI PENDAPATAN. KEMUDIAN LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. MENGOPTIMALKAN KINERJA SAMSAT;
b. MENGOPTIMALKAN LAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM, JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU DENGAN MENGIMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI;
c. MENINGKATKAN *GOOD COORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA SEMUA BUMD SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN JUMLAH DEVIDEN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT;
d. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN ASET-ASET YANG MASIH IDLE.

3. TERHADAP PERTANYAAN APA PENYEBAB LAMBATNYA REALISASI BELANJA DAERAH, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SERAPAN

Dipindai dengan CamScanner

ANGGARAN YANG MASIH DIBAWAH 50% TERSEBUT SEJALAN DENGAN UPAYA MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MENYISIR/ MENUNDA KEGIATAN-KEGIATAN OPD YANG TIDAK URGEN KHUSUSNYA PADA BELANJA BARANG DAN JASA. BELUM OPTIMALNYA SERAPAN ANGGARAN TERSEBUT KAMI PASTIKAN TIDAK AKAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, KARENA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT TETAP MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMERINTAH PROVINSI, SEMENTARA EFISIENSI BELANJA DITUJUKAN KEPADA HAL-HAL YANG BERADA DI LUAR ITU.

ADAPUN LANGKAH KONKRIT YANG AKAN DILAKSANAKAN ANTARA LAIN :

a. MEMFORMASI ULANG PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA MELAKUKAN PENYESUAIAN RENCANA BELANJA JIKA DIPERLUKAN.
b. MELAKUKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN PEMBOROSAN DAN MEMASTIKAN EFISIENSI BELANJA.

Dipindai dengan CamScanner

c. MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA BERKALA TERHADAP KINERJA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

III. PENUTUP

DEMIKIANLAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI JAWABAN ATAS PANDANGAN, PERTANYAAN, SARAN DAN TANGGAPAN DARI PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD. SESUAI DENGAN MEKANISME, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA HARI KAMIS 31 JULI 2024 YANG LALU AKAN MEMASUKI TAHAPAN PEMBAHASAN YANG LEBIH MENDALAM DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN. SEMOGA NIAT BAIK DAN UPAYA KITA INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG

Dipindai dengan CamScanner

LEBIH BESAR UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT, SERTA MEMPEROLEH RIDHA DAN BERKAH HENDAKNYA DARI ALLAH SWT.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN

BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH,
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT

AUDY JOINALDY

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENETAPAN RANPERDA PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARA TAHUN 2024
SENIN, 19 AGUSTUS 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024, dengan Agenda Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna dalam rangka penetapan penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah dihadiri lebih dari 2/3 dari jumlah anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Juli 2024, pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024, diagendakan 2 (dua) rapat paripurna, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan rapat paripurna dalam rangka penetapan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berhubung belum keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan, maka penetapannya belum dapat dilakukan pada rapat paripurna ini dan akan diagendakan nanti kembali setelah keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, pada hari ini kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada rapat paripurna tanggal 27 Juli 2924 yang lalu, DPRD bersama Gubernur Sumatera Barat telah menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Menindaklanjuti Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 yang disepakati tersebut, pada rapat paripurna tanggal 31 Juli 2024 yang lalu, Saudara Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati, proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, belum kredibel oleh karena target pendapatan yang diusulkan masih bersifat tentatif dan baru sebatas Upaya untuk menyeimbangkan alokasi belanja yang dibutuhkan.

Dipindai dengan CamScanner

Kondisi ini disebabkan, oleh karena target pendapatan yang diusulkan pada APBD Tahun 2024 awal diprediksi tidak tercapai dan SILPA dari APBD Tahun 2023 juga tidak sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan kebutuhan belanja justru bertambah, oleh karena cukup banyak kegiatan yang bersifat mandatory, sisa DAK, sisa BOS dan hutang bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang harus dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Kondisi yang terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, sebelumnya juga terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023. Ini menunjukan, bahwa pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, efektif dan efisien.

Permasalahan ini, perlu menjadi perhatian dan catatan dari Pemerintah Daerah, agar penyusunan APBD berkualitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Memperhatikan kondisi yang terdapat dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka

pembahasan lebih difokuskan pada upaya-upaya untuk menjadikan Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi lebih kredibel, berimbang antara pendapatan dan belanja, efektif dan tepat guna. Kondisi pembahasan tersebut, tentu berdampak sedikit banyaknya teradap kualitas Perubahan APBD Tahun 2024.

Meskipun dalam pembahasan terdapat peningkatan target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD, akan tetapi masih cukup untuk menjadikan neraca Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi berimbang. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan rasionalisasi, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak, kegiatan yang realisasinya masih rendah serta kegiatan pendukung seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan dan perawatan rutin serta kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pencapaian target kinerja RPJMD.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dan diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada siang hari ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD.

Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD yang sekaligus merupakan Sekretaris Badan Anggaran kami persilahkan untuk membacakan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD dan penandatangani Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 17/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka dilanjutkan dengan penandatangani Nota

Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan.

.....

Penandatangani Nota Persetujuan Bersama

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan dan ditanda tanganinya Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka acara rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur , kami persilahkan.

.....

Penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir/sambutannya

terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Bersama, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wakilota.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang sudah kita sepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi, sehingga realisasinya dapat pula segara dilaksanakan. Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2024 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2024 ini.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, merupakan pembahasan anggaran terakhir yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 bersama dengan Pemerintah Daerah. Kami menyadari, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat.

Masih banyak aspirasi yang disampaikan oleh konstituen, baik dari pelaksanaan reses maupun yang disampaikan langsung kepada Lembaga yang belum dapat kami perjuangkan. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh kesengajaan, akan tetapi banyak permasalahan yang menyebabkan belum terakmodirnya aspirasi tersebut, seperti kewenangan, keterbatasan fiskal serta belum sejalannya usulan dengan program prioritas daerah.

Untuk itu, dari hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tersebut.

Selanjutnya, kepada Pemerintah Daerah, TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga menyampaikan permohonan maaf, oleh karena dalam pembahasan, baik ditingkat komisi maupun ditingkat Badan Angggara, tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan bahkan sering terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam.

Namun perlu kita pahami bersama, bahwa perbedaan dan pertentangan yang terjadi tersebut, semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas hasil pembahasan, agar terwujud APBD yang kredibel, akuntabel, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

Rapat Parupurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada sore hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD, TAPD dan OPD-OPD yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya, kami menyampaikan juga permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan pembahasan dan pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan " Alhamdulillahirabbilalimin " Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap *Ranperda* tentang Perubahan APBD Tahun 2024, kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**

Hadirin yang kami muliakan,

Terlebih dahulu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, se izin pimpinan kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan atas rahmat Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan -*minazzulumati ilannur*- sebagaimana yang kita rasakan hari ini serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Dipindai dengan CamScanner

Pempinan Serta Hadirin Yang Kami Muliakan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir Fraksi kami ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan untuk HUT RI ke- 79 : ***"Merdeka Bukan Hanya Kata, Melainkan Tekad Untuk Terus Berkarya. Selamat Ulang Tahun Ke-79, Indonesia! Mari Terus Maju"***

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada kondisi saat ini kita perlu melakukan perbaikan dalam terutama dalam peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah terencana terutama kegiatan yang menyangkut untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Fraksi kami berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa kedepan khususnya terhadap target-target pendapatan, pihak-pihak yang terkait pada posisi ini betu-betul sudah memakai azaz professional dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama ucapan terimaksih Fraksi kami kepada kawan-kawan di Banggar serta TAPD yang telah menyelesaikan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Pada tahun 2023 yang lalu dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Fraksi kami pernah menyampaikan bahwa di dalam mengahadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini diperlukan suatu konegtifitas dan transparansi baik itu di dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun hubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang terjadi saat ini dapat kita atasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan Pembangunan Sumatera Barat yang kita cintai ini. Fraksi kami sekali lagi mengingatkan hal ini.

3. Sebagaimana dalam laporan Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD bahwa memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024,

Dipindai dengan CamScanner

maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terhadap hal ini Fraksi kami memberikan pendapat bahwa *kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak terganggu dalam melakukan rasionalisasi tersebut sebab kegitan ini sudah memperhitungkan dampak manfaat bagi masyarakat. dan pembangunan provinsi yang kita cintai ini.*

4. Tentang Pendapat Asli Daerah, sebagaimana yang terlihat pada Laporan Banggar bersama TAP bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diusahakan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 3.348.283.830.555, (hasil pembahsan kedua) kurang dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dengan segala pertimbangan, Fraksi kami dalam hal ini memberikan pendapat bahwa posisi PAD ini selalu dapat diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, kedepan kita berharap bahwa posisi PAD ini sudah harus dapat menempatkan angka-angka/nilai-nilai yang dimunculkan/ditampilkan sudah bersifat realistis.

5. Tentang Target PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2024 lebih tinggi dari target PAD dalam Perda APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 230.041.779.655,-, oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam hal pencapaian target tersebut agar bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan target Pendapatan tersebut. Fraksi kami juga sepakat dengan Banggar agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti di tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target PAD dan sehubung tahun ini juga telah terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan lambatnya pergerakan pertumbuhan ekonomi dibeberapa titik di Sumataera Barat pasca bencana alam, maka Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan kerjasama yang kongkrit dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

Dipindai dengan CamScanner

6. Sebagaimana dalam Laporan Banggar Bersama TAPD bahwa alokasi Belanja Daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024 , lebih besar Rp. 199.503.502.031,19,- dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal, dan Terkait dengan alokasi belanja daerah ini,

7. Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya; *Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya* ***di akhir masa jabatannya,*** Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat setuju serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait untuk lebih bersungguh-sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024 dan mencapai target kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

8. Tentang Pembiayaan Daerah yang bersumber pada Silpa APBD Tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp 180.447.544.425,`7 dan pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari Fraksi kami dapat menerimanya.

9. Terkait Perubahan APBD tahun 2024 yang diantaranya diakibatkan karena lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD, lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dimana seringkali ditemukan kegiatan perencanaan dilakukan dalam tahun berjalan dan bermuara pada kualitas Pembangunan yang tidak maksimal oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat untuk memperhatikan sistem keuangan yang baik di sisa tahun anggaran ini kedepannya, dan Fraksi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait melakukan perencanaan DED pada anggaran perubahan sehingga bisa memaksimalkan kegiatan fisik serta penyerapan anggaran di awal tahun.

10. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendorong semangat tertib administrasi keuangan untuk selalu dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang & jasa dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar

Dipindai dengan CamScanner

tanpa pengecualian, tetapi tanpa adanya banyak temuan kepada Pemerintah Daerah dan OPD Terkait dalam penggunaan/pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun anggaran

Rapat Dewan Yang Kami Muliakan,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas yang merupakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan berbagai harapan, catatan-catatan, saran bahkan kritikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Sumatera Barat maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ***menyatakan dapat menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 19 Agustus 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, S.E	**Firdaus, SH.I**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**

Hadirin yang kami muliakan,

Terlebih dahulu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, se izin pimpinan kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan atas rahmat Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan -*minazzulumati ilannur*- sebagaimana yang kita rasakan hari ini serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Dipindai dengan CamScanner

Pempinan Serta Hadirin Yang Kami Muliakan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir Fraksi kami ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan untuk HUT RI ke- 79 : ***"Merdeka Bukan Hanya Kata, Melainkan Tekad Untuk Terus Berkarya. Selamat Ulang Tahun Ke-79, Indonesia! Mari Terus Maju"***

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada kondisi saat ini kita perlu melakukan perbaikan dalam terutama dalam peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah terencana terutama kegiatan yang menyangkut untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Fraksi kami berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa kedepan khususnya terhadap target-target pendapatan, pihak-pihak yang terkait pada posisi ini betu-betul sudah memakai azaz professional dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama ucapan terimaksih Fraksi kami kepada kawan-kawan di Banggar serta TAPD yang telah menyelesaikan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Pada tahun 2023 yang lalu dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Fraksi kami pernah menyampaikan bahwa di dalam mengahadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini diperlukan suatu konegtifitas dan transparansi baik itu di dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun hubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang terjadi saat ini dapat kita atasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan Pembangunan Sumatera Barat yang kita cintai ini. Fraksi kami sekali lagi mengingatkan hal ini.

3. Sebagaimana dalam laporan Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD bahwa memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024,

Dipindai dengan CamScanner

maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terhadap hal ini Fraksi kami memberikan pendapat bahwa *kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak terganggu dalam melakukan rasionalisasi tersebut sebab kegitan ini sudah memperhitungkan dampak manfaat bagi masyarakat. dan pembangunan provinsi yang kita cintai ini.*

4. Tentang Pendapat Asli Daerah, sebagaimana yang terlihat pada Laporan Banggar bersama TAP bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diusahakan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 3.348.283.830.555, (hasil pembahsan kedua) kurang dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dengan segala pertimbangan, Fraksi kami dalam hal ini memberikan pendapat bahwa posisi PAD ini selalu dapat diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, kedepan kita berharap bahwa posisi PAD ini sudah harus dapat menempatkan angka-angka/nilai-nilai yang dimunculkan/ditampilkan sudah bersifat realistis.

5. Tentang Target PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2024 lebih tinggi dari target PAD dalam Perda APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 230.041.779.655,-, oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam hal pencapaian target tersebut agar bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan target Pendapatan tersebut. Fraksi kami juga sepakat dengan Banggar agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti di tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target PAD dan sehubung tahun ini juga telah terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan lambatnya pergerakan pertumbuhan ekonomi dibeberapa titik di Sumataera Barat pasca bencana alam, maka Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan kerjasama yang kongkrit dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

Dipindai dengan CamScanner

6. Sebagaimana dalam Laporan Banggar Bersama TAPD bahwa alokasi Belanja Daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024 , lebih besar Rp. 199.503.502.031,19,- dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal, dan Terkait dengan alokasi belanja daerah ini,

7. Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya; *Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya* ***di akhir masa jabatannya,*** Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat setuju serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait untuk lebih bersungguh-sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024 dan mencapai target kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

8. Tentang Pembiayaan Daerah yang bersumber pada Silpa APBD Tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp 180.447.544.425,`7 dan pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari Fraksi kami dapat menerimanya.

9. Terkait Perubahan APBD tahun 2024 yang diantaranya diakibatkan karena lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD, lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dimana seringkali ditemukan kegiatan perencanaan dilakukan dalam tahun berjalan dan bermuara pada kualitas Pembangunan yang tidak maksimal oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat untuk memperhatikan sistem keuangan yang baik di sisa tahun anggaran ini kedepannya, dan Fraksi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait melakukan perencanaan DED pada anggaran perubahan sehingga bisa memaksimalkan kegiatan fisik serta penyerapan anggaran di awal tahun.

10. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendorong semangat tertib administrasi keuangan untuk selalu dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang & jasa dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar

Dipindai dengan CamScanner

tanpa pengecualian, tetapi tanpa adanya banyak temuan kepada Pemerintah Daerah dan OPD Terkait dalam penggunaan/pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun anggaran

Rapat Dewan Yang Kami Muliakan,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas yang merupakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan berbagai harapan, catatan-catatan, saran bahkan kritikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Sumatera Barat maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ***menyatakan dapat menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 19 Agustus 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, S.E	**Firdaus, SH.I**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SB/2024



TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SB/2024



TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

Padang, 19 Agustus 2024

Nomor : 165/ 1175 /FPP-DPRD/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Perda.

Kepada Yth:
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 2024, bersama ini kami kirimkan berkas kelengkapannya sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024.
2. Berita Acara Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.
4. Laporan Pembahasan Badan Anggaran.
5. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

SUPARDI, SH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna tanggal 31 Juli 2024;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Agustus 2024;
2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dikemudian hari dalam penetapan Keputusan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

SUPARDI

Lampiran : Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 17/SB/2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar **Rp 7.017.523.894.980,19** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.857.076.350.555,00
2. Belanja Daerah	Rp.	7.017.523.894.980,19
Surplus/Defisit	Rp.	(160.447.544.425,19)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	160.447.544.425,19
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	180.447.544.425,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000.000,00
A. Pendapatan Daerah. terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.348.283.830.555,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.491.768.520.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	17.024.000.000,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.698.964.972.421,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	414.280.722.633,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	129.624.977.090,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	105.413.158.411,00
2.1. Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.461.111.720.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.656.800.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	17.024.000.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	**Rp.**	**4.799.148.334.742,19**
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.592.082.354.458,16
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.880.966.819.215,03
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	1.500.000.000,00
1.4 Belanja Hibah	Rp.	324.468.713.569,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp.	130.447.500,00
2. Belanja Modal	**Rp.**	**888.781.649.472,00**
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	2.478.117.620,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	260.179.094.536,00
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	253.527.919.183,00
2.4 Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi	Rp.	331.752.243.530,00
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	40.826.174.603,00
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	18.100.000,00
3 Belanja Tidak Terduga	**Rp.**	**13.237.887.909,00**
Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.237.887.909,00
4 Belanja Transfer	**Rp.**	**1.316.356.022.857,00**
4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp.	1.268.709.922.857,00
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	47.646.100.000,00

C.	**Pembiayaan Daerah terdiri dari :**		
	1. Penerimaan	**Rp.**	**180.447.544.425,19**
	SILPA	Rp.	180.447.544.425,19
	2. Pengeluaran		**20.000.000.000,00**
	Penyertaan Modal Daerah	Rp.	20.000.000.000,00
	- Bank Nagari	Rp.	20.000.000.000,00

Padang, 19 Agustus 2024,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



S U P A R D I

BERITA ACARA
Nomor : 120 – 157/GSB-2024
Nomor : 120 -10 - 2024

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat. kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
   Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : SUPARDI.
      Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA. dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 19 Agustus 2024,

GUBERNUR SUMATERA BARAT Selaku, PIHAK PERTAMA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Selaku, PIHAK KEDUA
MAHYELDI	Ketua, S U P A R D I
	Wakil Ketua, IRSYAD SYAFAR
	Wakil Ketua, SUWIRPEN SUIB
	Wakil Ketua, INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar **Rp 7.017.523.894.980,19** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.857.076.350.555,00
2. Belanja Daerah	Rp.	7.017.523.894.980,19
Surplus/Defisit	Rp.	(160.447.544.425,19)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	160.447.544.425,19
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	180.447.544.425,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000.000,00
A. Pendapatan Daerah. terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.348.283.830.555,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.491.768.520.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	17.024.000.000,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.698.964.972.421,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	414.280.722.633,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	129.624.977.090,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	105.413.158.411,00
2.1. Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.461.111.720.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.656.800.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	17.024.000.000,00
B. Belanja Daerah. terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	**Rp.**	**4.799.148.334.742,19**
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.592.082.354.458,16
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.880.966.819.215,03
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	1.500.000.000,00
1.4 Belanja Hibah	Rp.	324.468.713.569,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp.	130.447.500,00
2. Belanja Modal	**Rp.**	**888.781.649.472,00**
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	2.478.117.620,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	260.179.094.536,00
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	253.527.919.183,00
2.4 Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi	Rp.	331.752.243.530,00
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	40.826.174.603,00
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	18.100.000,00
3 Belanja Tidak Terduga	**Rp.**	**13.237.887.909,00**
Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.237.887.909,00
4 Belanja Transfer	**Rp.**	**1.316.356.022.857,00**
4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp.	1.268.709.922.857,00
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	47.646.100.000,00

C. **Pembiayaan Daerah terdiri dari :**

1. Penerimaan	**Rp.**	**180.447.544.425,19**
SILPA	Rp.	180.447.544.425,19
2. Pengeluaran		**20.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	Rp.	20.000.000.000,00
- Bank Nagari	Rp.	20.000.000.000,00

Padang, 19 Agustus 2024,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal	:	Senin / 19 Agustus 2024
Pukul	:	14.00 Wib
Tempat	:	Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	:	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.
Pimpinan Rapat	:	Supardi, SH
Pimpinan DPRD	:	H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed
	:	H. Suwirpen Suib, S.Sos
Notulis	:	Fadhil Rifki Albisri, S.STP
Jumlah Anggota	:	65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi Partai Gerindra	:	14 Orang
2. Fraksi PKS	:	10 Orang
3. Fraksi Partai Demokrat	:	10 Orang
4. Fraksi PAN	:	10 Orang
5. Fraksi Partai Golkar	:	8 Orang
6. Fraksi PPP- NasDem	:	7 Orang
7. Fraksi PDI-P dan PKB	:	6 Orang

Hadir : Anggota DPRD yang hadir terdiri dari :

1. Ismunandi Syofyan, SE
2. Muchlis Yusuf Abit, ST, MM
3. H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Pt
4. Mario Syah Johan
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Jempol
7. Desrio Putra, ST
8. Mesra
9. Evi Yandri Rajo Budiman
10. Khairuddin Simanjuntak
11. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
12. H. Mochklasin, S.Si
13. H. Muhammad Ridwan, S.IP
14. H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP
15. Budiman Dt. Malano Garang, S.Ag, MM
16. Drs. H. Asra Faber, MM
17. Rafdinal, SH
18. M. Ihpan
19. Ali Tanjung, SH
20. Suharjono
21. Hj. Aida, SH
22. Jefri Masrul, SE
23. H. M. Nurnas, ST
24. Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA
25. H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa, MM
26. Muhayatul, SE, M.Si
27. H. Maigus Nasir, S.Pd
28. Daswanto, SE

29. H. Dody Delvi, SE
30. H. Muzli M. Nur, S.Pd
31. Hj. Artati, SH, MH
32. H. Bukhari Dt. Tuo, SE
33. Zulkenedi Said, S.Sos, SH, M.Si, MM
34. DR. Hardinalis Kobal, SE, MM
35. Zarfi Deson, SH
36. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
37. Lazuardi Erman
38. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM
39. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
40. Sawal Dt. Putih, SH
41. Imral Adenansi, SH, MH
42. Bakri Bakar, SH
43. H. Taufik Syahrial

Eksekutif : Gubernur Sumatera Barat
Asisten III Setda Provinsi Sumatera Barat
Inspektorat
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
Dinas Perkimtan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
Dinas Pangan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pendidikan
Dinas Satpol PP
Dinas Perhubungan
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Dinas ESDM
Dinas Sosial
Dinas Kominfo dan Statistik
Dinas Kebudayaan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kesbangpol
Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar
Biro Kesra Setda Provinsi Sumbar
Biro Umum Setda Provinsi Sumbar
RSUD M. Natsir Solok
RSUD Pariaman

BUMD PT. Jamkrida Sumbar
PT. Grafika Jaya Sumbar

Turut Hadir : A. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

JALANNYA RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat
Yth. Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth. Sdr. Pimpinan PT. Bank Nagari, Pimpinan BUMD
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Yth. Rekan-rekan Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.
Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024, dengan Agenda Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;
Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Juli 2024, pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024, diagendakan 2 (dua) rapat paripurna, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan rapat paripurna dalam rangka penetapan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berhubung belum keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan, maka penetapannya belum dapat dilakukan pada rapat paripurna ini dan akan diagendakan nanti kembali setelah keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pada hari ini kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada rapat paripurna tanggal 27 Juli 2924 yang lalu, DPRD bersama Gubernur Sumatera Barat telah menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Menindaklanjuti Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 yang disepakati tersebut, pada rapat paripurna tanggal 31 Juli 2024 yang lalu, Saudara Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati, proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, belum kredibel oleh karena target pendapatan yang diusulkan masih bersifat tentatif dan baru sebatas upaya untuk menyeimbangkan alokasi belanja yang dibutuhkan.

Kondisi ini disebabkan, oleh karena target pendapatan yang diusulkan pada APBD Tahun 2024 awal diprediksi tidak tercapai dan SILPA dari APBD Tahun 2023 juga tidak sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan kebutuhan belanja justru bertambah, oleh karena cukup banyak kegiatan yang bersifat mandatory, sisa DAK, sisa BOS dan hutang bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang harus dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Kondisi yang terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, sebelumnya juga terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023. Ini menunjukan, bahwa pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, efektif dan efisien. Permasalahan ini, perlu menjadi perhatian dan catatan dari Pemerintah Daerah, agar penyusunan APBD berkualitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Memperhatikan kondisi yang terdapat dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka pembahasan lebih difokuskan pada upaya-upaya untuk menjadikan Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi lebih kredibel, berimbang antara pendapatan dan belanja, efektif dan tepat guna. Kondisi pembahasan tersebut, tentu berdampak sedikit banyaknya teradap kualitas Perubahan APBD Tahun 2024.

Meskipun dalam pembahasan terdapat peningkatan target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD, akan tetapi masih cukup untuk menjadikan neraca Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi berimbang. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan rasionalisasi, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak, kegiatan yang realisasinya masih rendah serta kegiatan pendukung seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan dan perawatan rutin serta kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pencapaian target kinerja RPJMD.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dan diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada siang hari ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada Rapat Paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD. Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD yang sekaligus merupakan Sekretaris Badan Anggaran kami persilahkan untuk membacakan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 (dibacakan oleh Sekretaris DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut ?

Setuju (sahutan hadirin sidang Paripurna) ..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB (dibacakan oleh Sekretaris DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Setuju (sahutan hadirin sidang Paripurna) ..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD dan penandatangani Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 17/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka dilanjutkan dengan penandatangani Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan.

.....

Penandatangani Nota Persetujuan Bersama

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan dan ditanda tanganinya Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka acara rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur , kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur terhadap Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi we Barakatuh.

1. Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Yth. Rekan-rekan Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
3. Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Opd, Biro, Rsd, Dan Bumd Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Yth. Rekan-Rekan Pers Media Cetak dan Elektronik serta Hadirin yang terhormat.

Alhamdulillah, sega

la puji dan syukur senantiasa kita sembahkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat menyelesaikan proses pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Shalawat dan salam bagi junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan bagi umat manusia untuk keselamatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dan DPRD telah melaksanakan proses dan tahapan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dimana pada tahapan sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 120-155/GSB-2024 dan Nomor 120-8-2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan Nomor 120-156/Gsb-2024 dan Nomor 120-9-2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Pada tahapan berikutnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan ABPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Di tengah keterbatasan fiskal yang kita alami saat ini kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini serta untuk kebutuhan lainnya yang bersifat strategis, sehingga kebutuhan tersebut tetap dapat kita penuhi.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan perhatian dalam proses pembahasan dan persetujuan prinsip yang telah diberikan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 27 Juli 2024 yang lalu yang menjadi acuan kita dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini.

Dari berbagai tahapan persidangan yang telah diselenggarakan, mulai dari tahapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sampai tahapan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024 hari ini, kita telah berusaha untuk senantiasa menggunakan prinsip- prinsip penganggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu efisien, efektif, disiplin, transparan dan akuntabel serta kewajaran dan kepatutan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Gambaran umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan, total Perubahan APBD sebesar 7,037 triliun rupiah mengalami kenaikan 199,503 miliar rupiah dari APBD awal sebesar sebesar 6,838 triliun rupiah. Kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat mengalami defisit sebesar 160,447 miliar rupiah yang merupakan selisih belanja daerah dan pendapatan daerah. Defisit tersebut sesuai ketentuan ditutupi dengan Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud bersumber dari Silpa tahun sebelumnya sebesar 180,447 miliar rupiah yang merupakan hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2023.

Jumlah Silpa sebagaimana dimaksud, didalamnya terdapat Silpa Earmark yang berasal dari Dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, sisa Dana Bos, sisa Dana Bantuan Keuangan Kab/Kota, dan sisa BLUD. Disamping hal tersebut juga terdapat kegiatan tahun 2023 yang penyelesainnya lewat tahun anggaran dan dianggarkan kembali pada tahun 2024, utang belanja/ pekerjaan yang harus dibayarkan pada tahun 2024, pekerjaan yang sudah ada berita acara serah terima (bast) tetapi belum dibayarkan pada tahun 2023 serta utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/ Kota yang harus dibayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: total Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 6,857 triliun rupiah, Belanja Daerah sebesar 7,017 triliun rupiah, defisit sebesar 160,447 miliar rupiah, dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.

   Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 6,857 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 4,11% dari APBD awal sebesar 6,586 triliun rupiah. sumber pendapatan tersebut terdiri dari :

   - Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar 3,348 triliun rupiah naik sebesar 7,38% atau sebesar 230,041 miliar rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah.

- Pendapatan Transfer yang dalam APBD 2024 awal ditargetkan sebesar 3,451 triliun rupiah, pada Perubahan APBD 2024 ini naik sebesar 1,17% atau sebesar 40,458 miliar rupiah sehingga menjadi 3,491 triliun rupiah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah hal. 10 dari 15 ditargetkan sebesar 17,024 miliar rupiah pada APBD awal tidak mengalami kenaikan sehingga tetap sebesar 17,024 miliar rupiah pada Rancangan Perubahan APBD.

b. Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, direncanakan sebesar 7,017 triliun rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 119,503 miliar rupiah atau naik sebesar 2,93% dari Belanja Daerah pada APBD awal sebesar 6,818 triliun rupiah. Total belanja tersebut dapat dirinci menurut kelompok belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, sebesar 4,800 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD awal sebesar 4,686 triliun rupiah.
2. Belanja Modal pada Perubahan APBD direncanakan sebesar 881,594 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 12,62% atau sebesar 98,801 miliar rupiah dari anggaran pada APBD awal sebesar 782,793 miliar rupiah.
3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 18,820 miliar rupiah, turun sekitar 59,91% atau sebesar 28,112 miliar rupiah dari yang dianggarkan pada APBD awal sebesar 46,942 miliar rupiah.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar 1,316 triliun rupiah, naik 1,17% atau sebesar 15,215 miliar rupiah dari APBD awal sebesar 1,301 triliun rupiah.

c. Pembiayaan Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang telah disepakati, penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun lalu, atau tahun 2023, sebesar 180,447 miliar rupiah, sesuai dengan audit BPK RI atas LKPD tahun 2023, sehingga terjadi penurunan sebesar 70,996 miliar rupiah atau turun sebesar 28,24% dari APBD awal sebesar 251,444 miliar rupiah.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Setelah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 tahapan lagi yang harus kita lalui, **Pertama** Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah kita setujui bersama sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, **kedua** kita harus menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan **ketiga** menyusun DPPA-SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Kita sudah berupaya dengan segala daya, dan dengan segala kemampuan yang ada untuk memacu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan, namun tentu masih ada hal-hal yang belum dapat kita penuhi. Keadaan demikian disebabkan karena sumber-sumber dana yang terbatas dibandingkan dengan tanggungjawab dan tugas Pemerintah Daerah yang semakin kompleks, juga karena meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat terutama sekali dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Saran, masukan dan kritikan dari Fraksi-Fraksi DPRD yang telah disampaikan, semaksimal mungkin telah kita akomodir dan kita sempurnakan walapun belum memenuhi seluruh keinginan yang telah disampaikan tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa rangkaian persidangan yang telah dilaksanakan sampai dilahirkannya Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini tentunya menguras energi dan fikiran kita bersama sebagai wujud tanggungjawab kita dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas terjalinnya kerjasama yang baik selama ini. semoga niat ikhlas dan ikhtiar kita ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat sumatera barat, serta memperoleh ridha dan berkah hendaknya dari Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamith tharik, fastabikhul khairat, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pendapat Akhir/sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Bersama, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang sudah kita sepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi, sehingga realisasinya dapat pula segara dilaksanakan. Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2024 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2024 ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, merupakan pembahasan anggaran terakhir yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 bersama dengan

Pemerintah Daerah. Kami menyadari, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat.

Masih banyak aspirasi yang disampaikan oleh konstituen, baik dari pelaksanaan reses maupun yang disampaikan langsung kepada Lembaga yang belum dapat kami perjuangkan. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh kesengajaan, akan tetapi banyak permasalahan yang menyebabkan belum terakmodirnya aspirasi tersebut, seperti kewenangan, keterbatasan fiskal serta belum sejalannya usulan dengan program prioritas daerah.

Untuk itu, dari hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tersebut. Selanjutnya, kepada Pemerintah Daerah, TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga menyampaikan permohonan maaf, oleh karena dalam pembahasan, baik ditingkat komisi maupun ditingkat Badan Anggaran, tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan bahkan sering terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa perbedaan dan pertentangan yang terjadi tersebut, semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas hasil pembahasan, agar terwujud APBD yang kredibel, akuntabel, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada sore hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD, TAPD dan OPD-OPD yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.

Selanjutnya, kami menyampaikan juga permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan pembahasan dan pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan membacakan "Alhamdulillahirabbil'alamiin" Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih Wabillahi taufiq walhidayah Wass. Wr. Wb

Pimpinan Rapat,	Sekretaris DPRD,	Pembuat Risalah,
SUPARDI, SH	**H. RAFLIS, SH, MM**	**FADHIL RIFKI ALBISRI, S.STP**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN BERSAMA TAPD
TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
SENIN, 19 AGUSTUS 2024

ASSALAM'MUALAIKUM WR.WB

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-NYA kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Shalawat beriring salam, kita sampaikan juga kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW, dengan Al-quran dan Hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat nanti.

Sehubungan dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

   Dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 2024 telah menyampaikan kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

2. Landasan Hukum Pembahasan :

   Landasan hukum dari pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
d. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.

3. Maksud dan Tujuan Pembahasan :

Adapun maksud dan tujuan dari pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah :

a. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan dan realisasi belanja daerah yang direncanakan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024.
b. Memaksimalkan dukungan APBD terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

B. GAMBARAN UMUM RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang Perubahan APBD, disusun dengan mengacu kepada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah sesuai dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang disepakati oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, diusulkan sebesar Rp. 6.877.451.649.287,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.394.020.579.887,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.453.560.167.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 29.870.902.400,00.
2. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.726.959.003.178,19, belanja modal diusulkan sebesar Rp. 863.499.721.336,00 belanja Tidak Terduga diusulkan sebesar Rp. 29.333.160.569,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.418.107.308.629,00.
3. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 180.447.544.425,19 dan pengeluaraan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 yang digunakan untuk tambahan penyertaaan. Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Nagari.

Dari rencana pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, masih dalam bersifat tentatif baik terhadap pendapatan maupun belanja dalam upapa menyeimbangkan negara pada Perubahan APBD Tahun 2024.

C. HASIL PEMBAHASAN

Target pendapatan daerah dan belanja daerah yang yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.877.451.649.287,00 dan rencana alokasi belanja daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19 belum lagi merupakan target dan alokasi rill, tetapi masih merupakan target tentatif yang perlu di dalami Kembali dalam pembahasan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka fokus pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini adalah menghitung kembali target pendapatan rill dan/atau merasionalisasi kembali belanja dalam rangka mem-balancekan dan menutup defisit rill yang terdapat pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

1. Pendapatan Daerah.

   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

      Target PAD yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.394.020.579.887,00 atau naik sebesar Rp. 275.778.528.987,00 dari target yang terdapat pada APBD awal yaitu sebesar Rp. 3.118.242.050.900,00 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 2.771.051.095.473,00 Restribusi Daerah sebesar Rp. 398.745.170.924,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan sebesar Rp. 129.624.977.090,00 dan Lain-Lain PAD Yang sah sebesar Rp. 94.656.800.000,00.

      Oleh karena target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, masih merupakan target tentatatif yang perlu di dalami kembali, maka Badan Anggaran dan TAPD sekapakat untuk mendalami kembali untuk dapat menentukan target yang betul-betul dapat diwujudkan, sehingga tidak berdampak terhadap terjadinya gagal bayar, oleh karena target penerimaan tidak tercapai.
      Dari pembahasan dan pendalaman kembali yang dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD dengan memperhatikan realisasi sampai bulan Agustus 2024 dan target yang mungkin dapat dicapai, maka disepakati target PAD pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.348.283.830.555,00 atau berkurang sebesar 45.736.749.332,00 dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut, 1) Pajak Daerah sebesar Rp. 2.698.964.972.421,00 retribusi daerah sebesar Rp. 414.280.722.633,00 Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (deviden BUMD) sebesar Rp. 129.624.977.090,00 dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp. 105.413.158.411,00.

      Target yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 230.041.779.655,00.

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.453.560.167.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dari target yang terdapat pada APBD Tahun 2024 awal yaitu sebesar Rp. 3.451.310.167.000,00. Dari pembahasan yang dilakukan, terdapat tambahan penerimaan dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 38.208.353.000,00 sehingga target Pendapatan Transfer yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.491.768.520.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 40.458.353.000,00 dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 awal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.870.902.400,00 atau bertambah sebesar Rp. 12.846.902.400,00 dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 awal yaitu sebesar Rp. 17.024.000.000,00.

Dari pembahasan yang dilakukan serta memperhatikan potensi yang betul-betul mungkin dapat diwujudkan, maka target yang paling rasional untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sama dengan target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 awal yaitu sebesar Rp. 17.024.000.000,00. Dengan demikian, target penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2024 tidak ada kenaikan sebagaimana yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Dengan ada tambahan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer tersebut, maka proyeksi pendapatan daerah yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.857.076.350.555,00 dengan rincian PAD sebesar Rp. 3.348.283.830.555,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.491.768.520.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 17.024.000.000,00.

Terkait dengan target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait untuk bersungguh-sungguh dan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan, agar permasalahan seperti Tahun 2023 dimana realisasi pendapatan tidak tercapai, tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

2. Belanja Daerah

Pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 alokasi belanja daerah diusulkan sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19 bertambah sebesar Rp. 219.878.800.763,00 dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 4.726.959.003.178,00 belanja modal sebesar Rp. 863.499.721.336,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 29.333.160.569,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.418.107.308.629,00.

Penambahan alokasi belanja pada Perubahan APBD Tahun 2024 lebih banyak disebabkan oleh karena ada kewajiban pengalokasian belanja tersebut pada Perubahan APBD, baik dari sisa belanja DAK, BOS, hutang kepada pihak ketiga serta hutang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota serta untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, oleh karena ini merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anggota DPRD kepada konstituennya di akhir masa jabatan nanti.

Memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2204, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD, disepakati alokasi belanja daerah yang akan ditampung nanti pada Perubahan APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.017.523.894.980,19 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 4.799.148.334.742,19 Belanja Modal sebesar Rp. 888.781.649.472,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 13.237.887.909,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.316.356.022.857,00

Alokasi belanja daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, lebih besar Rp. 199.503.502.031,19 dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal. Terkait dengan alokasi belanja daerah tersebut, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terakit, harus lebih sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024.
b. Segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran terutama kegiatan yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024, dalam upaya meminimalkan kegiatan yang tidak tuntas dan diberikan perpanjang waktu pelaksanannya.
c. Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya nanti.

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD Tahun sebelumnya yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 180.447.544.425,19 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 untuk tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari. Dari hasil pembahasan, komposisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut tidak mengalami perubahan dan untuk penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD tahun sbeelumnya sudah sesuai dengan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

4. Komposisi Perubahan APBD Tahun 2024.

Dari hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, maka diperoleh komposisi Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		sebesar	Rp. 6.857.076.350.555,00
- PAD	sebesar	Rp.	3.348.283.830.555,00
- Pendapatan Transfer	sebesar	Rp.	3.491.768.520.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Sah	sebesar	Rp.	17.024.000.000,00
b. Belanja Daerah		sebesar	Rp. 7.017.523.894.980,19
- Belanja Operasi	sebesar	Rp.	4.799.148.334.742,19
- Belanja Modal	sebesar	Rp.	888.781.649.472,00
- Belanja Tidak Terduga	sebesar	Rp.	13.237.887.909,00
- Belanja Transfer	sebesar	Rp.	1.316.356.022.857,00
c. Pembiayaan Daerah			
- Penerimaan Pembiayaan	sebesar	Rp.	180.447.544.425,19
- Pengeluaran Pembiayaan	sebesar	Rp.	20.000.000.000,00

D. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, merupakan satu kesatuan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Dari pendapat akhir yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dapat disimpulkan bahwa semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna. Selanjutnya, Fraksi-Fraksi juga memberikan beberapa catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk memaksimalkan penerimaan dari pendapatan daerah terutama dari PAD, agar terwujud APBD yang akuntabel, sehat, kredibel, efektif, efisien dan berimbang dan mengantisipasi terjadinya gagal bayar di akhir tahun anggaran.
2. Mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran terutama kegiatan dan anggaran yang diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar realisasinya dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun anggaran.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024, untuk dilaksanakan dengan maksimal oleh karena merupakan aspirasi dan usulan dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang telah memberikan amanahnya untuk mewakili di lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat ini.
4. Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan APBD terakhir dalam pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2024. Oleh sebab itu, program dan kegiatan unggulan yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2024, harus mendapat prioritas oleh masing-masing OPD terkait.

E. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan, hasil pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini, dapat disepakati pada Rapat Paripurna ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Padang, 19 Agustus 2024

BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT,

KETUA,	SEKRETARIS,
SUPARDI, SH.	H. RAFLIS, SH. MM

FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

GERINDRA

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA TENTANG RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir DPRD Provinsi Sumatera Barat

Senin, 19 Agustus 2024

Juru Bicara : .....

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota TAPD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Peserta Rapat Kerja Pembahasan Akhir yang kami muliakan

Alhamdulilahirabbil a'lamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua, pada rapat hari ini, dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan TAPD Terhadap RAPBD Perubahan TAHUN 2024.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.ig

Bapak Ibu Hadirin yang Berbahagia,

Setelah menelaah jawaban Sudara Gubernur dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan Ranperda tentang APBD Perubahan 2024, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut;

1. Fraksi Partai Gerindra sungguh mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Banggar bersama TAPD dalam upaya mem-*balance*-kan keuangan daerah. Namun, tetap saja, keseimbangan seperti yang diharapkan belum bisa terwujud, karena kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Fraksi Partai Gerindra berharap, kondisi seperti ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada era baru pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mendatang.

2. Fraksi Partai Gerindra meminta agar kedepan proyeksi dan capaian Pendapatan Daerah bisa disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD. Tahun 2024 ini di RPJMD tertulis angka proyeksi diatas Rp 7 Triliun, namun kita belum bisa mencapai target itu.

3. Salah satu tumpuan dan sumber pendapatan daerah kita adalah dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Fraksi Partai Gerindra berharap ada langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak. Kami berpandangan bahwa para Wajib Pajak adalah pahlawan sesungguhnya dalam menggerakkan ekonomi daerah. Karena, dengan kesadaran mereka membayar setiap pajak, maka pembangunan daerah bisa bergerak. Dengan demikian, maka sudah seharusnya para wajib pajak ini mendapat pelayanan yang baik. Jangan sampai, mereka malah dibuat

stress dengan layanan yang berbelit-belit saat hendak menunaikan kewajiban.

4. Fraksi Gerindra melihat masih banyak hal yang belum sesuai dengan terget-target penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Kami sudah berulang kali memberikan catatan-catatan tersebut, namun belum belum ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
5. Fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov agar berkoordinasi dengan Jasa Raharja dan pihak kepolisian untuk merumuskan bentuk pelayanan yang simpel, mudah dan cepat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor ataupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN-KB ini. Jika sistem dan aplikanya sudah ada, kiranya itu bisa dimanfaatkan lebih massif dan intensif, sehingga pada gilirannya akan membawa perubahan siginifikan disisi penerimaan daerah.
6. Pemprov harus memastikan tidak terjadi belanja Dinas yang dipaksakan untuk dihabiskan atau akan terjadi SILPA yang besar pada akhir Tahun Anggaran. Besarnya SILPA anggaran tentu akan menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena APBD masih menjadi pendorong utama perekonomian daerah.
7. Fraksi Partai Gerindra berharap. saat kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik seperti ini, kita semua, terutama pimpinan OPD, bisa meningkatkan kinerja dengan baik. Lebih sungguh-sungguh dan bekerja dengan hati.
8. Perlu ada evauasi dan tindakan menyeluruh terhadap OPD yang realisasi anggarannya jauh dibawah target yang diharapkan, karena berpotensi bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Sebaliknya, jika ada yang tinggi realisasi pendapatan dan belanjanya, perlu diberikan reward khusus.

9. Terakhir, Fraksi Partai Gerindra berharap Saudara Gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan realisasi anggaran. Hal ini penting, karena di lapangan masih ditemui adanya proses pelelangan yang lambat yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kami minta ini jadi perhatian dan jadi bahan evaluasi.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Gerindra terhadap RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Setelah melihat semua struktur APBD Perubahan tahun 2023 ini, maka dengan mengucapkan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, Fraksi Gerindra menyatakan **BERSETUJU** jika Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun 2024 ini dijadikan PERATURAN DAERAH, dengan catatan untuk segera dilaksanakan

Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua		Sekretaris
H. HIDAYAT, S.S, M.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROV. SUMBAR	NURKHALS DT.BIJO DIRAJO, S.Pt

Penasihat:

Supardi

Anggota:

1. Desrio Putra
2. Evi Yandri Rajo Budiman
3. Ismunandi Syofyan, SE
4. Jasma Juni Dt.Gadang, SE
5. Jempol
6. Khairuddin Simanjuntak
7. Mario Syahjohan
8. Mesra
9. Mukhlis Yusuf Abit, ST,M.M
10. Drs.H.Syafruddin Putra Dt.Sungono, M.Si
11. Hj.Yunisra Syahiran, S.Pd

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PKS
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor,Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah *Azza wa Jalla Tuhan Yang Maha Esa,* kita memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin ya rabbal 'alamin...*

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PKS
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Alhamdulillah Ranperda Perubahan 2024 telah sampai pada tahap penyampaian akhir fraksi. Tahun 2024 Sumatera Barat dilanda dengan berbagai macam bencana, sehingga Pemerintah dan DPRD harus menyusunulang kembali anggaran yang telah disepakati 2024. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berterimakasih kepada banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan 2024. Kami berharap pendapat akhir fraksi ini menjadi masukan dan penyempurnaan terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Masa periodesasi anggota DPRD Sumatera Barat 2019-2024 telah mencapai ujung masa jabatan, perubahan APBD 2024 ini merupakan pembahasan anggaran terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumbar masa jbatan 2019-2024. Alhamdulillah perubahan APBD 2024 telah selesai dilaksanakan, semoga anggaran perubahan 2024 ini dapat menunjang pembangunan Sumatera Barat yang lebih baik.

APBD Perubahan 2024 ini sebagai bentuk optimalisasi dukungan APBD terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Maka dari itu perubahan APBD ini harus benar-benar dibahas komprehensif harus terdapat balance antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga tidak terjadi kemudian gagal bayar akibat dari belanja yang tidak diperhitungkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang Perubahan APBD, disusun dengan mengacu kepada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD. Setelah membaca laporan hasil pembahasan APBD Perubahan 2024 dapat dilihat bahwa Target pendapatan daerah dan belanja daerah yang yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun

2024 sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- dan rencana alokasi belanja daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19.

Besarnya belanja yang ditargetkan dari pada pendapatan maka tidak terdapatnya check and balances terhadap pendapatan dan belanja. Jangan sampai dikemudian hari terjadinya gagal bayar, oleh karena target penerimaan tidak tercapai. Maka harus dikoreksi apabila menemukan kejanggalan dalam menetapkan target tersebut yang nantinya akan berdampak kepada anggaran daerah.

Setelah mengikuti pembahasan, membaca dan mendiskusikan laporan akhir pembahasan perubahan APBD tahun 2024, maka fraksi partai keadilan sejahtera Provinsi Sumatera Barat memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Target PAD yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.394.020.579.887,- atau naik sebesar Rp. 275.778.528.987, Setelah dilakukan pendalaman kembali oleh banggar bersama TAPD disepakati target PAD pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.348.283.830.555,-. atau berkurang sebesar 45.736.749.332,- dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Fraksi PKS sepakat dengan target tersebut setelah melihat realisasi yang sudah dikakukan, akan tetapi tidak kemungkinan bahwa pendapatan tersebut akan naik, sehingga butuh kinerja yang maksimal pemerintah dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah, terutama upaya meningkatkan deviden BUMD dan pajak.

2. Pendapatan asli daerah yang terbesar ialah pada sektor pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.698.964.972.421 dan retribusi daerah sebesar Rp. 414.280.722.633, maka Fraksi PKS mendorong dalam pengelolaan pajak ini perlu ditingkatkan pengawasannya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi.
3. Beban belanja daerah yang diusulkan pada perubahan APBD 2024 cukup tinggi dari target yang disepakati pada APBD 2024, alokasi belanja daerah yang akan ditampung nanti pada Perubahan APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.017.523.894.980,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 4.800.252.901.089,19.- Belanja Modal sebesar Rp. 881.594.721.336,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 18.820.249.698,- dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.316.856.022.857,-. Atau naik sebesar Rp. 199.503.502.031,19. Serta adanya kegiatan yang sebelumnya belum terlaksana dan akan dilaksanakan di Perubahan 2024, Fraksi PKS meminta keseriusan Pemprov dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan jadwal pelaksanaannya, terutama dengan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi langsung dari masyarakat.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang berbahagia

Setelah mempelajari dan membahas secara seksama akhirnya kami Fraksi PKS berkesimpulan bahwa secara umum hasil pembahasan **Ranperda Perubahan APBD tahun 2024** diatas telah diselesaikan, besar harapan kami kiranya hasil keputusan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran. Untuk itu, dengan berserah diri kepada Allah SWT dan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahiim" Fraksi PKS menyatakan

menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2024 tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Aqulu Qauli Hadza, Wastaqhfirullah Li Walakum Wa afwan mingkum

ASSALAMUALAIKUM, WR, WB.

Padang, 19 Agustus 2024 M
13 Safar 1446 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Drs.H.Nurfirman Wansyah,MM,Apt
Juru Bicara

Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
Ketua

H. Muhammad Ridwan, S.IP
Sekretaris

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Disampaikan Dalam Rapat Pembahasan Akhir

Dalam Rangka Penyampian

Pendapat Akhir Fraksi :

Senin, 19 Agustus 2024

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth.Sdr. Gubernur, Atau yang mewakili

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas , Kantor dilingkup Provinsi Sumatera Barat

Yth.Sdr, Rekan-Rekan wartawan, Media Cetak dan Elektronik

Yth. Hadirin Undangan yang berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Sholawat & salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas kerja kerasnya umat manusia telah dapat keluar dari lembah jahiliyah kepada kehidupan yang ber-adab.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami dari **Fraksi Partai Demokrat**, menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada Badan Anggaran dan Tim TAPD yang telah Menyusun ranperda ini, Hasilnya sudah sama-sama kita dengar Pembacaan Laporan hasil pembahsan Badan anggaran bersama TAPD. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Demokrat**, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024, sebelum diambil keputusan di tingkat paripurna nanti.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan subtansi yang telah termuat dalam Laporan yang telah dibacakan tadi, kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menelaah terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan juga ada tambahan sesuai yang ada dalam Pendapat Akhir **Fraksi Partai Demokrat** untuk dijadikan pedoman serta catatan untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir, catatan saran dan penegasan dalam Pendapat Akhir **Fraksi Partai Demokrat** Sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan penjelasan atas Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini merupakan bagian dari proses tahapan penyusunan perubahan APBD 2024. Perubahan APBD 2024 merupakan Langkah-langkah Konstitusional yang sangat penting dalam merancang program-program Pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat tahun 2024.

2. Pada desain Pembangunan Makro ekonomi Sumatera Barat terutama target Pertumbuhan Ekonomi, target inflasi, target penurunan kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka ditengah resiko politik dan pilkada serentak. Dengan harapan Pembangunan di Sumatera Barat bisa semakin baik, bagus dan berkelanjutan.

3. Mengingat pentingnya tata kelola pencatatan Aset Daerah hal ini menyangkut kekayaan daerah yang seharusnya di inventarisasikan dengan baik jangan sampai aset-aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat masih dikuasai pihak ketiga karena kita lalai melalukan inventarisasi aset yang ada.

4. Terkait Ranperda APBD 2024 Fraksi Partai Demokrat perlu mengingatkan kita semua bahwa pembahasan APBD 2024 tentunya bukan hanya sebatas formalitas tetapi sangat penting untuk menguji sejauh mana konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, khususnya terkait pengelolaan ke uangan daerah serta bagaimana konsistensi antara data-data yang disajikan baik dalam laporan realisasi anggaran dengan posisi saldo serta neraca maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas legalitas.

5. Fraksi Partai Demokrat tetap menyuarakan aspirasi Masyarakat di 19 Kabupaten/Kota. Pada saat pembahasan APBD perubahan ini masih ada terdapat realisasi anggaran dan tingkat pelaksanaan kegiatan di beberapa OPD sangat rendah seperti dinas Perkebunan Pangan dan Holtikultura dan Perkimtan, Dalam hal ini kami meminta saudara Gubernur untuk mengevaluasi OPD tersebut.

6. Selanjutnya atas beberapa rekomendasi Badan Anggaran, pada prinsipnya kami menyepakati hal tersebut seperti perlunya optimalisasi fungsi perangkat daerah yang menghasilkan PAD melalui peningkatan kualitas SDM dan kelembagaannya agar target-target PAD dapat mendekati potensi yang sesungguhnya serta tidak mengalami kebocoran, segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran terutama kegiatan yang di usulkan pada perubahan APBD tahun 2024, dalam upaya meminimalkan kegiatan yang tidak tuntas dan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan serta melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya nanti.

7. Setelah nantinya pengesahan Ranperda APBD perubahan tahun 2024 menjdi Perda. Semua OPD sudah harus menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah tertampung di APBD tahun 2024, tidak ada lagi alasan-alasan yang membuat OPD bekerja tidak maksimal. Mudah-mudahan dengan kinerja OPD yang baik akan membuat saudara Gubernur terpilih Kembali, Amin ya rabbal alamin.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran dari Pendapat Akhir **Fraksi Partai Demokrat** terhadap :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dengan mengucapkan ***"Bismillahirahmanirahim"*** Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 tersebut dapat untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Padang, 19, Agustus 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,	Sekretaris,
ALI TANJUNG	**Hj. A I D´A, SH**

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

RAPAT KINERJA

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
SENIN, 19 AGUSTUS 2024
JURU BICARA : H. DASWANTO,SE

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yang kami hormati Saudara Sekda beserta jajaran pemerintah provinsi sumatera barat

Yang kami hormati Forkopinda sumatera barat

Para tamu undangan, rekan-rekan media pers serta segenap hadirin yang berbahagia

Bersyukur tanpa batas kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini pada rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Sumatera Barat Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2024. *Sholawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Kami menyampaikan terimakasih kepada pimpinan sidang, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi partai PAN ini. Harapan kami tentunya pendapat yang kami sampaikan akan memperkuat keputusan yang nantinya akan kita ambil bersama pada sidang paripurna ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kasih kepada Yth. Saudara Gubernur atas penyampaian Nota Keuangan maupun Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan melalui rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Anggaran, TAPD, Komisi-Komisi, dan seluruh fraksi yang telah memberikan masukan dan pendapatnya sehingga pembahasan RAPBDP tahun anggaran 2024 bisa diselesaikan dengan baik. Kita berharap semua kerja ini bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat melalui pelaksanaan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hadirin rapat dewan yang berbahagia

Di awal kesempatan ini, karena mungkin rapat paripurna ini adalah rapat paripurna terakhir bagi anggota DPRD Sumaera Barat masa bakti 2019-2024, maka kami segenap fraksi PAN DPRD Sumatera Barat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu untuk kami sampaikan pada sidang yang terhormat ini. Pertama kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 79 tahun 2024. Salam Merdeka, Nusantara Baru Indonesia Maju !. Semoga pada peringatan kemerdekaan yang sudah 79 tahun ini kita semakin kokoh sebagai bangsa dan semakin matang sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia. Harapan kami tentunya kita semua akan menjadi batu bata bagi bangunan kemakmuran segenap elemen bangsa, terutama rakyat sebagai elemen utama negara bangsa.

Hadirin Sidang Dewan yang Berbahagia...

Kedua, sekaitan dengan Pekan Olah Raga Nasional yang akan dilaksanakan bulan depan, kami berharap prestasi olah raga kita semakin baik di kancah nasional. Kami mengucapkan selamat bertanding dengan persiapan maksimal kepada para atlet ranah minang yang akan berlaga. Dengan dukungan anggaran di APBDP yang sudah kita perjuangkan ini, harapan kita tentunya keikutsertaan kita di PON nanti bisa membuat berbagai perbaikan yang eksponensial dalam prestasi olah raga sumatera barat. Mari jaga semangat dan energi kebaikan kita untuk sama sama mempersembahkan yang terbaik.

Sidang dewan yang berbahagia...

Di samping itu, pada forum yang mulia ini, izinkan kami fraksi PAN menyampaikan rasa terimakasih kami kepada seluruh pihak yang sudah bekerjasama dengan kami selama periode bakti DPRD ini. Kami berterimakasih kepada gubernur dan wakil gubernur beserta jajaran pemerintah provinsi Sumatera Barat, serta anggota DPRD lintas fraksi, yang dengan segala dinamikanya sudah menjadi mitra terbaik bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan daerah ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kami kepada jajaran forkopinda Sumatera Barat, insan Pers, NGO dan masyarakat Sumatera Barat yang dalam masa bakti 2019-2024 ini

telah membantu dan mendukung kami untuk menunaikan segala tugas dan fungsi kami di DPRD Sumatera Barat.

Di samping itu tentunya kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam berinteraksi menjalankan amanah selama ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa banyak salah kekurangan kami dalam menunaikan amanat konstitusi ini. Kami mendoakan agar kita semua selalu dibimbing oleh Allah Yang Maha Kuasa, dijadikan semua bakti kita selama ini sebagai amal shaleh di sisiNYA. Kami Fraksi dan keluarga besar PAN Sumatera Barat tentunya berharap dan terus membuka jalan untuk kita bekerja sama dalam hal yang bisa kita sepakati demi keberlanjutan pembangunan Ranah Minang yang sama-sama kita cintai ini.

Rapat Dewan yang berbahagia

Prinsip-prinsip penyusunan RAPBDP tahun anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024, tentu menegaskan kepada kita semua bahwa penyusunan APBDP ini harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, tapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat. Ketaatan waktu, ketaatan hukum, dan keberpihakan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses penyusunan RAPBDP tahun anggaran 2024 ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

RAPBDP 2024 ini adalah RAPBD yang kita rancang untuk beradaptasi dengan kondisi ril di lapangan setelah sebagian besar wilayah Sumatera Barat dihantam berbagai bencana beberapa waktu lalu. Kita patut bersyukur tentunya, walau kita ditimpa berbagai bencana yang membuat kita mesti mengalihkan lagi fokus dan prioritas belanja kita, indikator pertumbuhan ekonomi kita memperlihatkan tanda-tanda yang masih positif. Apalagi kalau kita cermati dari sisi pemerataannya. Harapan kami fraksi PAN adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini terus diupayakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah dan para petani sebagai kompenen terbesar dari masyarakat sumatera barat.

Rapat Dewan Yang terhormat,

Setelah mengikuti dan mencermati proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2024 ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita mengalami defisit anggaran cukup besar dikarenakan berbagai hal. Maka dalam hal ini kita sama-sama sudah melakukan rasionalisasi, efesiensi dan fixsasi program prioritas. Maka pada tahap akhir pengesahan ini kami dari Fraksi PAN hanya menyampaikan beberapa catatan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan persetujuan dalam pendapat akhir ini.

Pertama, kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk memaksimalkan waktu dan sumber daya yang ada agar target pendapatan yang disepakati dalam pembahasan APBDP ini bisa terlampaui realisasinya. Sehingga rencana belanja bisa dieksekusi sesuai target dan kita bisa menutup keuangan dalam kondisi keuangan yang stabil. Apalagi dalam hal PAD, jika tidak tercapai lagi, maka hal ini akan sangat mengganggu belanja program bagi masyarakat kita.

Kedua, dalam hal belanja, dikarenakan saat ini kita sudah memasuki proses Pilkada yang juga menyedot anggaran daerah yang tidak sedikit, harapan kami tentunya pemerintah provinsi bisa lebih selektif dan akurat dalam menentukan kegiatan dari program-program yang sudah disepakati sembari memaksimalkan dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Terutama program unggulan gubernur, tentu membutuhkan kreatifitas aparatur yang lebih tinggi agar dalam situasi yang sulit, waktu yang singkat, program tetap berjalan dan memberi dampak optimal bagi masyarakat. Kami tidak menginginkan nantinya alasan defisit anggaran membuat target-target prioritas program tidak bisa diujudkan dengan baik.

Ketiga, dalam hal pembiayaan, harapan kami adalah bagaimana ke depan pemerintah provinsi bisa mendapatkan sumber-sumber yang lebih banyak dan jumlah yang lebih besar, terutama mendorong BUMD untuk bisa berkontribusi. Kami mengingatkan agar pembiayaan ini dapat dianalisa lebih cermat dan dieksekusi lebih kuat, agar capaiannya melebihi dari apa yang kita rencanakan dan bukan sebaliknya, malah minus realisasi yang akan membuat kita semakin kesulitan dalam mengelola anggaran, terutama belanja.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan hasil pembahasan sesuai tahapan serta beberapa catatan diatas, maka dengan mengucapkan ***bismillahirrahmanirrahim,*** **Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda.**

Selanjutnya dari apa yang telah disepakati, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	**Rp. 6.857.076.350.555,-**
Belanja	**Rp. 7.017.523.894.980,-**
Pembiayaan	**Rp. 160.447.544.425,19**

Demikianlah pendapat Akhir Fraksi Partai PAN atas Penetapan Ranperda tentang RAPBDP Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024. Semoga APBDP 2024 nantinya bisa dijalankan sebaik-baiknya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Sumatera Barat bangkit di berbagai bidang. Atas kesalahan, semua sikap dan kata yang tidak berkenan selama pembahasan hingga pendapat akhir ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.

Billahitaufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Padang, 19 Agustus 2024

Fraksi PAN DPRD Sumatera Barat

FRAKSI PAN DPRD SUMBAR

Muhayatul, SE, MSi.	**H. Daswanto, SE**
Ketua	**Sekretaris**

H. INDRA DT RAJO LELO,SH,MM	:	PENASEHAT FRAKSI
H. MAIGUS NASIR, S.Pd	:	WAKIL KETUA FRAKSI
H.DASWANTO,SE	:	SEKRETARIS FRAKSI
H. DODY DELVY,SE	:	BENDAHARA FRAKSI
H. MUZLI M. NUR, S.Pd	:	ANGGOTA FRAKSI
H. AHMAD RIUS,SH	:	ANGGOTA FRAKSI
H. BUKHARI DT TUO, SE	:	ANGGOTA FRAKSI
MUHAMMAD IKHEAL.SE	:	ANGGOTA FRAKSI
Hj. ARTATI, SH.MH	:	ANGGOTA FRAKSI

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG
PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA
SENIN, 19 AGUSTUS 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten. Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur ,Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi pada Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat ini.

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Badan Anggaran DPRD yang telah dapat merampungkan hasil pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Sebelum kami menyampaikan keputusan Fraksi Partai Golkar , izinkan kami menyampaikan pendapat dan saran terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, sebagai berikut :

1. Mencermati kepada hasil pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap struktur Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang terdiri dari :
   a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.857.076.350.555., terdiri dari :
      - PAD sebesar Rp.3.348.283.830.555,-
      - Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.491.768.520.000,-
      - Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 17.024.000.000,-

   b. Belanja Daerah sebesar Rp.7.017.523.894.980. 19,- terdiri dari :
      - Belanja Operasi sebesar Rp.4.800.252.901.089,19,-
      - Belanja modal sebesar Rp. 881.594.721.336,-
      - Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 18.820.249.698,-
      - Belanja Transfer sebesar Rp.1.316.856.022.857,-

   c. **Defisit** **Rp.160.447.544.425,19,-**

   d. Pembiayaan Daerah
      - Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.180.447.544.425,19,-
      - Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,-

      - **Pembiayaan netto sebesar** **Rp.160.447.544.425,19.-**

   Dari struktur Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersebut diatas pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar berpendapat karena sudah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot serta sudah optimal, maka pada prinsipnya dapat menyetujui.

2. Berdasarkan catatan dari Fraksi Partai Golkar penyampaian pendapat akhir fraksi kali ini termasuk yang tercepat, insya Allah hari ini juga akan dilakukan Rapat Paripurna untuk penetapan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Maka dari itu kami dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada seluruh Kepala SKPD untuk segera menindak lanjuti pelaksanaan dari Perubahan APBD Tahun 2024, sehingga percepatan yang kita lakukan ini tidak berlalu tanpa realisasi yang memuaskan baik dari segi pendapatan maupun dari segi belanja.

3. Dan kepada SKPD yang mendapat penambahan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2024 ini, baik yang bersumber dari pergeseran antar SKPD maupun yang bersumber dari penambahan murni, kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk segera mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatannya. Sangat kecewa kita rasanya dimana penambahan anggaran terjadi tetapi diakhir tahun anggaran menimbulkan SILPA yang besar.

4. Kami dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Sekda selaku Ketua TAPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Kepala SKPD yang sisa anggarannya masih cukup banyak sampai dengan bulan agustus tahun 2024 ini , sehinga pada tahun 2024 pelaksanaan anggaran yang efektif dan produktif dapat kita wujudkan di Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Akhir kata kami dari Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim " **dapat menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 **untuk ditetapkan** menjadi **Peraturan Daerah** Provinsi Sumatera Barat, dengan catatan semua yang telah disepakati dalam pembahasan oleh Banggar DPRD bersama TAPD dan penyampaian pendapat akhir fraksi hendaknya dilampirkan sebagai bahan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 .

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya.
Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi Taufik Walhidayah
Assalamualaikum ww

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Padang, 27 Juli 2024

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua	**Sekretaris**
(Zulkenedi Said, S.Sos, S.H., .Si., M.M., M.H.,M.AP)	**(Dr.H.Hardinalis Kobal, S.E.,M.M)**

Juru Bicara

(.....)

1. H.Afrizal, S.H., M.H (Wakil Ketua)
2. Zarfi Deson, S.H (Bendahara)
3. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M (Anggota)
4. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si (Anggota)
5. Dra. Hj. Siti Izzati Aziz (Anggota)

H. Lazuardi Erman. S.H (Anggota)

FRAKSI PPP – NasDem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

بسم الله الرحمن الرحيم

Pendapat Akhir
Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Perubahan Tahun 2024

Disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Antara
DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah
Senin, 19 Agustus 2024

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

✓ Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Yth. Sdr. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Yth. Sdr. Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Yth. Seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Pembahasan Akhir hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PPP-

NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PPP-NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

✓ **Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati**

Fraksi PPP-NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sejak tanggal 01-18 Agustus 2024, semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

✓ **Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati**

Proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian-pencapaian pada periode sebelumnya seharusnya menjadi salah satu tolak ukur dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2024. Perubahan APBD dalam tahun anggaran berjalan memungkinkan dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan difisit atau surflus anggaran.

Dalam rangka perubahan anggaran inilah kita secara marathon telah membahas berbagai hal yang terkait dengan penambahan anggaran, pengurangan anggaran dan bahkan penghapusan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu setiap anggaran yang disusun harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Bila efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, maka efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar. Efektifitas dapat dikaitkan dengan tujuan umum pemerintah antara lain : kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi), keadilan sosial, stabilisasi, ataupun tujuan sektoral yang lebih spesifik.

Untuk mengetahui capaian efisiensi dan efektivitas, maka perlu adanya indikator-indikator yang menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Selanjutnya indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut harus dapat menjelaskan bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran lebih diarahkan pada penggunaan pemenuhan target, dan dampak yang ditimbulkan dari belanja pemerintah, bukan tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Dalam kerangka inilah seharusnya Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun.

Dari hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, disepakati komposisi struktur anggaran yang akan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 6.857.076.350.555,-
	a. PAD	Rp. 3.348.283.830.555,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.491.768.520.000,-
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 17.024.000.000,-
2.	Belanja Daerah	Rp. 7.017.523.894.980,-
	a. Belanja Operasional	Rp. 4.800.252.901.089,19
	b. Belanja Modal	Rp. 881.594.721.336,-
	c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 18.820.249.698,-
	d. Belanja Transfer	Rp. 1.316.856.022.857,-
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 180.447.544.425,19,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000.000,-

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Setelah mencermati dan melakukan analisa terhadap laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Fraksi PPP-NasDem memberikan beberapa catatan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Adapun beberapa catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Pemerintah daerah harus konsisten mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan program-program yang disepakati oleh TAPD dan Banggar pada KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2024.
b) Fraksi PPP-NasDem berharap Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 diarahkan kepada belanja ~~produktif~~ yang berkualitas. Sedangkan untuk pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD difungsikan untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, dengan meningkatkan menejemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Sehingga fungsi pembiayaan daerah sebagai penyeimbang antara pendapatan daerah dengan sisi belanja daerah secara makro menjadi berimbang,tidak mengalami defisit maupun surplus.
c) Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan harus taat anggaran dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.
d) Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah.
e) Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar memerintahkan ketua TAPD untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah

dan menyisir/menunda kegiatan-kegiatan OPD yang tidak urgen khususnya pada belanja barang dan jasa.

f) Fraksi PPP-NasDem menyarankan agar program - program pendidikan dan pelatihan kerja di Provinsi Sumatera Barat dapat ditingkatkan, dengan harapan dapat memberikan peluang usaha terhadap masyarakat, atau peningkatan keterampilan bagi masyarakat agar dapat diterima pada perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang membutuhkan.

g) Kepada OPD pengguna anggaran, Fraksi PPP-NasDem meminta agar Pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan kontiniu. Tidak lambat di awal periode, namun cepat di akhir tahun anggaran. Karena Pola-pola seperti ini adalah cerminan bahwa proses penyusunan anggaran dan penyerapannya belum efektif, efisien dan proporsional. Harapannya, pola-pola penyerapan seperti di atas seharusnya tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2025.

h) Fraksi PPP-NasDem meminta keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan usulan yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi PPP-NasDem dengan ini dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dijadikan sebagai Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 19 Agustus 2024

Bakri Bakar
Juru Bicara

Fraksi PPP-NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Sawal, SH
Ketua

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PPP - NASDEM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Irwan Afriadi
Sekretaris

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**

Hadirin yang kami muliakan,

Terlebih dahulu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, se izin pimpinan kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan atas rahmat Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan -*minazzulumati ilannur*- sebagaimana yang kita rasakan hari ini serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam

Pempinan Serta Hadirin Yang Kami Muliakan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir Fraksi kami ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan untuk HUT RI ke- 79 : ***"Merdeka Bukan Hanya Kata, Melainkan Tekad Untuk Terus Berkarya. Selamat Ulang Tahun Ke-79, Indonesia! Mari Terus Maju"***

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada kondisi saat ini kita perlu melakukan perbaikan dalam terutama dalam peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah terencana terutama kegiatan yang menyangkut untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Fraksi kami berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa kedepan khususnya terhadap target-target pendapatan, pihak-pihak yang terkait pada posisi ini betu-betul sudah memakai azaz professional dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama ucapan terimaksih Fraksi kami kepada kawan-kawan di Banggar serta TAPD yang telah menyelesaikan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Pada tahun 2023 yang lalu dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Fraksi kami pernah menyampaikan bahwa di dalam mengahadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini diperlukan suatu konegtifitas dan transparansi baik itu di dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun hubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang terjadi saat ini dapat kita atasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan Pembangunan Sumatera Barat yang kita cintai ini. Fraksi kami sekali lagi mengingatkan hal ini.

3. Sebagaimana dalam laporan Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD bahwa memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024,

maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terhadap hal ini Fraksi kami memberikan pendapat bahwa *kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak terganggu dalam melakukan rasionalisasi tersebut sebab kegitan ini sudah memperhitungkan dampak manfaat bagi masyarakat. dan pembangunan provinsi yang kita cintai ini.*

4. Tentang Pendapat Asli Daerah, sebagaimana yang terlihat pada Laporan Banggar bersama TAP bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diusahakan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 3.348.283.830.555, (hasil pembahsan kedua) kurang dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dengan segala pertimbangan, Fraksi kami dalam hal ini memberikan pendapat bahwa posisi PAD ini selalu dapat diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, kedepan kita berharap bahwa posisi PAD ini sudah harus dapat menempatkan angka-angka/nilai-nilai yang dimunculkan/ditampilkan sudah bersifat realistis.

5. Tentang Target PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2024 lebih tinggi dari target PAD dalam Perda APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 230.041.779.655,-, oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam hal pencapaian target tersebut agar bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan target Pendapatan tersebut. Fraksi kami juga sepakat dengan Banggar agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti di tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target PAD dan sehubung tahun ini juga telah terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan lambatnya pergerakan pertumbuhan ekonomi dibeberapa titik di Sumataera Barat pasca bencana alam, maka Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan kerjasama yang kongkrit dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

6. Sebagaimana dalam Laporan Banggar Bersama TAPD bahwa alokasi Belanja Daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024 , lebih besar Rp. 199.503.502.031,19,- dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal, dan Terkait dengan alokasi belanja daerah ini, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya; *Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya* ***di akhir masa jabatannya,*** Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat setuju serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait untuk lebih bersungguh-sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024 dan mencapai target kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

7. Tentang Pembiayaan Daerah yang bersumber pada Silpa APBD Tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp 180.447.544.425,`7 dan pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari Fraksi kami dapat menerimanya.

8. Terkait Perubahan APBD tahun 2024 yang diantaranya diakibatkan karena lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD, lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dimana seringkali ditemukan kegiatan perencanaan dilakukan dalam tahun berjalan dan bermuara pada kualitas Pembangunan yang tidak maksimal oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat untuk memperhatikan sistem keuangan yang baik di sisa tahun anggaran ini kedepannya, dan Fraksi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait melakukan perencanaan DED pada anggaran perubahan sehingga bisa memaksimalkan kegiatan fisik serta penyerapan anggaran di awal tahun.

9. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendorong semangat tertib administrasi keuangan untuk selalu dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang & jasa dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi tanpa adanya banyak temuan kepada

Pemerintah Daerah dan OPD Terkait dalam penggunaan/pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun anggaran

Rapat Dewan Yang Kami Muliakan,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas yang merupakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan berbagai harapan, catatan-catatan, saran bahkan kritikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Sumatera Barat maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ***menyatakan dapat menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 19 Agustus 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, S.E	**Firdaus, S.H.I**
Ketua	Sekretaris



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6649 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.4-3738 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satun Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.6.586.576.217.900,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.270.717.934.620,00 (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.857.294.152.520,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

b. Belanja Daerah semula berjumlah Rp.6.818.020.392.949,00 (enam triliun delapan ratus delapan belas miliar dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.199.721.303.996,19 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.017.741.696.945,19 (tujuh triliun tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan belas rupiah).

c. Pembiayaan Daerah melalui penerimaan pembiayaan semula berjumlah Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah) dan Pembiayaan Daerah melalui pengeluaran pembiayaan semula berjumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), serta jumlah pembiayaan netto semula Rp.231.444.175.049,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.160.447.544.425,19 (seratus enam puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.3.118.242.050.900,00 (tiga triliun seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.224.527.848.690,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.342.769.899.590,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp.3.451.310.167.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.46.190.085.930,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.3.497.500.252.930,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

    a. Pajak Daerah semula sebesar Rp.2.554.336.907.537,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.139.114.133.919,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.693.451.041.456,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

    b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp.384.295.538.231,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu

rupiah) bertambah sebesar Rp.29.985.184.402,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp.414.280.722.633,00 (empat ratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp.125.495.605.132,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.4.129.371.958,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.129.624.977.090,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp.54.114.000.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp.51.299.158.411,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.105.413.158.411,00 (seratus lima miliar empat ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp.3.422.903.367.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.43.940.085.930,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.466.843.452.930,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

b. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.28.406.800.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.30.656.800.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi semula sebesar Rp.4.686.643.781.871,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.166.874.855.191,19 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.853.518.637.062,19 (empat triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua koma sembilan belas rupiah).

b. Belanja Modal semula sebesar Rp.782.793.429.669,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.73.756.804.916,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.856.550.234.585,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.36.454.578.335,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.10.487.887.909,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

d. Anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp.1.301.640.715.165,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.4.455.777.776,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.297.184.937.389,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp.2.596.150.706.205,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.7.636.692.013,84 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga belas koma delapan empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.588.514.014.191,16 (dua triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta empat belas ribu seratus sembilan puluh satu koma enam belas rupiah).

b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.1.808.037.125.332,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.127.134.246.470,03 (seratus dua puluh tujuh miliar se ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh koma tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.935.171.371.802,03 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua koma tiga rupiah).

c. Belanja Subsidi semula sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

d. Belanja hibah semula sebesar Rp.275.955.950.334,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.52.246.853.235,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.328.202.803.569,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

e. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.130.447.500,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Emapat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 130.447.500,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah semula sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.2.207.107.760,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.478.117.620,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).

b. Belanja modal peralatan dan mesinsemula sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.829.770.040,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.223.905.542.378,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.7.567.989.718,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.254.114.942.168,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.60.181.480.190,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus

e. sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.332.313.610.530,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

f. Belanja ModalAset Tetap Lainnya semula sebesar Rp.40.733.064.681,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh

tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.986.857.208,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.43.719.921.889,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, semula sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.36.454.578.335,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.10.487.887.909,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp.1.253.494.615.165,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.3.955.777.776,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.249.538.837.389,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.48.146.100.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.47.646.100.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).

b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan /atau pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJM dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

i. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

j. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2024

Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (3 246/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sertai ditetapkan Peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelengaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur Perubahan APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan per undang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3